



KABUPATEN PASER

LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

PREPARED BY :

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

2025

Paser
TUNTAS





PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT

Jl. Kusuma Bangsa Km 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav.2
Telp (0543) 21104, 21038 Fax (0543) 23212
TANA PASER

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Paser.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tana Paser, 25 Maret 2026

Inspektur Kabupaten Paser



Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP 19720126 199703 2 002

KATA PENGANTAR



H. Huseini Idris
Bupati Paser

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Paser atas pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

LKjIP ini disusun sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta pelaporan yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). laporan ini juga sebagai instrumen evaluatif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menyajikan informasi kinerja secara komprehensif dan objektif, meliputi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, realisasi program serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya publik dalam mencapai target pembangunan daerah.

Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Paser pada Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi tersebut menjadi bahan refleksi penting dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas akuntabilitas kinerja tidak semata-mata diukur dari tingkat pencapaian indikator, melainkan juga dari sejauh mana sistem manajemen kinerja mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen untuk terus melakukan penguatan pada seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu “Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera”, yang menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dapat menjadi media evaluasi yang konstruktif, sekaligus pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Paser serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Tana Paser, Maret 2026

BUPATI PASER,



dr. FAHMI FADLI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025 diukur dari capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-171/2024 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser, bahwa telah ditetapkan IKU Bupati/Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sebanyak 4 indikator kinerja tujuan dan 14 indikator kinerja sasaran. Capaian IKU ini secara garis besar menggambarkan pula capaian kinerja tahun 2025 atas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Rata-rata realisasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 sebesar **111,03 Persen** termasuk dalam kategori peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Dalam Laporan LKjIP ini telah juga membandingkan capaian kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja dengan target kinerja Provinsi, Nasional maupun Internasional yang memiliki kesamaan indikator kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Paser, selain itu juga membandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Paser sudah melaksanakan proses yang berkaitan dengan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, baik dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASER	2
A. Geografi dan Iklim	3
B. Pemerintahan.....	6
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	14
D. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	18
2.2 VISI	18
2.3 MISI	20
2.4 TUJUAN DAN SASARAN	20
2.5 ISU STRATEGIS	24
2.6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
2.7 PROGRAM.....	40
2.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN	51
2.9 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	60
3.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	61
A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan.....	61
B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran	62

3.2	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2025	64
3.3	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	114
3.4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD	117
3.5	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL	119
3.6	ANALISIS CAPAIAN PROGRAM YANG MENDUKUNG TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	123
3.7	ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	148
3.8	AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025	150
BAB IV PENUTUP.....		167
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	PETA WILAYAH KABUPATEN PASER.....	2
GAMBAR 1.2	KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM.....	3
GAMBAR 1.3	PERSENTASE WILAYAH MENURUT KECAMATAN.....	4
GAMBAR 1.4	LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN (%).....	5
GAMBAR 1.5	BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KECAMATAN	7
GAMBAR 1.6	JUMLAH PNS MENURUT JENIS KELAMIN	7
GAMBAR 1.7	JUMLAH PNS MENURUT INSTANSI DAN JENIS KELAMIN 2025.....	8
GAMBAR 1.8	ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	13
GAMBAR 1.9	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025	15
GAMBAR 1.10	BANYAKNYA PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2025	15
GAMBAR 1.11	APM DAN APK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2025	17
GAMBAR 3.1	PROSES BISNIS SASARAN 1	67
GAMBAR 3.2	PROSES BISNIS SASARAN 2	70
GAMBAR 3.3	PROSES BISNIS SASARAN 6	90
GAMBAR 3.4	PROSES BISNIS SASARAN 7	97
GAMBAR 3.5	PROSES BISNIS SASARAN 8	102
GAMBAR 3.6	PROSES BISNIS SASARAN 9	107
GAMBAR 3.7	PROSES BISNIS SASARAN 10	107
GAMBAR 3.8	PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA KALIMANTAN TIMUR	121
GAMBAR 3.9	PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MITRA DAGANG INDONESIA.....	121

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN	5
TABEL 2.1	PROSES BISNIS KABUPATEN.....	19
TABEL 2.2	TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA 2025	20
TABEL 2.3	MATRIK HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	22
TABEL 2.4	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 1	27
TABEL 2.5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 2	30
TABEL 2.6	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 3	34
TABEL 2.7	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 4	37
TABEL 2.8	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN	51
TABEL 2.9	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	52
TABEL 3.1	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	62
TABEL 3.4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1	65
TABEL 3.5	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2	67
TABEL 3.6	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3	71
TABEL 3.7	PEMBAGIAN TUGAS DALAM PENCAPAIAN STRATEGIS 3	72
TABEL 3.8	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 4	76
TABEL 3.9	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 5	79
TABEL 3.10	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 6	81
TABEL 3.11	NILAI KONVERSI IKLI	82
TABEL 3.12	REKAPITULASI HASIL IKLI KAB. PASER 2025.....	84
TABEL 3.13	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 7	90
TABEL 3.14	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 8	98
TABEL 3.15	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 9	103
TABEL 3.16	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 10	108
TABEL 3.17	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	114
TABEL 3.18	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	115

TABEL 3.19	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD	118
TABEL 3.20	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL	119
TABEL 3.21	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DENGAN C APAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN I NTERNASIONAL.....	119
TABEL 3.22	ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	147
TABEL 3.23	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM YANG MENUNJANG SASARAN STRATEGIS	149

BAB I PENDAHULUAN

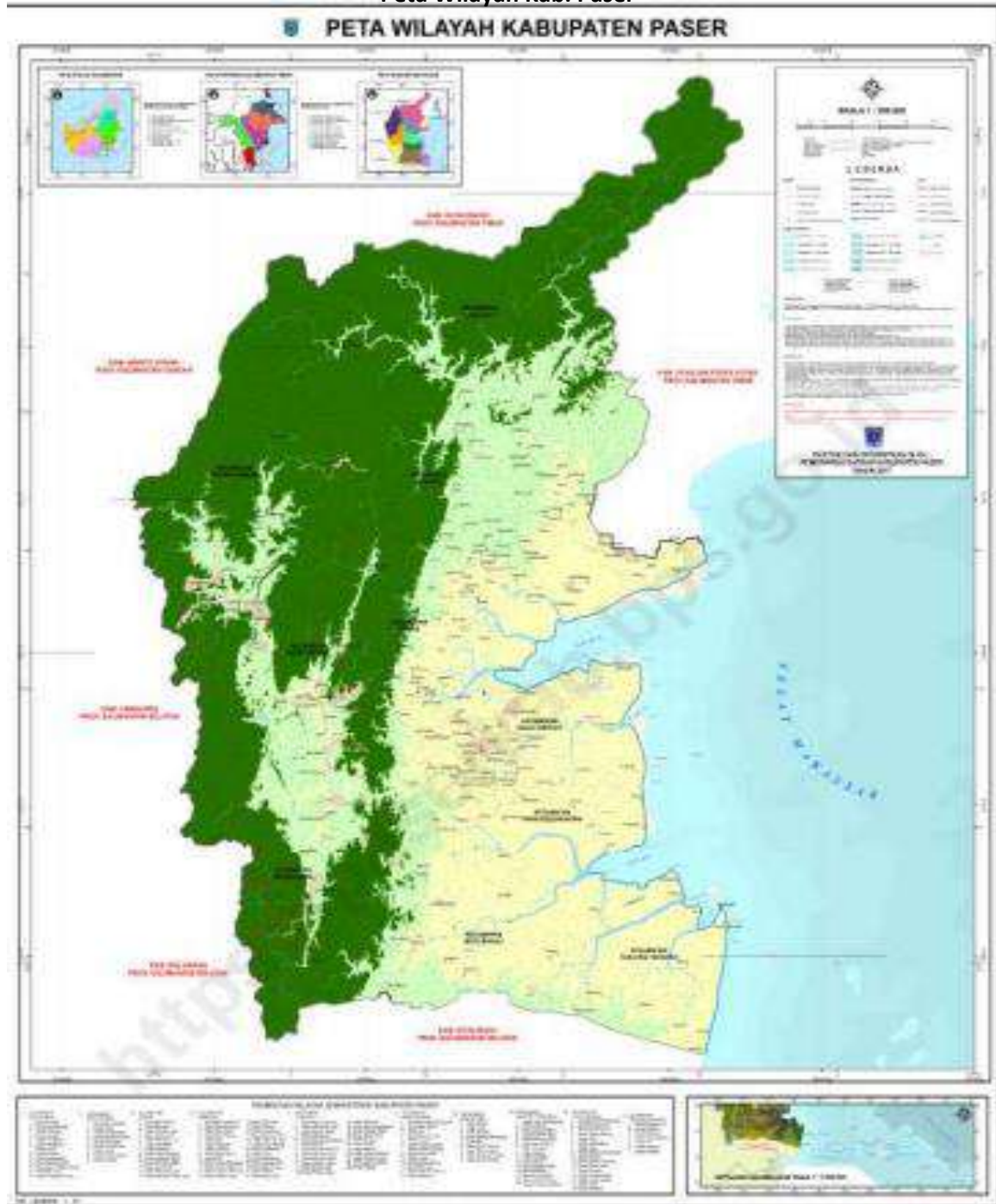
1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan capaian kinerja tahun ke empat dari RPJMD dan merupakan periode terakhir dari RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASER

**Gambar 1.1
Peta Wilayah Kab. Paser**



A. Geografi dan Iklim

Gambar 1.2
Kondisi Geografis dan Iklim



Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi 0° 48' 29.44" - 2° 37' 24.21" Lintang Selatan dan 115° 37' 0.77" - 118° 1' 19.82" Bujur Timur. Ibukota Kabupaten ini terletak di Tana Paser.

Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan

Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat), sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).

Keadaan Geografi Kabupaten Paser tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan serta sungai yang tersebar di seluruh Kecamatan. Dimana terdapat kekayaan 49 gunung/pegunungan yang tersebar di Kecamatan Muara Samu serta terdapat 41 sungai mengalir di wilayah Kecamatan Kuaro.

Adapun luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km².

Rata-rata jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser (Tanah Grogot) melalui jalan darat adalah 54 Km dengan jarak Kecamatan terjauh adalah Kecamatan Muara Komam dengan jarak sejauh 86 Km. Selain dapat melalui sarana transportasi darat menuju Ibukota Kabupaten Paser sejauh 57 Km, Kecamatan Tanjung Harapan dapat melalui sarana transportasi laut menuju Ibukota Kabupaten Paser dengan menempuh jarak 66 Km.

Gambar 1.3
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan



Tabel 1.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kab. Paser

Kecamatan	Luas Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Batu Sangap	Batu Sangap	1.113,38	9,58
Muara Samu	Muara Samu	893,25	7,37
Batu Engau	Batu Engau	1.007,26	8,39
Tanjung Harapan	Tanjung Harapan	714,82	6,15
Pasar Belengkong	Pasar Belengkong	900,11	7,53
Tanah Grogot	Tanah Grogot	293,58	2,44
Kuaro	Kuaro	107,33	0,90
Lung Rih	Lung Rih	7.254,22	59,79
Muara Kaman	Muara Kaman	1.763,40	14,71
Lung Kati	Lung Kati	2.085,29	17,24
Paser	Tanjung Sangap	11.005,94	100,00

Sumber : BPS Kab. Paser dalam angka Tahun 2025

Gambar 1.4
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) di Kab. Paser



Sumber : BPS Kab. Paser dalam angka Tahun 2025

B. Pemerintahan



Sumber : BPS Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2025

❖ Wilayah Administratif

Sampai dengan tahun 2025, Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan, 139 desa, dan 5 Kelurahan. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Desa/Kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Longikis, dengan 1 kelurahan dan 25 Desa, sedangkan desa/kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjung Harapan yang hanya memiliki 7 Desa.

Gambar 1.5
Banyaknya Desa/Kelurahan di Kab. Paser Menurut Kecamatan



❖ Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berjumlah 3.897 orang. Jika ditinjau berdasarkan Golongan, menurut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser, berdasarkan golongan I, II, III, dan IV pada tahun 2024 berturut-turut sebanyak 13 orang, 532 orang, 2.398 orang, dan 954 orang. Sedangkan bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai laki-laki.

Gambar 1.6
Jumlah PNS Kab. Paser Menurut Jenis Kelamin 2019-2024



Sumber : BPS Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 1.7
Jumlah PNS Kab. Paser Menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin 2024

	Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Male	Female	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20	12	32
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15	10	25
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24	19	43
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	6	33
5	Badan Pendapatan Daerah	19	22	41
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29	21	50
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16	14	30
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	21	31
9	Dinas Kesehatan	23	34	57
10	Dinas Ketahanan Pangan	10	11	21
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17	14	31
12	Dinas Lingkungan Hidup	69	19	78
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	33	12	45
14	Dinas Pemadam Kebakaran	28	11	39
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	13	27
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	21	9	30
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	10	23
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65	28	93
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	15	26	41
20	Dinas Perhubungan	24	6	30

Lanjutan Tabel/ Continued Table 2.3.5

Dinas/Instansi Pemerintahan		Jenis Kelamin/Sex		
<i>Institution/Office</i>		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)		(2)	(3)	(4)
21	Dinas Perikanan	17	6	23
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan UMKM	12	16	28
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	17	8	25
24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22	11	33
25	Dinas Sosial	11	8	19
26	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	59	20	79
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13	12	25
28	Inspektorat	36	22	58
29	Kecamatan Batu Engau	13	4	17
30	Kecamatan Batu Sopang	7	6	13
31	Kecamatan Kuaro	12	5	17
32	Kecamatan Long Ikis	13	4	17
33	Kecamatan Long Kali	20	2	22
34	Kecamatan Muara Komam	8	4	12
35	Kecamatan Muara Samu	12	0	12
36	Kecamatan Paser Belengkong	19	5	24
37	Kecamatan Tanah Grogot	14	5	19
38	Kecamatan Tanjung Harapan	10	2	12
39	Kelurahan Kuaro	5	2	7
40	Kelurahan Long Ikis	5	3	8

Lanjutan Tabel/ Cotinued Table 2.3.5

Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>		Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Male	Female	Total
(1)		(2)	(3)	(4)
41	Kelurahan Long Kali	7	2	9
42	Kelurahan Muara Komam	5	1	6
43	Kelurahan Tanah Grogot	5	5	10
44	Rumah Sakit Daerah Kerang	8	17	25
45	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya	113	178	291
46	Satuan Polisi Pamong Praja	72	8	80
47	Sekolah-Sekolah	581	807	1388
48	Sekretariat Daerah	84	70	154
49	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	33	8	41
50	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BBTH)	2	1	3
51	UPTD Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Aru	2	0	2
52	UPTD Balai Latihan Kerja	2	3	5
53	UPTD Balai Pembibitan Ternak (BPT) Petangis	2	0	2
54	UPTD Laboratium Kesehatan Daerah	6	5	11
55	UPTD Laboratorium Ungkuhan Hidup	1	1	2
56	UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material	3	2	5
57	UPTD Metodologi Legal	4	0	4
58	UPTD Pasar Penyembolum Senaken	19	0	19
59	UPTD Pelabuhan Tana Paser	4	0	4
60	UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bulau Sayang	4	0	4

Lanjutan Tabel/ Cotinued Table 2.3.5

	Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Male	Female	Total
(1)		(2)	(3)	(4)
61	UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan	1	1	2
62	UPTD Pengelola Gedung Perkantoran Gentung Temiang	1	0	1
63	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	7	0	7
64	UPTD Perbekalan Obat Dari Alat Kesehatan	2	9	11
66	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	3	3	6
66	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Batu Engau	2	0	2
67	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuaro	5	0	5
68	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Long Ikis	4	1	5
69	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Muara Komam	2	0	2
70	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Paser Belengkong	4	1	5
71	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Grogot	3	1	4
72	UPTD Puskesmas Batu Kajang	6	23	29
73	UPTD Puskesmas Kayungu	6	14	20
74	UPTD Puskesmas Kerang	8	15	23
75	UPTD Puskesmas Krayan	6	14	20
76	UPTD Puskesmas Kuaro	9	32	41
77	UPTD Puskesmas Lolo	4	13	17
78	UPTD Puskesmas Long Ikis	6	30	36
79	UPTD Puskesmas Long Kali	5	18	23
80	UPTD Puskesmas Mendik	7	19	26

Lanjutan Tabel/ Cotinued Table 2.3.5

Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>		Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)		(2)	(3)	(4)
81	UPTD Puskesmas Muara Komam	7	18	25
82	UPTD Puskesmas Muser	3	15	18
83	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat	7	18	25
84	UPTD Puskesmas Paser Belengkong	6	36	42
85	UPTD Puskesmas Sebakung	4	14	18
86	UPTD Puskesmas Senaken	5	32	37
87	UPTD Puskesmas Suatang Baru	3	14	17
88	UPTD Puskesmas Suliliran Baru	6	19	25
89	UPTD Puskesmas Tanah Grogot	3	41	44
90	UPTD Puskesmas Tanjung Aru	2	12	14
91	UPTD Puskesmas Potong Hewan	1	1	2
92	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman	4	0	4
93	UPTD Terminal Kota Tanah Grogot	3	0	3
94	UPTD Terminal Kuaro	3	0	3
Jumlah/Total		1.932	1.985	3.897

Sumber : BPS Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2025

❖ **Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.366.153.156.172,00, realisasi sebesar Rp. 3.945.923.101.733,29 atau 90,38%, dengan anggaran belanja sebesar Rp. 4.937.617.900.000,00, realisasi Rp. 4.509.163.101.820,02 atau 91,32%, yaitu :

1. Belanja Operasi = Rp. 2.920.025.197.873,29
2. Belanja Modal = Rp. 1.557.808.299.426,71
3. Belanja Tidak Terduga = Rp. 10.000.000.000,00
4. Belanja Transfer = Rp. 449.784.402.700,00

**Gambar 1.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
PENDAPATAN	4.366.153.156.172,00	3.945.923.101.733,29	90,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH	363.678.300.475,00	401.008.487.625,29	110,26
Pendapatan Pajak Daerah	130.550.081.216,00	133.276.980.920,00	102,09
Pendapatan Retribusi Daerah	176.633.274.536,00	190.071.302.606,08	107,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	5.879.857.862,56	90,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.994.944.723,00	71.780.346.236,65	143,58
PENDAPATAN TRANSFER	3.931.049.365.800,00	3.473.489.124.293,00	88,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.261.654.814.415,00	2.871.997.077.616,00	88,05
Dana Perimbangan	3.137.121.394.415,00	2.769.519.998.994,00	88,28
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0,00
Dana Desa	124.533.420.000,00	102.477.078.622,00	82,29 89,86
Pendapatan Transfer Antar Daerah	669.394.551.385,00	601.492.046.677,00	
Pendapatan Bagi Hasil	393.583.551.385,00	325.681.046.677,00	82,75
Bantuan Keuangan	275.811.000.000,00	275.811.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	71.425.489.897,00	71.425.489.815,00	100,00
Pendapatan Hibah	-	-	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Paser Tahun 2025

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

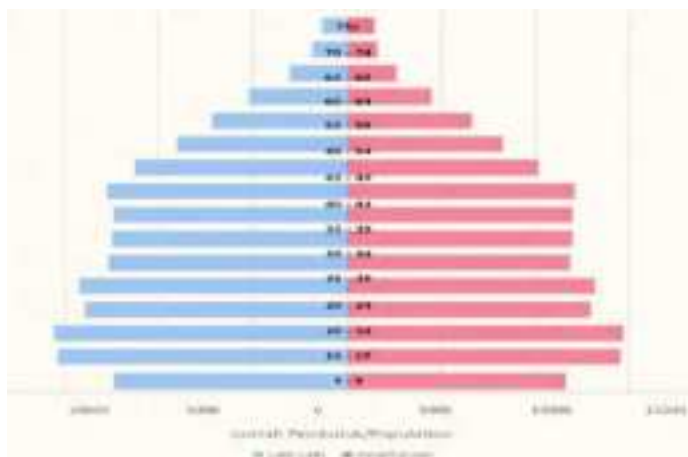


Sumber : BPS Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2025

❖ Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2024 mencapai 303.424 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 9.38% dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2020. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2023 adalah 107, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Gambar 1.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser, 2024



Sumber : BPS Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2025

❖ Ketenagakerjaan

Selama kurun waktu 2023-2024, angkatan kerja di Kabupaten Paser meningkat dari 134.940 orang menjadi 149.517 orang. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2024, TPAK laki-laki sebesar 89,43 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,22 persen. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur 35 hingga 39 tahun memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan kelompok umur yang lain.

Gambar 1.10
Banyaknya pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kab. Paser, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Dihamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki: Perempuan		Jumlah
	Male	Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>No Schooling</i>	—	—	—
Tidak/Belum tamat SD <i>Not Yet Complete Primary School</i>	6	—	6
Bekas Dasar <i>Primary School</i>	6	2	8
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	50	5	55
Sekolah Menengah Atas (Umum) <i>Senior High School (General)</i>	797	105	906
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) <i>Senior High School (Vocational)</i>	714	60	782
Diploma I/II/III/Academi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	42	20	62
Universitas <i>University</i>	210	223	447
Jumlah/Total	1.833	433	2.266

D. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat



❖ Pendidikan

Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah peningkatan jumlah sekolah dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2024, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikann adalah TK (Taman Kanak-Kanak) sebanyak 150 unit, RA (Raudatul Athfal) sebanyak 10 unit, SD (Sekolah Dasar) 224 unit, MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 13 unit, SMP (Sekolah Menengah

Pertama) sebanyak 79 unit, MTs (Madrasah Tsanawiyah) sebanyak 18 unit, SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 19 unit, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebanyak 10 unit, MA (Madrasah Aliyah) sebanyak 16 unit, dan Perguruan Tinggi sebanyak 4 unit.

Gambar 1.11
APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Paser Tahun 2024

Jenjang Pendidikan Educational Level	APM Net Enrollment Rate	APK Gross Enrollment Rate
(1)	(2)	(3)
SD/MI/Sederajat Primary School	98.40	100.11
SMP/MTs/Sederajat Lower Secondary School	76.22	63.06
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	68.31	66.58

❖ Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan terus menerus dari tahun ke tahunnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Hingga akhir tahun 2024, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser, antara lain 2 rumah sakit, 19 puskesmas, 31 klinik/balai kesehatan, 376 posyandu, dan 20 polindes.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

A. VISI

Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu:

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

- Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

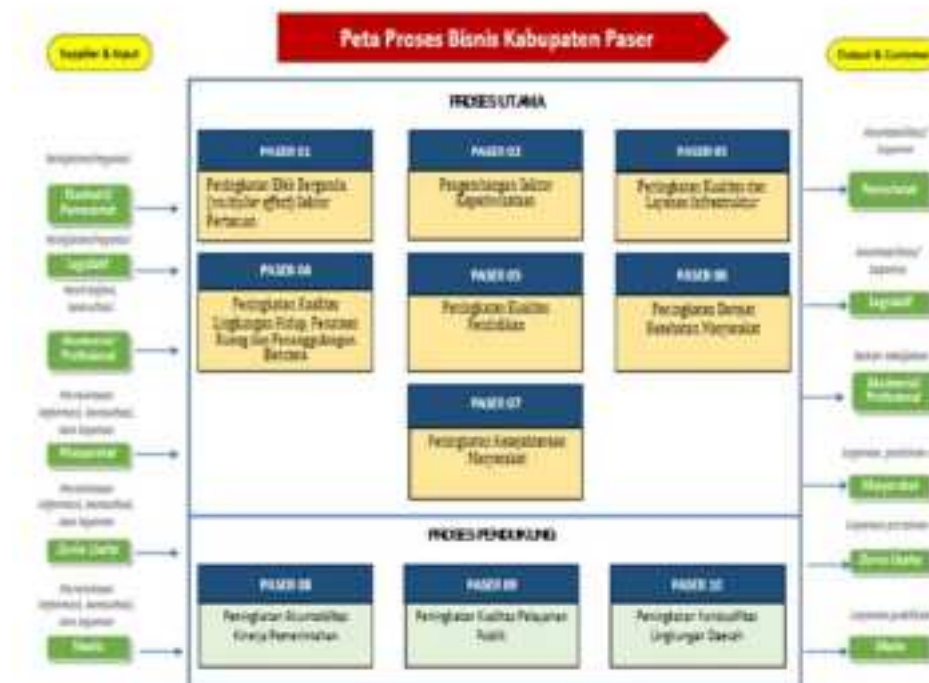
- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama dan pendukung, yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

Tabel 2.1
Peta Proses Bisnis Kabupaten



2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
3. Mengurangi Ketimpangan antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana table berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang	3,80
	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	15,85
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	63,40
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	85
	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	10

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,47
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,72
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	185,00
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,59
		Rata-rata Lama Sekolah	9,09
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,30
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,38
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,40

Tabel 2.3

Matriks Hubungan antara Visi, Misi
Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Paser

Misi 1		Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing							
Tujuan 1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal /non tambang	4,87	4,90	1,32	2,32	2,50	3,64	4,20
2	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	-2,28	-1,00	0,01	1,12	2,21	2,51	2,83
Misi 2		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan							
Tujuan 2		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	58,41	59	61	65	70	75	81
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	70	70	72	74	76	78
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	73,61	80	80	81	82	83	84
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	53	53	52	51	50	49	48

Misi 3		Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan							
Tujuan 3		Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	N/A	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,68	47,50	52,73	59,18	65,82	72,47	78,91
	penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	70,09	71,43	71,48	71,53	71,58	71,63
		Indeks Risiko Bencana	196	196,4	195,5	195	194,5	194	193,5
Misi 4		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing							
Tujuan 4		Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	13,10	13,25	13,30	13,35	13,40	13,50
		Rata-rata Lama Sekolah	8,55	8,55	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,62	72,71	72,80	72,90	73,10	73,20	73,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,23	8,50	8,00	7,30	6,80	6,30	5,80
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	4,50	3,45	3,17	3,15	3,12	3,10

2.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Isu strategis dapat digolongkan ke dalam isu internal dan eksternal, yang jika dilihat dari karakternya dapat berupa hal yang mendorong dan juga dapat berupa hal yang menghambat upaya kita untuk mencapai sasaran.

A. Isu Strategis Internal

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama Kabupaten Paser dalam pembangunan adalah terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Paser yang berdampak pada terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat.

2. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah dalam bidang sumber daya manusia maka dirumuskanlah isu-isu strategis, sebagai berikut. Hingga saat ini kualitas pembangunan manusia yang didekati dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan bahwa Paser masih relatif tertinggal dibandingkan dengan rata rata propinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan yang cenderung melambat.

3. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser adalah kinerja tata Kelola pemerintahan yang belum optimal. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengembangan e-government belum sepenuhnya diterapkan dan belum mengarah pada smart governance, belum optimalnya pelayanan publik serta pengelolaan potensi rawan konflik dan Trantibum yang belum optimal.

4. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Perekonomian Paser yang bertumpu pada pertambangan mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di satu sisi perekonomian yang bertumpu pada sektor pertambangan pertumbuhannya mulai menurun sejalan dengan semakin berkurangnya bahan tambang. Pada sisi lain sektor pertanian yang menjadi tumpuan penduduk terbanyak didominasi oleh kelapa sawit yang memiliki efek ganda (multiplier effect) rendah bagi perekonomian. Industri skala kecil berbasis sumber daya lokal dan industri kreatif (pariwisata) tidak berkembang.

B. Isu Strategis Eksternal

1. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Wilayah Penajam Paser Utara

Status Kabupaten Paser sebagai daerah mitra IKN akan menarik masyarakat untuk datang dan tinggal di Kabupaten Paser. Kebijakan Pemerintah Pusat ini tentunya menjadi peluang ketika Paser dapat bersiap, namun akan menjadi ancaman jika Paser berjalan seperti biasa. Pada aspek ekonomi peluang itu setidaknya muncul dari tingginya permintaan berbagai produk dari mulai produk pangan sampai produk industri. Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN, dari sektor pertanian akan mendapatkan peluang untuk menyiapkan pangan bagi penduduk di Ibu Kota Negara yang baru ini, seperti beras, sayur, buah-buahan, daging dan ikan, kebutuhan akan hiburan masyarakat, industri pengolahan hasil kecil-menengah dan industri besar akan tumbuh dengan sendirinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Telake di Kecamatan Long Kali, menjadi isu strategis eksternal yang sangat didambakan pada sector pertanian.

Dengan adanya bendungan tersebut setidaknya dapat mengairi sawah di Kecamatan Long Kali dan Long Ikis yang merupakan Kecamatan sentra sawah di Kabupaten Paser. Pada 2 Kecamatan tersebut terdapat potensi sawah yang dapat dicitak. Pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk pengairan sawah, namun juga pemenuhan pengairan pertanian dalam arti luas. Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan konsumsi masyarakat dan pendistribuan pangan ke daerah lain dapat dilaksanakan.

3. Pengembangan Food Estate dan Mini Ranch

Food Estate atau “Perkampungan Industri Pangan” merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian yang dilakukan secara terintegrasi mencakup Pertanian, Perkebunan, bahkan Peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Paser yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional atau belum target sebesar 41% (91 indikator) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan panjang dalam pencapaian indikator TPB yang didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional.

5. New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan)

New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) adalah hasil dari Konferensi PBB mengenai Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang Berkelanjutan atau dikenal dengan Konferensi Habitat yang ke III yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016.

Dalam mendukung New Urban Agenda pemerintah Kabupaten Paser perlu melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penanganan kawasan permukiman kumuh khususnya pada wilayah perkotaan, pembangunan perumahan yang terjangkau, penyediaan sarana air minum dan sanitasi, penyediaan ruang publik, fasilitas sosial dan penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

2.6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi sehingga pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dapat terwujud.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut strategi dan arah kebijakan Kabupaten Paser dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Misi 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing Sasaran

Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing		
	1.1. Meningkatkan efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	1. Pengembangan kawasan peternakan (Mini Ranch) dan produksi peternakan 2. Pengembangan kawasan pertanian (Food Estate) dan kawasan Hortikultura 3. Peremajaan komoditi Kelapa Sawit dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya 4. Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri)	5. Peningkatan Mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Pengembangan industri olahan oleh IKM dan UMKM bahan baku berbasis pertanian
		Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit	7. Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO
		Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan memanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industry	8. Penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan
	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	9. Pengembangan daya Tarik wisata alam, 10. Pengembangan daya Tarik wisata budaya dan sejarah 11. Pengembangan daya Tarik wisata buatan 12. Peningkatan promosi pariwisata 13. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 14. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pengembangan pusat olahraga (Sport Center) 15. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pembangunan Menara Pandang (viewing deck)
		Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	16. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa anggunan dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan mudah
		Mendorong tumbuhnya investasi sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat	17. Penguatan peran usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan pariwisata
		Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	18. Mempercepat kemudahan investasi yang berorientasi usaha kecil dan pariwisata
		Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	19. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan transportasi menuju objek wisata

Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan

Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		
	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis money follows program priority 2. Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan 3. Mewujudkan Opini BPK : WTP 4. Peningkatan kontribusi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan 5. Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
		Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	6. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Penerapan SPIP Terintegrasi di Perangkat Daerah 8. Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sesuai STRANAS PK

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah	9. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	10. Implementasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial
		Revitalisasi struktur kelembagaan OPD	11. Penataan struktur organisasi yang proporsional
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	12. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju smart city (kota pintar) 13. Peningkatan penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
		Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi	14. Percepatan penerapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia 15. Peningkatan kemudahan dan keamanan layanan informasi
		Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet	16. Peningkatan kerjasama dengan penyedia jasa jaringan internet

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik	17. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pengembangan zona integritas
		Mengembangkan sistem manajemen komplain handling	18. Membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan public	19. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik 20. Pelaksanaan Desentralisasi urusan pemerintah daerah ke Kecamatan/Kelurahan 21. Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas
	3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Penguatan penegakkan Perda	22. Peningkatan intensitas pengawasan 23. Peningkatan kapasitas personil penertiban 24. Penindakan dan evaluasi pelanggaran Peraturan daerah
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	25. Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan 26. Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.
		Peningkatan Kualitas Legislasi daerah	27. Penetapan produk hukum daerah tepat waktu 28. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pendidikan politik dan perilaku demokratis	29. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu 30. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	31. Peningkatan peran BNK dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye, deteksi dini, pendidikan dan pemetaan kawasan. 32. Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN

Misi 3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tabel 2.6
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup		
	1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.	1. Peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah sentra pertumbuhan ekonomi; 2. Pembangunan Jalan untuk memperlancar mobilitas Barang/Jasa pada daerah rendah konektivitas; 3. Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan mantap khususnya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan; 4. Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan; 5. Peningkatan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan; 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan;
		Meningkatkan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik	7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah;
		Percepatan pengurangan luasan kawasan	8. Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		permukiman kumuh.	kumuh;
		Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman	9. Peningkatan penanganan rumah korban bencana 10. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni 11. Pengelolaan dan pengembangan spam di daerah kabupaten 12. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten. 13. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.	14. Peningkatan sarana dan prasarana air baku; 15. Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir; 16. Operasi dan Pemeliharaan Sungai wilayah Kabupaten; 17. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder kewenangan Kabupaten
		Melakukan Kerjasama /Sharing pendanaan infrastruktur.	18. Melakukan Pinjaman Daerah dalam pengembangan infrastruktur 19. Meningkatkan peran serta perusahaan dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang.	20. Mempercepat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang setiap Kecamatan; 21. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan kawasan sesuai rencana tata ruang
		Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	22. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Penguatan komunitas tangguh bencana.	23. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana; 24. Melakukan pembentukan dan kolaborasi komunitas-komunitas peduli bencana
		Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.	25. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah; 26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 27. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah yang

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			fokus di bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sampah	28. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA; 29. Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; 30. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan 3R (reduce, reuse, recycle) di rumah tangga

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata		
	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter	1. Penyediaan sarana dan prasarna pendidikan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pelaksanaan pendidikan karakter dengan memperhatikan aspek religious, nasiolisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong serta peran serta keluarga

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan
		Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi	3. Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit	4. Penguatan kapasitas kelembagaan puskesmas dalam bentuk BLUD 5. Peningkatan capaian akreditasi puskesmas serta capaian SPM 6. Penguatan fasilitas pelayanan dasar dan rujukan, kompetensi tenaga kesehatan, tata kelola dan pengendalian penyakit
		Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	7. Meningkatkan upaya promosi, preventif, surveillance serta peran serta masyarakat/dunia usaha dan pemanfaatan inovasi teknologi
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan,	8. Meningkatkan Pengendalian penduduk, pembinaan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana	keluarga sejahtera
		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan	9. Penguatan PUG PUHA, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan system data dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha	10. Meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi perlindungan dan jaminan social, serta pelayanan social masyarakat korban bencana 11. Mengembangkan kesenian tradisional pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman 12. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan kapasitas kepramukaan 13. Meningkatkan perlindungan perempuan. Kualitas keluarga dan pengarusutamaan hak anak

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan /hubungan industri	14. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan pekerja mandiri 15. Meningkatkan kualitas balai latihan kerja daerah serta mengoptimalkan peluang kemitraan dengan perusahaan/badan usaha swasta 16. Meningkatkan kondisivitas dan keberlangsungan usaha melalui penyelesaian konflik hubungan industrial yang berkeadilan, dan mendorong peran pengusaha dalam hal kesejahteraan

2.7 PROGRAM

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
Meningkatnya efek berganda(multiplier effect) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Hortikultura)
		2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)
		3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)
		4. Perekonomian dan Pembangunan
		5. Penyuluhan Pertanian
		6. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
		7. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan).
		9. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)
		10. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
		11. Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
		12. Pengelolaan Perikanan Tangkap
		13. Pengelolaan Perikanan Budidaya
		14. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		15. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 16. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan 17. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 18. Penanganan Kerawanan Pangan 19. Pengawasan Keamanan Pangan 20. Perencanaan dan Pembangunan Industri 21. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota 22. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 23. Promosi Penanaman Modal 24. Pelayanan Penanaman Modal
Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Penting 7. Pengembangan Ekspor 8. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 9. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 10. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 12. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian 13. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 14. Pengembangan UMKM
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 5. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	1. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 4. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 5. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 7. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Sosial 8. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1. Penyelenggaraan Jalan 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Penataan Bangunan Gedung 4. Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6. Pengembangan Perumahan 7. Kawasan Permukiman 8. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 9. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 12. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 14. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 15. Pengelolaan Pelayaran 16. Pengelolaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Perkeretaapian 17. Perencanaan Kawasan Transmigrasi 18. Pembangunan Kawasan transmigrasi 19. Pengembangan Kawasan transmigrasi 20. Perencanaan Lingkungan Hidup 21. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 22. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 23. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 24. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 25. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEPengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLHHATI) 26. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		27. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 28. Pengelolaan Persampahan 29. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 30. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 31. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 32. Penanggulangan Bencana 33. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 34. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 35. Penetapan Tanah Ulayat 36. Penatagunaan Tanah
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Risiko Bencana (IRB)	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 15. Program Penyelesaian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 16. Program Penetapan Tanah Ulayat 17. Program Penatagunaan Tanah 18. Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan Kurikulum 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra 6. Pembinaan Perpustakaan 7. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 6. Program Perencanaan Tenaga Kerja 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Hubungan Industrial 10. Program Pengendalian Penduduk 11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 13. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 14. Program Perlindungan Perempuan 15. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 16. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 17. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 18. Program Perlindungan Khusus Anak 19. Program Pengembangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 20. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 21. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 22. Program Pengembangan Kebudayaan

2.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 10.3.3.2/KEP-171/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan meliputi : (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Indeks Reformasi Birokrasi, (3) Indeks Gini, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN



2.9 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

❖ Anggaran Murni Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	1.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal / Non Tambang	Angka	7,68
2.	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	2.	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Angka	2,51
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3.	Nilai SAKIP	Nilai	65
		4.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	85
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.	Nilai IKM Daerah	Nilai	86
5.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusi	6.	Angka Krminalitas	Angka	10
6.	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	7.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	8.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	72,47
		9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,72
		10.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	190
8.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11.	Angka Harapan Sekolah	Angka	13,59
		12.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata	9,15
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Umur Harapan Hidup	Angka	74
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	14.	Angka Kemiskinan	Angka	8,5
		15.	Tingkat Pengangguran terbuka	Angka	4,50

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	265.784.135.574,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.271.355.428,00
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7.812.829.800,00
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	356.425.800,00
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	250.000.000,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	197.425.042.049,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.185.842.853,00

8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	50.000.000,00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.812.495.000,00
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	139.738.266.600,00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	298.044.800.000,00
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.000.000.000,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	31.842.773.332,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	35.141.502.000,00
15	Program Penataan Bangunan Gedung	239.787.454.899,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	551.964.286.185,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.043.224.000,00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.687.680.000,00
19	Program Pengembangan Perumahan	9.716.565.200,00
20	Program Kawasan Permukiman	13.783.200.000,00
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	15.636.000.000,00
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	453.873.866.000,00
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.610.349.000,00
24	Program Penanggulangan Bencana	6.939.137.620,00
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.318.824.060,00
26	Program Pemberdayaan Sosial	384.562.270,00
27	Program Rehabilitasi Sosial	7.729.659.288,00
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	949.515.700,00
29	Program Penanganan Bencana	1.433.102.500,00
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	157.910.700,00
31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	212.660.300,00
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.098.172.610,00
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.652.887.834,00
34	Program Hubungan Industrial	12.042.057.290,00
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	630.461.751,00
36	Program Perlindungan Perempuan	113.026.207,00
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	108.319.800,00
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	11.162.000,00
39	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	353.318.900,00
40	Program Perlindungan Khusus Anak	448.405.000,00
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.996.676.400,00
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.600.153.250,00
43	Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.284.035.282,00
44	Program Penguatan Keamanan Pangan	573.800.000,00

45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	349.600.000,00
46	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	48.218.262.000,00
47	Program Penetapan Tanah Ulayat	82.850.000,00
48	Program Penatagunaan Tanah	426.070.000,00
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	588.696.400,00
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.043.382.958,00
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.984.678.359,00
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	138.953.136,00
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	183.795.800,00
54	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.164.000,00
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	225.170.400,00
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.898.250,00
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	178.252.000,00
58	Program Pengelolaan Persampahan	29.897.681.551,00
59	Program Pendaftaran Penduduk	271.815.975,00
60	Program Pencatatan Sipil	188.710.000,00
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.170.471.251,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	164.916.400,00
63	Program Penataan Desa	316.601.500,00
64	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	147.060.500,00
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.745.707.624,00
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.612.377.140,00
67	Program Pengendalian Penduduk	811.748.596,00
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.798.584.000,00
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.643.944.700,00
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ulj)	12.308.956.152,00
71	Program Pengelolaan Pelayaran	4.438.642.180,00
72	Program Pengelolaan Perkeretaapian	75.000.000,00
73	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.339.084.135,00
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.044.959.127,00
75	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	134.996.686,00
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	664.996.686,00
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.622.196.686,00
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	623.128.554,00
79	Program Pengembangan Umkm	3.411.282.837,00
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.335.551.731,00

**Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025**

81	Program Promosi Penanaman Modal	732.000.000,00
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.887.108.633,00
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	619.150.632,00
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	205.259.154,00
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.310.212.900,00
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	172.422.000.396,00
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000,00
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai	497.232.085,00
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	198.011.400,00
90	Program Pengembangan Kebudayaan	525.000.000,00
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.209.660.000,00
92	Program Pembinaan Sejarah	595.000.000,00
93	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	66.224.000,00
94	Program Pengelolaan Permuseuman	886.065.000,00
95	Program Pembinaan Perpustakaan	2.422.730.039,00
96	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	150.927.268,00
97	Program Pengelolaan Arsip	696.625.621,00
98	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	999.203.024,00
99	Program Perizinan Penggunaan Arsip	577.381.678,00
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.323.561.392,00
101	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.565.910.702,00
102	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	35.000.000,00
103	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.135.481.596,00
104	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.996.149.546,00
105	Program Pemasaran Pariwisata	1.702.396.566,00
106	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.619.978.200,00
107	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.225.000.000,00
108	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.342.006.855,00
109	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	251.706.613.260,00
110	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.491.963.715,00
111	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.056.072.678,00
112	Program Perizinan Usaha Pertanian	577.381.678,00
113	Program Penyuluhan Pertanian	5.702.618.800,00
114	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	3.832.842.217,00
115	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	198.884.690,00
116	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.292.527.180,00
117	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	975.988.680,00
118	Program Pengembangan Ekspor	278.884.690,00
119	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.287.358.794,00

❖ **Anggaran Perubahan 2025**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	1.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal / Non Tambang	Angka	3,80
2.	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	2.	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Angka	15,85
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3.	Nilai SAKIP	Nilai	63,40
		4.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	83
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.	Nilai IKM Daerah	Nilai	85
5.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	6.	Angka Kriminalitas	Angka	10
6.	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	7.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	8.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	72,47
		9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,72
		10.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	185,00
8.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11.	Angka Harapan Sekolah	Angka	13,59
		12.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata	9,09
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Umur Harapan Hidup	Angka	74,30
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	14.	Angka Kemiskinan	Angka	8,38
		15.	Tingkat Pengangguran terbuka	Angka	4,40

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	243.542.857.695,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	1.427.658.176,00
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.602.112.152,00
4	Program Pengendalian Pertiznan Pendidikan	43.632.000,00
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	341.425.412,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	183.140.024.449,00

**Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025**

7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.032.657.453,00
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	25.030.000,00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	563.423.120,00
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sdai)	129.087.706.289,00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	91.928.814.816,00
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	30.471.566.806,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.627.451.896,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	41.620.893.490,00
15	Program Penataan Bangunan Gedung	260.201.612.744,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	579.328.478.497,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.746.087.289,00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.095.643.200,00
19	Program Pengembangan Perumahan	2.479.664.131,00
20	Program Kawasan Permukiman	7.975.576.590,00
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	9.829.163.202,00
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	289.856.224.588,00
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.733.817.946,00
24	Program Penanggulangan Bencana	2.951.659.113,00
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.173.627.788,00
26	Program Pemberdayaan Sosial	337.801.020,00
27	Program Rehabilitasi Sosial	1.599.810.496,00
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	941.749.573,00
29	Program Penanganan Bencana	761.327.071,00
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	291.481.529,00
31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	157.430.150,00
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.168.695.212,00
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.259.540.156,00
34	Program Hubungan Industrial	11.291.822.427,00
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	261.601.246,00
36	Program Perlindungan Perempuan	60.714.362,00
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	183.065.098,00

**Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025**

38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	52.169.250,00
39	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	262.489.967,00
40	Program Perlindungan Khusus Anak	200.000.000,00
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.393.226.414,00
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.495.459.664,00
43	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.438.736.317,00
44	Program Pengawasan Keamanan Pangan	588.250.000,00
45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	377.217.912,00
46	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49.497.782.794,00
47	Program Penetapan Tanah Ulayat	47.100.000,00
48	Program Penatagunaan Tanah	483.497.500,00
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup	783.810.400,00
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.315.426.166,00
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	130.810.368,00
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	236.172.900,00
54	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	16.894.000,00
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	273.712.018,00
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	22.062.000,00
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	108.394.250,00
58	Program Pengelolaan Persampahan	37.200.827.568,00
59	Program Pendaftaran Penduduk	319.891.975,00
60	Program Pencatatan Sipil	238.620.075,00
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.468.977.866,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	164.916.400,00
63	Program Penataan Desa	227.836.482,00
64	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	195.217.683,00
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.095.170.528,00
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.829.853.199,00
67	Program Pengendalian Penduduk	920.838.057,00
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.663.211.970,00

**Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025**

69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.630.297.259,00
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.846.485.123,00
71	Program Pengelolaan Pelayaran	2.042.770.705,00
72	Program Pengelolaan Perkeretaapian	52.500.000,00
73	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5.831.555.667,00
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.668.837.193,00
75	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	251.061.000,00
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.591.543.487,00
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2.149.205.459,00
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	638.148.000,00
79	Program Pengembangan Ukm	5.651.643.652,00
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	985.552.192,00
81	Program Promosi Penanaman Modal	559.162.511,00
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.597.072.035,00
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	485.455.584,00
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	134.492.154,00
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.441.686.510,00
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	210.199.404.188,00
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000,00
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	509.852.221,00
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	225.204.500,00
90	Program Pengembangan Kebudayaan	458.813.221,00
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.489.149.905,00
92	Program Pembinaan Sejarah	3.246.164.041,00
93	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	66.224.000,00
94	Program Pengelolaan Permuseuman	1.102.073.510,00
95	Program Pembinaan Perpustakaan	2.522.759.834,00
96	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	82.226.234,00
97	Program Pengelolaan Arsip	541.088.009,00
98	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	678.908.580,00
99	Program Perzinan Penggunaan Arsip	260.722.647,00
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.065.340.440,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Paser selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Paser menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Pengukuran kinerja sebagai instrumen untuk mengetahui ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator dengan realisasinya, jika indikator tersebut dengan capaian tinggi maka kinerjanya semakin tinggi, jika realisasinya tinggi justru kinerja rendah tapi sebaliknya jika realisasinya rendah justru kinerjanya tinggi maka digunakan pengukuran dengan cara target dikurang realisasi dikurang target dibagi target kali 100, seperti pada gambar berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Selain itu juga disajikan perbandingan dengan target periode akhir RPJMD, capaian provinsi, capaian nasional dan internasional. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser pada Tahun 2025 dinyatakan **Sangat tinggi** karena rata-rata capaiannya sebesar **111,03%**.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Paser tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel: 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja**

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3.	65,01% ≤ 75%	Sedang
4.	50,01% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

3.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran indikator kinerja tujuan Tahun 2025 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Terhadap Target Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi 1	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	3,50	3,77	107,71

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Misi 2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	75	80,91	107,88
Misi 3	Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	0,275	0,273	100,73
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indikator IPM	74,50	75,85	101,81

a. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran indikator kinerja sasaran Tahun 2025 sebagaimana table berikut

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efek Berganda (<i>Multiplier Effect</i>) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	3,80	10,76	283,16

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	15,85	17,07	107,70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	63,40 (B)	61,96 (B)	97,73
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83	80,9956	97,59
Rata-rata capaian					97,66
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	85	89,52	105,32
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	10	17	30
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	7	100
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,47	47,875	66,06
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,72	80,15	100,54
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	185,00	187,98	98,39
Rata-rata capaian					88,33
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,59	13,39	98,53
		Rata-rata Lama Sekolah	9.09	9,04	99,45
Rata-rata capaian					98,99
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,30	74,39	100,12
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,38	8,13	103
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,40	4,62	95
Rata-rata capaian					99,00
Total Rata-rata capaian					111,03

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

1. SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA EFEK BERGANDA (*MULTIPLIER EFFECT* SEKTOR PERTANIAN)

Dalam Upaya transformasi pondasi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Paser, Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi pilihan utama mengingat Meskipun sektor pertambangan mendominasi PDRB Kabupaten Paser, Sektor pertanian memiliki kontribusi signifikan dan merupakan potensi paling besar dan menjanjikan untuk menggantikan sektor tambang yang saat ini masih menjadi andalan kabupaten Paser. Namun mengingat sektor pertambangan merupakan sumber yang tidak diperbaharui maka jika tidak disiapkan penggantinya kedepan, yang jika tidak di antisipasi maka akan mengganggu keberlanjutan dan jalannya pembangunan di Kabupaten Paser.

Pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing merupakan terjemahan dari harapan dan keinginan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan penduduk dari dalam Kabupaten Paser, mengurangi ketergantungan barang dan jasa terutama pangan dari daerah lain. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan yang kompetitif. *Multiplier effect* sektor pertanian adalah dampak ekonomi yang dihasilkan dari peningkatan aktivitas pertanian terhadap sektor sektor ekonomi lainnya. Nilai tambah atau dampak yang akan didapat antara lain akan mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ketercapaian Sasaran :

Sasaran Meningkatnya Efek Berganda (*Multiplier Effect* Sektor Pertanian) diukur dengan indikator **Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang** dengan target pada tahun 2025 yaitu 3,80 dan realisasi 10,76 dengan capaian 283,16,% dengan predikat **Sangat Tinggi** , seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Strategis 1

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian Perkebunan $\frac{\text{Jumlah PDRB}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	3,80	10,76	283,16	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Kab.Paser

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran efek berganda dengan indikator pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang dengan capaian 283,16 %.

Meningkatnya produktifitas komoditas pertanian yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga memberikan dampak peningkatan pendapatan petani, terutama yang berada pada sektor pertanian.

Faktor Penghambat/Kendala:

Efek berganda sektor pertanian di Kabupaten Paser terkendala beberapa hal yakni terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit yang berkonsekuensi terjadinya pengurangan lahan produktif untuk tanaman pangan yang pada gilirannya mengurangi potensi produksi pertanian dan dampak berganda sektor pertanian yang diharapkan.

Masih belum memadainya infrastruktur usaha pertanian antara lainnya jalan usaha tani dan irigasi, yang akan menghambat kemudahan bagi petani dalam input pertanian dan pasar.

Beberapa hal lainnya yaitu akses terhadap pupuk bersubsidi yang juga masih belum optimal, akses permodalan dan teknologi yang juga merupakan hal penting dalam Upaya produktivitas dan efisiensi pertanian.

Demikian juga faktor harga dan pasar. Fluktuasi harga komoditas dan akses pasar yang terbatas dapat mengurangi pendapatan petani. Faktor iklim juga menjadi hal patut diantisipasi karena juga memberikan dampak dalam produksi pertanian, siklus dan hasil pertanian.

Pergeseran sektor tambang ke non tambang dalam upaya mewujudkan efek berganda sektor pertanian di Kabupaten Paser juga menghadapi persoalan seperti kawasan tata ruang khusus industri karena persoalan lahan, lahan

yang ingin dikembangkan (bidang perikanan) terkendala dengan status lahan sebagai kawasan cagar alam.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong *multiplier effect* sektor pertanian dengan tolok ukur pertumbuhan ekonomi sektor non tambang antara lain :

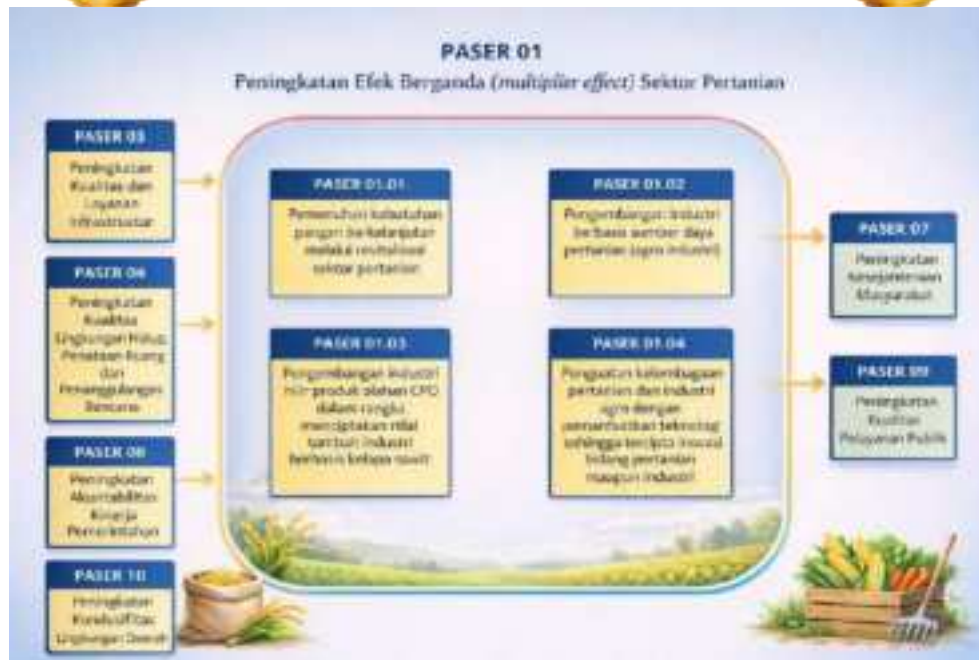
- Kabupaten Paser memiliki potensi pengembangan sektor pertanian mengingat luas lahan yang dimiliki
- Komitmen pemda dalam bentuk dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang memiliki relevansi dengan pengembangan sektor pertanian dalam rangka mendukung terwujudnya *multiplier effect* sektor pertanian
- Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup potensial terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Paser, dengan demikian menunjukkan sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.
- Adanya kebijakan pengembangan kawasan food estate dan kawasan holtikultura, miniranch dan produksi peternakan, reeplanting komoditi kelapa sawit dan pengembangan komoditis lainnya, hilirisasi industri, penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan, pemberdayaan usaha kecil menengah.

Solusi/Langkah-Langkah Perbaikan :

Dalam rangka mengatasi kendala/hambatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non tambang dan mendorong *multiplier effect* sektor Pertanian di Kabupaten Paser antara lain perlunya manajemen tata kelola dalam rangka pengawasan terkait alih fungsi lahan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendistribusian kepada petani, mengingat pupuk merupakan juga penentu untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam rangka produktivitas dan efektifitas pertanian, demikian juga peningkatan dan akses petani terhadap modal teknologi dalam rangka pemberdayaan petani dan efisiensi proses produksi dan hasil yang lebih efektif. Untuk menjaga keberlanjutan produktivitas baik dari sisi kualitas dan kuantitas maka pengembangan sistem informasi pasar dan stabilisasi harga juga merupakan hal penting. Peningkatan edukasi terhadap petani mengenai cara beradaptasi dengan perubahan iklim, juga merupakan faktor penting lainnya yang perlu diintervensi.

Adapun proses bisnis kebijakan dalam mendukung pencapaian *out comes* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dibagi ke dalam 2 proses; utama dan pendukung seperti pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 3.1
Proses Bisnis Sasaran 1
Meningkatnya Efek Berganda (*Multiplier Effect Sektor Pertanian*)



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta Probis Pemkab. Paser

2. SASARAN STRATEGIS 2 BERKEMBANGNYA SEKTOR KEPARIWISATAAN

Tolok ukur pencapaian Sasaran Strategis Berkembangnya Sektor kepariwisataan ditetapkan dengan diukur dengan indikator **Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)**.

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 15,85 % dan realisasinya sebesar 15,76% sehingga memperoleh capaian 99,43% dengan predikat **Sangat Tinggi** Seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Σ Pertumbuhan sektor I perhotelan dan restoran dan rumah makan minum	15,85	17,07	107,70	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Kab.Paser

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu aspek dalam industri pariwisata Kabupaten Paser, dimana Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Pertumbuhan sektor 1 dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel, *homestay*, losmen dan lainnya semisal. Pertumbuhan juga dapat dilihat dengan meningkatnya tingkat hunian. Sedang pertumbuhan restoran dan tempat makan dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah restoran, kafe, warung makan dan tempat lain yang semisal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian daerah. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Paser diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kemampuan masing-masing wilayah untuk dapat membangun pariwisata.

Faktor Penghambat/Kendala :

Beberapa kendala dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser antara lain :

- Legalitas lahan
Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser yang paling krusial adalah terkait legalitas lahan, baik dalam hal kelengkapan surat lahan dan kejelasan kepemilikan
- Pengelolaan destinasi
Pengelolaan yang belum optimal, baik dalam hal kebersihan di lingkungan objek wisata maupun perawatan secara rutin yang belum terkelola dengan baik, disamping itu masih belum memadainya sumber daya terlatih dalam bidang pariwisata.
- Ketersediaan fasilitas pendukung
Masih belum memadainya fasilitas akomodasi seperti hotel, dan restoran

- Peran serta Masyarakat
Masih terdapatnya kesadaran masyarakat yang kurang tentang potensi wisata dan manfaatnya bagi ekonomi lokal.
- Promosi dan Pemasaran
Aspek yang juga tidak kalah penting adalah promosi dan pemasaran destinasi wisata yang ada di Kabupaten Paser. Hal ini masih belum optimal terutama untuk menjangkau wisatawan dari luar daerah.

Faktor Pendorong :

Beberapa faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser dengan tolok ukur pertumbuhan sektor 1 (akomodasi makan minum) antara lain :

- Kabupaten Paser memiliki potensi alam yang menarik, memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, demikian juga dengan keindahan pantai termasuk potensi warisan budaya dan sejarah.
Dalam keindahan alam, Kabupaten Paser memiliki lanskap alam nan indah, hutan tropis yang cukup asri, terdapat perbukitan, sungai dan pantai yang cukup eksotik. Salah satu yang menjadi favorit pengunjung saat ini adalah destinasi gunung boga atau yang dikenal dengan gunung embun.
- Telah disusunnya rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Ripparda) sebagai salah satu dokumen penting, maka pembangunan pariwisata di Kabupaten Paser lebih terukur untuk lima tahun ke depan.
- Adanya antusiasme Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing, mengingat hampir di semua desa yang ada di Kabupaten Paser memiliki objek wisata yang sangat potensial untuk di kembangkan – hal ini dapat dilihat dengan telah dibentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai wujud inisiatif dan antusias warga desa untuk mengembangkan potensi objek wisata di desa mereka.

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

Adapun dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser diperlukan langkah upaya yang terencana, terukur dan berkelanjutan antara lain :

Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan baik dalam hal pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam menjaga

kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah di seputar tempat wisata. Perlunya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata serta pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari progam dan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tentang pengelolaan homestay, pembuatan produk souvenir dan pemahaman tentang pelayanan wisata.

- Promosi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan objek wisata dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Paser. Termasuk kerja sama dengan agen perjalanan
- Perlunya kemitraan melalui kerjasama antara pemuda, pelaku usaha dan masyarakat. Demikian juga kemitraan dengan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan
- lebih intensif mendorong pengembangan wisata berbasis desa, antara lain dengan melalui pendampingan pelatihan SDM desa terkhusus pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Dalam *framework* peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Berkembangnya Sektor Kepariwisataan** seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Proses Bisnis Sasaran 2
Berkembangnya Sektor Kepariwisataan



Sumber : SK Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

3. SASARAN STRATEGIS 3 **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**

Ketercapaian Sasaran

Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** diukur berdasarkan 2 indikator yaitu **Nilai SAKIP** dan **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Sasaran strageis 3 ini merupakan upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan”**.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Indeks pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mengevaluasi kualitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah sedang tujuan utamanya adalah untuk mengukur seberapa efektif, efisien dan transparan pengelolaan keuangan dalam periode tertentu.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas KemenPANRB Tahun 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser memperoleh predikat B dengan nilai 61,96 Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan nilai 80,996. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah sebesar **97,66%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi** Hasil pengukuran kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB	63,4	61,96	97,73	Sangat Tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Thn 2020 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	83	80,996	97,59	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				97,66	Sangat Tinggi

Adapun pembagian tugas masing masing Perangkat Daerah dalam Pencapaian **Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7
Pembagian tugas dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3**

SASSARAN	ASPEK	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda Litbang, Inspektorat, Bagian Organisasi, Sekretariat pada Semua PD
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BKAD, Bappedalitbang, Sekretariat Semua PD

Adapun nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui mekanisme yang diatur pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan ini merupakan pengganti dari PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor Penghambat/Kendala :

Posisi raihan nilai dan predikat SAKIP saat ini, Kabupaten Paser digolongkan ke dalam kelompok daerah dengan capaian Kinerja baik atau “B” dua tahun belakangan ini. Sebagaimana daerah lain, Pemerintah Kabupaten Paser menghadapi beberapa kendala utama antara lain :

a. Digitalisasi SAKIP

dalam pelaksanaan SAKIP walaupun telah berbasi Aplikasi namun demikian masih belum menggambarkan manajemen kinerja seutuhnya dan belum terintegrasi dengan aplikasi terkait misalnya dengan aplikasi tambahan penghasilan.

b. Komunikasi dan koordinasi

Walaupun sudah berjalan, namun demikian koordinasi dan komunikasi masih perlu ditingkatkan lagi, di level lintas perangkat daerah kinerja yang bersifat *crosscutting*, sinergi dan kolaborasinya belum terskema dengan baik.

c. Kualitas dokumen perencanaan jangka menengah terutama di level Perangkat Daerah berdasarkan Assesmen yang dilakukan oleh Kementerian PANRB maupun evaluator internal masih terdapat banyak catatan. Masih terdapat orientasi output pada level sasaran Perangkat Daerah, ada beberapa indikator belum berorientasi “SMART”

d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur pengelola SAKIP

Keterbatasan SDM pengelola SAKIP yang kompetensi dalam pemahaman dan pengetahuan tentang perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Hal lain disebabkan beban kerja dibagian yang menangani perencanaan, lambatnya mendapatkan data kinerja dari bidang-bidang hal ini disebabkan belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja dengan baik. kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional juga memberikan dampak sulitnya melakukan pengisian jabatan yang menangani urusan perencanaan ketika yang bersangkutan mendapatkan promosi, sehingga jabatan yang ditinggalkan hingga sekarang masih kosong, karena pengisiannya harus melalui uji kompetensi, dan pekerjaan terkait penyusunan laporan kinerja dikerjakan Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksana. Kondisi ini memberikan pengaruh kepada kualitas laporan kinerja.

Solusi/ Langkah –langkah perbaikan:

Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Kabupaten antara lain :

- Memperkuat implementasi melalui penguatan manajemen kinerja berbasis aplikasi
- Penguatan pengelolaan sistem pengumpulan data kinerja yang selama ini juga masih menjadi salah satu permasalahan utama dimana suplai data kinerja baik level Kabupaten maupun internal Perangkat Daerah baik dari sisi kecepatan

maupun ketepatan masih perlu untuk dioptimalkan dengan demikian validitas dan keandalan data kinerja bisa lebih ditingkatkan lagi

- Evaluasi kinerja secara berkala dan objektif harus dilakukan untuk menilai pencapaian target dan mengidentifikasi area yang harus dilakukan perbaikan. Dan hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang konkret
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar baik terkait kebijakan level pemda maupun level perangkat daerah perlu terus dibangun terutama kinerja dengan skema kolaboratif dalam pencapaiannya
- Menindaklanjuti hasil asistensi dan assesment baik oleh kementerian PANRB maupun Inspektorat.

b. Indikator indeks pengelolaan keuangan daerah

IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan, sedangkan pengukurannya menggunakan data dari Bappedalitbang terkait dokumen RPJMD dan RKPD, Badan Pengelola Keuangan terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. IPKD ini diukur melalui 6 dimensi yaitu :

Dimensi Pertama, untuk mengukur kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Bobot dimensi 1 adalah sebesar 15% ;

Dimensi kedua, adalah mengukur kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD. Bobot skor pada dimensi 2 ini adalah 20%;

Dimensi ketiga, adalah transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dari tingkat ketepatan waktu dalam mempublikasikan dan keteraksesan informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah. Bobot dimensi 3 adalah sebesar 15%;

Dimensi keempat, adalah penyerapan anggaran yang diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Bobot dimensi ini adalah 20%;

Dimensi kelima, adalah kondisi keuangan daerah, dengan bobot 15%; dan

Dimensi keenam, adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan, dengan bobot 15%.

Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.527/2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2025. Kabupaten Paser dengan Indeks 80,996 dengan nilai A Kategori Baik.

Faktor Penghambat/kendala :

Dalam upaya mempertahankan maupun meningkatkan kinerja capaian indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) Kinerja pengelolaan keuangan daerah masih dihadapkan antara lain

- Kapasitas SDM yang kompeten yang sudah tersedia cukup memadai tetap dipertahankan, dimana ketika terjadi rotasi, maka diyakini sudah ada pengganti yang diyakini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah tenaga yang kompeten masih perlu ditambah lagi personilnya.
- Dalam upaya peningkatan IPKD, aspek koordinasi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan. Pengumpulan data IPKD memerlukan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah, karena koordinasi yang kurang baik akan berpengaruh pada pengumpulan data IPKD

Masih adanya gangguan jaringan, walaupun kecil pada saat penginputan, juga merupakan satu kendala dalam proses bisnis pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Pendorong :

- Komitmen pemerintah daerah yang cukup tinggi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan meraih Opini BPK dengan predikat WTP secara berturut turut. Siklus tahapan perencanaan penganggaran yang semakin semakin baik yang relatif tepat waktu, semakin selarasnya antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

- Pemanfaatan tim ahli, yakni pemerintah daerah menggunakan dan memanfaatkan tenaga ahli profesional untuk mendukung dan memperkuat penerapan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Solusi/Langkah-langkah perbaikan :

Untuk mengatasi kendala dalam upaya mempertahankan kinerja IPKD perlu diambil langkah langkah antara lain :

- Memperkuat sistem pengumpulan dan pengelolaan data
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah
- Meningkatkan kapasitas SDM yang membidangi melalui bimtek dan sejenisnya
- Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan daerah
- Meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran
- Perlu mempertimbangan penguatan dari aspek regulasi

4. SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketercapaian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pelaksanaan IKM pada Tahun 2025 dari target nilai 85 dan realisasi sebesar 89,52 didapat capaian kinerja sebesar 105,32% dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Nilai IKM Daerah	Σ Nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survei IKM	85	89,52	105,32	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat tetap prima. Dalam hal ini instansi pemerintah akan di nilai seberapa baik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara umum karena sudah merupakan suatu

kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari survei kepuasan masyarakat Kabupaten Paser pada locus dilaksanakan pada 15 (lima belas) unit kerja seperti pada tabel dibawah ini.

Faktor penghambat/Kendala :

faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja

- a. Belum semua perangkat daerah mampu mengidentifikasi produk layanan sehingga Survei kepuasan masyarakat belum dilaksanakan menyeluruh ke seluruh Perangkat Daerah.
- b. Pemahaman pentingnya SKM sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik yang diberikan belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat daerah
- c. Penilaian/pengisian survei oleh beberapa pengguna layanan bersifat bias, belum menggambarkan kualitas layanan yang sesungguhnya karena masih didasarkan ketidakenakan, keengganan serta literasi yang rendah terhadap pemaham instrumen survei kepuasan.

Faktor pendorong :

Adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan saran kinerja ini diantaranya adalah :

- a. Adanya peluang kerjasama dengan lembaga pemerintah yang membidangi kajian pengembangan pelayanan publik serta perguruan tinggi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang lebih berkualitas dan akuntabel;
- b. Adanya penilaian evaluasi baik oleh Kementerian RB melalui PEKPP dan penilaian kepatuhan pelayanan Publik oleh Ombudsman sangat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah;
- c. Nilai SKM salah satu instrumen untuk menilai kinerja Kepala perangkat daerah;
- d. Dengan trend nilai SKM semakin membaik, sebagai gambaran Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan layanan publik yang diberikan semakin baik;

- e. Indikator IKM merupakan standar nasional sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan, hal ini sebagaimana tertuang didalam ketentuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pengoptimalisasi pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang akan datang antara lain :

1. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan Masyarakat, apa yang menjadi catatan dan kekurangan berdasarkan unsur/komponen SKM.
2. Melakukan peningkatan kapasitas/kompetensi petugas yang membidangi pelayanan publik di tingkat perangkat daerah dengan Melaksanakan bimbingan teknis Survei Kepuasan Masyarakat, standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur;
3. Mendorong pelaksanaan SKM berbasis digital;
4. Mengidentifikasi dan menstandarkan produk produk layanan diseluruh perangkat daerah untuk mendorong pelaksanaan survei kepuasan di seluruh perangkat daerah;
5. Mendorong kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan SKM.

5. SASARAN STRATEGIS 5 MENINGKATNYA LINGKUNGAN DAERAH YANG KONDISIF

Ketercapaian Sasaran

Sasaran **Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif** diukur dengan indikator **Angka Kriminalitas**. Pengertian kriminalitas secara umum juga sebagai tindakan dimana dalam perbuatannya yaitu melanggar hukum dan aturan serta norma norma sosial di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga dampak kriminalitas sendiri bisa jadi berupa penentangan dari masyarakat.

Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin rendah angka kriminalitas menunjukan bahwa kehidupan pada Masyarakat di suatu daerah semakin aman, suatu pola mengenai tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat (atau bisdisebut korban) berupa reaksi formal, informal, dan nonformal.

Indikator angka kriminalitas bersifat progresif negatif, yaitu semakin rendah capaian/realisasinya maka kinerjanya semakin baik, sebaliknya semakin tinggi capaian/realisasinya maka kinerjanya semakin tidak baik. Berikut capaian/angka kriminalitas tahun 2025.

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Angka Kriminalitas	Σ Angka Kriminalitas dalam satu tahun /Jumlah Penduduk x 100.000	10	17	30	Sangat Rendah

Sumber : BPS Kab. Paser

Berdasarkan capaian/realisasi angka kriminalitas yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan maka capaian kinerja sasaran meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerjanya menurun. Berdasarkan jenis kriminalitas yang terjadi, penyumbang tertinggi angka kriminalitas adalah Pencurian penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Faktor penghambat/kendala :

Beberapa kendala yang dihadapi Kabupaten Paser dalam upaya menangani angka kriminalitas antara lain :

a. Keterbatasan sumber daya

Dengan luas wilayah, topografi dan geografi yang sulit serta terbatas personal di Perangkat Daerah terkait yang membidangi sementara dari sisi pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser tidak seimbang dengan personal yang dibutuhkan. Hal lainnya juga, yaitu pemenuhan sarana prasana seperti kendaraan patrol, peralatan komunikasi dan sistem informasi dirasakan masih belum memadai untuk menangani permasalahan yang ada dengan kondisi wilayah yang luas, jumlah penduduk tidak sesuai dengan rasio petugas.

b. Koordinasi antar perangkat daerah

Masih belum optimalnya koordinasi sehingga kecenderungan terjadinya tumpang tindih program sehingga berdampak kurang efektifitasnya penanganan angka kriminalitas.

c. Faktor sosial budaya

Faktor budaya juga ikut memberikan kontribusi terhadap angka kriminalitas di Kabupaten Paser. Partisipasi aktif, kepedulian terhadap situasi lingkungan yang kondusif masih perlu ditingkatkan lagi pada Masyarakat.

Faktor Pendorong:

Beberapa faktor pendorong penanganan angka kriminalitas di Kabupaten Paser antara lain :

- a. Komitmen Pemerintah Kabupaten Paser terhadap penanganan angka kriminalitas, baik melalui kebijakan dan penganggaran
- b. Sinergi Pemerintah Kabupaten Paser melalui perangkat daerah dengan instansi vertikal terkait terjalin cukup baik
- c. Walaupun masih belum optimal namun demikian telah terbangun peran serta masyarakat dalam penanganan angka kriminalitas di Kabupaten Paser
- d. Program pencegahan kriminalitas

Upaya upaya pencegahan kriminalitas telah diupayakan baik melalui sosialisas bahaya kriminalitas, pembinaan generasi muda, program pemberdayaan masyarakat dan pengawasan serta pengamanan lingkungan

- e. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama, ormas dan kelompok pemuda.

Solusi/langkah-langkah perbaikan:

Upaya penanganan angka kriminalitas di Kabupaten Paser dilaksanakan antara lain :

- a. Kebijakan pencegahan kriminalitas

Melalui kampanye anti narkoba, penyuluhan bahaya kriminalitas dan pentingnya keamanan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat peduli keamanan, termasuk program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, sebagai salah satu akar potensi terjadinya kriminalitas.

- b. Pengawasan lingkungan melalui pemasangan CCTV titik rawan, dan melaksanakan patroli secara rutin di daerah daerah rawan kriminalitas
- c. Peningkatan koordinasi dan kerja sama

Perlunya terus dibangun sinergi baik pemda, instansi vertikal di daerah maupun dengan lembaga masyarakat. Membangun kemitraan dengan masyarakat, mendorong peran aktif masyarakat agar lebih peduli dan peka terhadap upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga terjadinya angka kriminalitas dapat diantisipasi dan dieliminasi

perlu semakin kuatnya kontrol/pengawasan orang tua kepada anak-anaknya ditengah derasnya arus informasi/komunikasi sebagai dampak perkembangan digitalisasi/teknologi informasi yang membuat generasi muda/anak rentan terpengaruh akses negatif yang cenderung mendorong kepada tindak perbuatan kriminal.

6. SASARAN STRATEGIS 6 **MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR**

Ketercapaian Sasaran

Peningkatan kualitas layanan infrastruktur merupakan salah satu sasaran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur yang berkualitas tinggi mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat arus distribusi barang serta jasa. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian sasaran tersebut berdasarkan enam unsur utama dalam dimensi iklim infrastruktur, yaitu ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, efektivitas, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi pada perekonomian.

Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Layanan Infrastruktur diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Capaian IKLI Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan capaian 100 % (Sangat tinggi) seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan	7	7	100	Sangat tinggi

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
(IKLI)	6 unsur yaitu : 1. Ketersediaan Fisik 2. Kualitas Fisik 3. Kesesuaian 4. Efektifitas 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Kontribusi pada perekonomian				

Sumber Data : Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Bappedalitbang

Penentuan Nilai IKLI, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Pengukuran IKLI menggunakan Skala Likert, selanjutnya skor dari skala likert tersebut dihitung sebagai Nilai Indeks 1-10 dikonversi menjadi rentang nilai 10 – 100 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Nilai Konversi IKLI

Nilai Indeks /Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 4,00	10,0 – 40,0	D	Tidak Baik (Tidak Puas)
2				
3				
4				
5	4,01 – 6,00	40,1 – 60,0	C	Kurang Baik (Kurang Puas)
6				
7	6,01 – 8,00	60,1 – 80,0	B	Baik (Puas)
8				
9	8,01 – 10,00	80,1 – 100,0	A	Sangat Baik (Sangat Puas)
10				

Metode Pengukuran /Perhitungan IKLI

Metode penghitungan IKLI di Kab. Paser menggunakan rumus berikut :

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

$$= \sum_{j=1}^{n=10} \left[\frac{U_{1i} + U_{2i} + U_{3i} + U_{4i} + U_{5i} + U_{6i}}{6} \right] \cdot 100$$

Keterangan :

U = Skor dari 6 dimensi pembentuk indeks dari indeks kepuasan layanan infrastruktur

[i] = Sektor infrastruktur yang di evaluasi di setiap kecamatan.

Berdasarkan data dari proses survei dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan IKLI Kabupaten Paser tahun 2025 secara total gabungan dari seluruh dimensi adalah **66,35 dengan indeks 7**, Nilai IKLI Kabupaten Paser tahun 2025 berada pada rentang nilai 60,1 – 80,0, tergolong dalam mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik (puas).

Populasi dan Teknik Sampling

Populasi penelitian ini adalah penduduk Kabupaten Paser yang wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) semester 2 Tahun 2024 sebanyak 213.879 orang yang berdomisili pada 10 kecamatan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, 2025). Kegiatan survei secara umum merupakan kegiatan yang pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan yang terkait dengan sumberdaya manusia, waktu, finansial, dan lain sebagainya. Oleh karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka tidak mungkin menjadikan seluruh warga masyarakat Kabupaten Paser sebagai responden, tetapi hanya mengambil beberapa sampel dari total warga masyarakat Kabupaten Paser yang secara ilmiah layak dianggap sebagai representasi dari total populasi. Jumlah sampel secara keseluruhan (Kabupaten Paser) dihitung berdasarkan jumlah penduduk tersebut menggunakan rumus **Slovin** sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

n = sampel
N = populasi
A = alpa/ margin of error

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus tersebut didasarkan pada $N = 213.879$ orang dan margin of error 5% atau 0,05, didapatkan jumlah sampel untuk seluruh Kabupaten Paser dalam penelitian ini sebanyak 399,25 sampel dibulatkan menjadi 400 sampel. Adapun metodologi sampling dalam survei ini sebagai berikut:

1. Jumlah sampel di masing-masing kecamatan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan, yang kemudian dibulatkan.
2. Basis area sampel penelitian adalah Rukun Tetangga (RT)
3. Jumlah RT sampel di masing-masing kecamatan didasarkan pada jumlah responden di kecamatan bersangkutan (setelah dibulatkan), dibagi 10.
4. Penentuan RT sebagai perwakilan di masing-masing Kecamatan dilakukan secara acak.
5. Jumlah responden di masing-masing RT sebanyak 10 orang
6. Penentuan responden/penduduk sebagai perwakilan pada masing-masing RT menggunakan *purposive sampling method* (metode pemilihan responden secara sengaja) dan *Accidental Sampling* (pengambilan responden sebagai sampel berdasarkan kriteria target sampel yang kebetulan ditemui saat survei).
7. Responden dalam penelitian ini meliputi:
 1. Aparatur pemerintah,
 2. Tokoh masyarakat/Tokoh adat,
 3. Pelaku usaha,
 4. Karyawan/buruh,
 5. Petani, peternak dan nelayan,
 6. Lain-lain.
8. Responden yang terpilih dan akan diwawancarai harus memenuhi kriteria:
 1. Penduduk Kabupaten Paser,
 2. Berusia 17 tahun ke atas dan,
 3. Bersedia diwawancarai.

Jumlah responden dan RT sampel di masing-masing Kecamatan dapat dilihat dengan Populasi, Jumlah Sampel dan Jumlah RT di Masing-masing Kecamatan, sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel (Pembulatan)	Jumlah RT Sampel
1	Batu Engau	15209	27	30	3
2	Batu Sopang	20628	36	40	4
3	Kuaro	22116	43	40	4

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel (Pembulatan)	Jumlah RT Sampel
4	Long Ikis	31109	60	60	6
5	Long Kali	20098	39	40	4
6	Muara Komam	10043	19	20	2
7	Muara Samu	5488	10	10	1
8	Pasir Balengkong	21872	42	40	4
9	Tanah Grogot	59605	111	110	11
10	Tanjung Harapan	7711	14	10	1
Jumlah		213.879	401	400	40

Adapun Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Paser diukur melalui survei berdasarkan usia, pendidikan, agama, suku dan gender.

Adapun rekapitulasi hasil IKLI Kab. Paser Tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Dimensi Pengukuran IKLI

Dimensi pengukuran **Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Paser** dapat dijabarkan berdasarkan pendekatan **teori sistem dari Gibson, Donely, dan Ivancevich (1997)**. Berikut adalah **enam dimensi utama** yang digunakan dalam pengukuran IKLI:

1) Ketersediaan Fisik (*availability*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap ada/tersedianya bangunan infrastruktur, yaitu dalam setiap aktivitas belanja Negara/Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya indikator dasarnya akan menghasilkan output yang berupa barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik.

Mengukur sejauh mana infrastruktur tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- **Panjang dan luas infrastruktur** → (Total panjang jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dll.)
- **Jumlah fasilitas yang tersedia** → (Jumlah rumah sakit, sekolah, terminal, dan fasilitas publik lainnya)

- **Jangkauan layanan infrastruktur** → (Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap infrastruktur dasar).

2) Kualitas Fisik (*quality*)

Mengukur kondisi fisik infrastruktur berdasarkan standar teknis dan fungsional.

- **Kondisi jalan dan jembatan** → (Persentase jalan dalam kondisi baik menurut survei)
- **Kecepatan dan stabilitas layanan teknologi** → (Rata-rata kecepatan internet dan frekuensi gangguan)
- **Kualitas air bersih dan sanitasi** → (Standar kualitas air berdasarkan uji laboratorium)
- **Daya tahan infrastruktur terhadap bencana** → (Evaluasi ketahanan terhadap banjir, gempa, dll.)

3) Kesesuaian (*appropriateness*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian bangunan fisik infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat sendiri, yaitu kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat.

Mengukur apakah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

- **Kesesuaian tata ruang** → (Persentase infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW)
- **Kesesuaian dengan kebutuhan penduduk** → (Survei kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur)
- **Tingkat penggunaan fasilitas** → (Tingkat okupansi atau pemanfaatan fasilitas publik)

4) Efektivitas pemanfaatan (*utility*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan fisik infrastruktur dengan keseharian kehidupan masyarakat, yaitu tingkat

pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.

Mengukur sejauh mana infrastruktur dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

- **Pengurangan waktu tempuh transportasi** → (Perbandingan waktu perjalanan sebelum dan sesudah pembangunan jalan)
- **Efisiensi konsumsi energi dan sumber daya** → (Perbandingan konsumsi listrik/air sebelum dan sesudah proyek)
- **Peningkatan akses layanan publik** → (Peningkatan jumlah pengguna layanan Kesehatan, Pendidikan, dll.)
- **Dampak lingkungan akibat pembangunan infrastruktur** → (Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - AMDAL).

5) Penyerapan tenaga kerja (*job creation*)

Merupakan kepuasan masyarakat atas dampak pembangunan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur.

Mengukur kontribusi infrastruktur terhadap penciptaan lapangan kerja.

- **Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam proyek infrastruktur** → (Total pekerja dalam konstruksi dan operasional infrastruktur)
- **Peningkatan jumlah usaha terkait infrastruktur** → (Jumlah UMKM baru yang muncul akibat pembangunan infrastruktur)
- **Dampak pembangunan terhadap sektor informal** → (Jumlah pekerjaan informal yang tumbuh akibat infrastruktur baru)

6) Kontribusi pada perekonomian

Merupakan kepuasan masyarakat atas dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat, yaitu tingkat kepuasan masyarakat didasarkan pada aspek kontribusi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah/daerah.

Keenam dimensi tersebut digunakan untuk mengetahui kepuasan layanan infrastruktur pada 5 (lima) kelompok layanan infrastruktur yang dievaluasi.

Faktor Pendorong :

- Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar 66,35, tergolong dalam kategori Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan tergolong kategori Baik (Memuaskan), dengan pembentuk nilai IKLI yang dominan adalah dimensi ketersediaan fisik, efektifitas pemanfaatan dan kontribusi terhadap perekonomian, sedang yang paling sedikit perannya dalam membentuk IKLI Kabupaten Paser adalah dimensi penyerapan tenaga kerja.
- Tiga layanan infrastruktur dengan nilai indeks tertinggi secara berurutan terdiri dari:
 - a. Listrik dengan nilai indeks 86,00 tergolong kinerja unit pelayanan kategori Sangat Baik (Sangat Memuaskan)
 - b. Telekomunikasi dengan nilai indeks 82,73 tergolong kinerja unit pelayanan kategori Sangat Baik (Sangat Memuaskan)
 - c. Jalan Desa dengan nilai indeks 81,03 tergolong kinerja unit pelayanan kategori Sangat Baik (Sangat Memuaskan).
- Persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Paser tahun 2025 diwakilkan dengan nilai IKLI rata-rata pada setiap jenis infrastruktur, dengan nilai sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur pekerjaan umum dengan nilai rata-rata sebesar 75,77 dengan kategori baik (puas).
 - b. Infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman dengan nilai rata-rata sebesar 66,08 dengan kategori baik (puas).
 - c. Infrastruktur pengairan dengan nilai rata-rata sebesar 58,07 dengan kategori kurang baik (kurang puas).
 - d. Infrastruktur transportasi dengan nilai rata-rata sebesar 57,23 dengan kategori kurang baik (kurang puas).
 - e. Infrastruktur telekomunikasi dengan nilai rata-rata sebesar 82,73 dengan kategori sangat baik (sangat puas).

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

- Berdasarkan nilai rata-rata IKLI secara keseluruhan tergolong baik atau memuaskan, Pemerintah Kabupaten Paser tetap perlu melakukan peningkatan secara optimal dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya finansial, sumberdaya kapital, sumber daya alam, sumberdaya teknologi dan kewirausahaan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dengan menghitung kesesuaian berdasarkan proporsi jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga warga masyarakat Kabupaten Paser bisa menikmati layanan infrastruktur secara merata dengan tingkat kepuasan yang maksimal dan berkelanjutan.
- Berdasarkan nilai kontribusi dimensi yang paling rendah yaitu penyerapan tenaga kerja yang masih minim, sehingga dibutuhkan perencanaan penggunaan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya manusia yang dapat digunakan secara optimal. Hal tersebut didukung dengan memberikan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian, sehingga tenaga kerja lokal menjadi lebih kompeten untuk mendukung pembangunan dan perwujudan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan.
- Untuk mewujudkan layanan infrastruktur yang unggul dan berkelanjutan di Kabupaten Paser, perlu dilakukan transformasi menyeluruh melalui pendekatan sistemik dan integratif. Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur berdasarkan kebutuhan saat ini, tetapi juga merancang ekosistem infrastruktur masa depan yang adaptif terhadap perubahan demografi, urbanisasi, dan tantangan lingkungan. Pengembangan ini harus berbasis data spasial dan analisis proyeksi kependudukan, dengan prinsip pemerataan akses yang inklusif dan berkeadilan.
- Optimalisasi seluruh sumber daya, baik manusia, finansial, teknologi, dan alam, perlu diarahkan untuk mendorong inovasi layanan publik, melalui kolaborasi antar sektor (*publik-private-people partnership*), serta pemanfaatan teknologi cerdas (*smart infrastructure*) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Ini akan membawa Kabupaten Paser

menuju pemerintahan berbasis pelayanan berkelanjutan dan masyarakat berdaya infrastruktur.

Berdasarkan analisis ini, peningkatan kualitas layanan infrastruktur telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Rekomendasi utama meliputi optimalisasi anggaran, peningkatan keterlibatan stakeholder, dan kolaborasi antara Perangkat Daerah terkait, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan infrastruktur.

Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur** seperti pada gambar berikut:



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta Probis Kab. Paser

7. SASARAN STRATEGIS 7 **MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENATAAN RUANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana diukur dengan **3 Indikator yaitu Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana.**

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Strategis 7

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	72,47	47,875	66,06	Sedang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(30% x IKU) + (30% x IKA) +(40% x IKTL) Dimana : IKU= Indeks Kualitas Udara IKA=Indkes Kualitas Air IKTL= Indeks Kaulitas Tutupan Lahan	79,72	80,15	100,54	Sangat Tinggi
Indeks Resiko Bencana	IRB = R= H x V E /C R= Resiko, Pengertian resiko adalah peluang untuk rugi. Resiko adalah kemungkinan kehilangan. Resiko adaalah ketidakpastian. Resiko adalah kejadian yang dapat merugikan. V= Vulnerability H= Hazar E = Elemen berisiko C= Capasity	185	187,98	98,39	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				88,33	Tinggi

Berdasarkan pengukuran capaian realisasi indakator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indeks penyelenggaraan penataan ruang Tahun 2025 dengan realisasinya 47,875 dari target kinerja yang ditetapkan 72,47 maka dengan demikian capaian kinerjanya adalah 66,06% dengan predikat **sedang**.

Faktor Pendorong :

- Kebutuhan untuk melindungi kawasan lindung, daerah resapan air, dan menjaga keseimbangan ekosistem dari dampak pembangunan fisik.
- Perlunya penetapan lokasi strategis untuk mempermudah investasi yang terarah, efisien, dan mengurangi konflik pemanfaatan lahan.
- Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lengkap, sistem informasi tata ruang yang memadai, dan peta digital yang akurat.
- Keterlibatan aktif masyarakat (partisipasi publik) dan komitmen aparatur pemerintah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
- Penataan ruang untuk menciptakan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan dan perlindungan warisan budaya.

Faktor Penghambat :

Dalam mencapai kinerja yang ditetapkan, kendala yang dihadapi dan menjadi faktor penghambat penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- Kurangnya ketegasan hukum terhadap pelanggar tata ruang, sehingga melonggarkan kepatuhan
- Keterbatasan data riil di lapangan, ketidaksinkronan peta dasar, dan perencanaan jangka pendek yang tidak terintegrasi
- urangnya partisipasi aktif masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan
- Kelemahan dalam koordinasi antarinstansi dan keterbatasan SDM

Solusi/langkah-langkah perbaikan:

Sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai peningkatan Indeks Penataan Ruang, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Kebijakan

- Memastikan materi teknis revisi rencana tata ruang (RTRW/RDTR) mencakup aspek mitigasi bencana secara mendalam
- Mengatasi tumpang tindih kepentingan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri

- Mempercepat ketersediaan dan legalitas produk hukum rencana rinci tata ruang (RDTR) di kabupaten Paser

2. Pengoptimalan Pemanfaatan Ruang

- Mewajibkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang
- Menggunakan AMDAL sebagai tindakan preventif untuk mencegah permasalahan lingkungan.

3. Penguatan Pengendalian dan Pengawasan

- Meningkatkan pengawasan kinerja penataan ruang dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran
- Melakukan evaluasi yang terukur dan objektif untuk mengidentifikasi permasalahan secara cepat

4. Partisipasi dan Pembinaan

- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang (partisipasi aktif)
- Meningkatkan sosialisasi perda RTRW, serta memberikan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan bagi aparatur.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Paser tahun 2025 adalah 80,15 dari target yang ditetapkan sebesar 79,72 dengan capaian kinerja sebesar 100,54%, dengan predikat **Sangat Tinggi**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kerangka DPSIR *driving force* (faktor pendorong), *pressure* (tekanan), *state* (keadaan), *impact* (dampaknya) dan *response, variabel state* sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang penting adalah respon atau aksi dari pemerintah daerah yang

menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Dari hasil capaian IKLH 2025 Daerah Kabupaten Paser sebesar 80,15 berada pada kondisi status Sangat Baik yaitu di skala nilai lebih dari 80. Adapun nilai capaian tersebut memenuhi target IKLH yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan target sebesar 79,72. Sehingga upaya pengelolaan lingkungan di daerah yang telah dilaksanakan diharapkan mampu untuk mempertahankan peningkatan kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Paser.

Dari hasil perhitungan IKLH tahun 2025 terdapat kenaikan nilai IKLH Kabupaten Paser yaitu dengan nilai capaian total 80,15 dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai capaian indeks 72,38. Adapun nilai IKLH terdiri dari 3 komponen yaitu Air, Udara dan tutupan lahan/hutan.

Faktor Pendorong :

Faktor pendorong pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Adanya perbedaan rumus yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air tahun 2024 (menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021) dengan tahun 2025 (menggunakan Peraturan Lingkungan Hidup/BPLH RI No. 14 tahun 2025). Tahun 2024 Indeks Kualitas Air dihitung dengan membandingkan hasil uji laboratorium dengan baku mutu kelas air, sedangkan tahun 2025 dihitung dengan membandingkan hasil uji laboratorium dengan bobot parameter Indeks Kualitas Air.
2. Adanya perbedaan rumus perhitungan Indeks Kualitas Lahan tahun 2024 (menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021) dengan tahun 2025 (menggunakan Peraturan Lingkungan Hidup/BPLH RI No. 14 tahun 2025)
3. Adanya program Paser Berbuah yang menambah luasan tutupan lahan
4. Adanya kegiatan penanaman pohon di Desa Proklim sehingga dapat berfungsi sebagai filter air tanah dan air sungai

Faktor Penghambat/Kendala :

Faktor penyebab terjadinya penurunan nilai kualitas udara (IKU) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas udara. Indeks ini didasarkan pada 3 (tiga) parameter yang mencakup NO₂ yang mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, SO₂ yang mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya serta PM_{2.5} yang mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan, dan konstruksi.

Terjadinya penurunan indeks kualitas udara di Kabupaten Paser dapat dipengaruhi beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Meningkatnya penggunaan kendaraan yang tidak lulus uji emisi kendaraan
2. Adanya kegiatan pembakaran limbah padat domestik dan industri.
3. Berkurangnya luasan tutupan lahan.

Solusi/langkah-langkah perbaikan:

1. Penyusunan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Pemahaman bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan dan aksi nyata mengenai kualitas lingkungan hidup

c. Indeks Resiko Bencana

Indikator Indeks Resiko Bencana menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang yang adaptif, dan pengelolaan risiko bencana yang komprehensif. Penurunan nilai IRB mencerminkan keberhasilan dalam mitigasi risiko bencana dan perlindungan terhadap dampak bencana bagi masyarakat dan lingkungan, karena merupakan indikator kinerja negatif. Realisasi indeks resiko bencana Kabupaten Paser tahun 2025 adalah 187,98 dari target yang ditetapkan sebesar 185 dengan capaian kinerja sebesar 98,39%, dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor Pendorong :

Pencapaian ini disebabkan karena terdapat beberapa data yang menjadi analisis penurunan IRB terpenuhi. Faktor Pendorongnya antara lain:

- ❖ Tersedianya dukungan, komitmen dan kebijakan Kepala Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan/Rencana Strategis/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pengurangan risiko bencana serta upaya pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana.

- ❖ Tersedianya Data dan Informasi seperti Kajian Risiko Bencana yang membantu memetakan kawasan rawan bencana sehingga mempermudah dalam merencanakan mitigasi bencana.
- ❖ Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pelatihan atau mitigasi bencana kepada Tim Reaksi Cepat & Masyarakat meskipun masih bertahap mengingat efisiensi anggaran.
- ❖ Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk urusan bencana yang dioptimalkan dengan prinsip efisiensi.
- ❖ Dukungan dan pendampingan dari BNPB Pusat maupun provinsi dalam mengumpulkan data indeks ketahanan daerah, serta stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Faktor Penghambat :

Dalam mencapai kinerja yang ditetapkan, kendala yang dihadapi antara lain:

- ❖ Kelembagaan BPBD yang masih dipimpin oleh pejabat eselon III (administrator) sehingga mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan, memimpin koordinasi dan komando lintas/multi sektor, sekaligus pelaksana teknis operasional penanggulangan bencana.
- ❖ Beberapa regulasi yang menjadi tolak ukur dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih belum terpenuhi.
- ❖ Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dalam merumuskan kebijakan terkait penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana maupun SDM teknis yang diperlukan dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, dan pasca bencana).
- ❖ Sinergi antara pengurangan risiko bencana dengan implementasi kebijakan Pembangunan masih belum maksimal.
- ❖ Terjadi pergeseran atau pemangkasan anggaran operasional di tingkat SKPD/perangkat daerah, serta masalah akuntabilitas kinerja yang belum terakomodir sepenuhnya.

Solusi/langkah-langkah perbaikan:

Sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai target penurunan IRB setiap tahun, dilakukan langkah-langkah berikut:

- ❖ Menyelaraskan regulasi dan merencanakan dengan baik dokumen-dokumen Pembangunan Daerah menggunakan hasil proyeksi IRB 2025 sebagai baseline atau indikator utama.
- ❖ Menaikkan tipe lembaga BPBD sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan, memimpin koordinasi dan komando lintas/multi sektor, sekaligus pelaksana teknis operasional penanggulangan bencana.
- ❖ Menyusun regulasi atau dasar hukum yang belum ada sebagai upaya peningkatan kebijakan tentang penanggulangan bencana.
- ❖ Penguatan mitigasi fisik seperti pembangunan infrastruktur aman bencana, perbaikan drainase, dan penghijauan serta mitigasi non fisik seperti penguatan regulasi kebencanaan, penyediaan sistem peringatan dini, dan penyiapan sarana prasarana penanggulangan bencana.
- ❖ Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara berkala untuk memantau tren penurunan IRB sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan daerah.
- ❖ Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
- ❖ Mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek besar
- ❖ Meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, seperti ilegal logging dan pencemaran air

Dalam *framework* peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana** seperti pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.4
Proses Bisnis Sasaran 7



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022

8. SASARAN STRATEGIS 8 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan tahun 2025 diukur dengan indikator **Angka Harapan Lama Sekolah** dan **Rata-rata Lama Sekolah** dengan rata-rata capaian kedua indikator tersebut sebesar 98,99 % dengan predikat **Sangat tinggi**, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS^t_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E^t_i}{P^t_i}$ Dimana :	13,59	13,39	98,53	Sangat tinggi
Rata-rata lama sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	9,09	9,04	99,45	Sangat tinggi
Rata-rata capaian				98,99	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Paser

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” Kabupaten Paser tahun 2025 sebesar 13,59 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Paser adalah sebesar 13,39 tahun atau capaian kinerja sebesar 98,53 % (kinerja sangat tinggi).

Faktor Pendorong:

Ada beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) antara lain adalah:

- Tingkat pendapatan orang tua yang memadai memungkinkan pemenuhan kebutuhan pendidikan (seragam, transportasi, buku) dan mengurangi risiko anak putus sekolah untuk bekerja
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah di berbagai daerah meningkatkan jangkauan pendidikan.
- Jumlah sekolah yang memadai, terutama di daerah terpencil (pendidikan non-formal/kesetaraan), mempermudah anak melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi
- Kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan investasi masa depan meningkatkan keinginan anak untuk sekolah lebih lama.
- Tenaga pendidik yang berkualitas serta kurikulum yang relevan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan minat siswa untuk menetap di bangku sekolah

Faktor Penghambat:

Dalam mencapai kinerja Angka Harapan Lama Sekolah yang ditetapkan, kendala yang dihadapi antara lain:

- Rendahnya pendapatan orang tua memaksa anak untuk bekerja atau putus sekolah, serta ketidakmampuan membiayai kebutuhan sekolah seperti seragam dan buku.

- Masih rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, pernikahan dini, serta budaya yang tidak memprioritaskan pendidikan bagi perempuan.
- Kurikulum yang tidak relevan, rendahnya mutu tenaga pengajar, serta angka tidak naik kelas.

Solusi/Langkah-Langkah Perbaikan:

Sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai target kinerja Angka Harapan Lama Sekolah setiap tahun, dilakukan langkah-langkah berikut:

- Membangun fasilitas sekolah yang memadai, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar Kabupaten Paser untuk mengurangi kesenjangan
- Optimalisasi teknologi, mengimplementasikan e-learning dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pendidikan.
- Menyediakan beasiswa pendidikan secara merata
- Mengedukasi masyarakat dan orang tua akan pentingnya melanjutkan sekolah, khususnya di daerah dengan HLS rendah
- Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik/pengajar.
- Melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program peningkatan pendidikan

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Target kinerja rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2025 sebesar 9,09 dengan realisasi 9,04 dengan capaian 99,45 % (kategori kinerja sangat tinggi).

Faktor Pendorong:

- **Kompetensi Guru** → Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa.
- **Motivasi Siswa** → Dukungan program beasiswa dan fasilitas pendidikan agar anak tetap bersekolah lebih lama (meningkatkan HLS dan RLS).
- **Partisipasi Orang Tua** → Kesadaran pentingnya pendidikan akan mendorong anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat lebih tinggi.
- **Ketersediaan Sekolah di Semua Wilayah** → Meningkatkan aksesibilitas sekolah, terutama di daerah terpencil agar angka putus sekolah menurun.
- **Pendidikan yang Relevan dengan Dunia Kerja** → Meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengurangi angka putus sekolah.
- **Alokasi Anggaran Pendidikan** → Beasiswa dan subsidi sekolah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperpanjang HLS.
- **Program Wajib Belajar 12 Tahun** → Mendorong semua anak menyelesaikan pendidikan minimal sampai SMA/SMK, meningkatkan RLS.
- **Peningkatan Ekonomi Keluarga** → Keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik cenderung mendukung pendidikan anak hingga jenjang lebih tinggi.
- **Sosialisasi Kesadaran Pendidikan** → Kampanye pentingnya pendidikan bagi masa depan meningkatkan angka HLS dan RLS.

Faktor Penghambat:

- Indikator kinerja sasaran strategis Angka Harapan Lama Sekolah, capaian 13,39 dengan target kinerja 13,40. Pencapaian ini disebabkan karena keterbatasan biaya membuat sebagian anak harus berhenti sekolah lebih awal atau memilih bekerja untuk membantu keluarga. Faktor keluarga juga berpengaruh, seperti rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan kurangnya dukungan terhadap kelanjutan sekolah anak. Selain itu, faktor individu turut memengaruhi, misalnya rendahnya motivasi belajar, kesulitan akademik, serta masalah kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memperluas dan mengefektifkan program bantuan pendidikan, seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah, serta memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan

hingga ke daerah terpencil. Keluarga berperan penting dengan memberikan dukungan moral dan pengawasan terhadap pendidikan anak, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya sekolah bagi masa depan. Selain itu, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dengan mencegah pernikahan dini dan pekerja anak.

Solusi/Langkah-Langkah Perbaikan:

- optimalisasi bantuan pendidikan, peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan, serta pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan agar capaian indikator dapat meningkat pada periode selanjutnya.
- **Peningkatan Kompetensi Guru** → Mengadakan pelatihan rutin, workshop, dan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- **Motivasi Belajar Siswa** → Menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, berbasis teknologi, dan interaktif agar siswa lebih semangat belajar.
- **Peran Orang Tua** → Mengadakan program sosialisasi kepada orang tua agar lebih mendukung pendidikan anak-anak mereka.
- **Pembangunan dan Renovasi Sekolah** → Menambah jumlah sekolah atau memperbaiki fasilitas sekolah yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil.
- **Program Pendidikan Kesetaraan** → Memperluas program paket A, B, dan C untuk siswa yang putus sekolah agar mereka tetap mendapatkan Pendidikan
- **Peningkatan Anggaran Pendidikan** → Mengalokasikan dana lebih banyak untuk beasiswa, fasilitas sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru.
- **Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan** → Menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang lebih tinggi.
- **Pencegahan Pernikahan Dini** → Kampanye edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
- **Sosialisasi Pentingnya Pendidikan** → Mengadakan seminar, kampanye, dan pendekatan komunitas agar masyarakat lebih sadar pentingnya sekolah.

Dalam *framework* peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kualitas Pendidikan** seperti pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.5
Peta proses Bisnis Sasaran 8



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022

9. SASARAN STRATEGIS 9 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025 diukur dengan indikator **Umur Harapan Hidup** dengan capaian 100,12 % dengan predikat **Sangat tinggi** seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Umur Harapan Hidup	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser/ Jumlah penduduk x 100	74,30	74,39	100,12	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Paser

Umur Harapan Hidup idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Spesific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara beratahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian, tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. Metode ini mengharuskan ketersediaan data jumlah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Metode

Trussel selama ini dianggap cukup moderat untuk menghitung Umur Harapan Hidup penduduk dibandingkan metode lainnya.

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Umur Harapan Hidup idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara beratahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian, tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara Metode baru menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020-LF) untuk estimasi yang lebih akurat. Metode ini mempertimbangkan perubahan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. UHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir.

Hasil perhitungan UHH menunjukkan capaian kinerja UHH di kabupaten Paser cenderung mengalami peningkatan, hal ini didukung dari beberapa faktor ;

Pada Sektor Kesehatan

1. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak yang berdampak pada penurunan risiko kematian maternal dan neonatal.
3. Peningkatan deteksi dini dan pengelolaan penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes melitus).
4. Penguatan layanan promotif dan preventif melalui UKBM (Posyandu, Posbindu, dll).
5. Meningkatnya akses dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada Sektor Non Kesehatan

1. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan akses sanitasi dan air bersih.
3. Perbaikan status gizi masyarakat.

Pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 Indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat”. Kabupaten Paser menetapkan target **Umur Harapan Hidup** pada angka **74,30 di tahun 2025**.

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi *mortalitas* yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan tolok ukur semakin meningkatnya angka harapan hidup tidak bisa hanya diselesaikan secara sektoral/ tidak hanya melibatkan OPD yang menangani masalah kesehatan saja, Upaya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, memerlukan kontribusi dari urusan/PD yang beririsan dalam tugas dan fungsi seperti pemberdayaan perempuan dan anak, keluarga berencana, pendidikan, selain itu perlu juga dukungan dari urusan yang berkaitan dengan jalan, air bersih dan perhubungan dalam upaya memudahkan aksesibilitas pelayanan ke daerah yang terpencil dan memiliki kesulitan geografis, serta terciptanya lingkungan yang sehat dan kemudahan akses dalam hal air bersih dan sehat, serta Jumlah kematian ibu dan bayi tentu akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup.

Realisasi indikator kinerja **Umur Harapan Hidup** pada tahun 2025 berdasarkan data dari BPS sebesar 74,39 dari target yang ditetapkan sebesar 74,30 atau capaian kinerja sebesar **100,12 % (sangat tinggi)** dengan target kinerja tercapai.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Paser memperlihatkan trend meningkat dari tahun 2024 sampai 2025, namun pencapaian sampai tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 75,28, dan di bawah angka harapan hidup nasional pada angka 74,5 .

Faktor Pendorong:

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator umur harapan hidup meliputi beberapa aspek utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan usia harapan hidup masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tingginya cakupan pelayanan SPM di berbagai indikator prioritas telah mencapai Tuntas Paripurna.
2. Penguatan sistem rujukan dan layanan kesehatan primer telah berjalan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Optimalisasi peran Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan .

Faktor Penghambat/Kendala:

Walaupun target tercapai, terdapat beberapa tantangan yang masih mempengaruhi peningkatan UHH secara lebih signifikan:

1. Masih adanya angka kematian bayi dan balita yang belum sesuai target yang ditetapkan.
2. Beban penyakit tidak menular yang cenderung terus meningkat.
3. Ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah perdesaan .
4. Faktor risiko gaya hidup (merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat).

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

Untuk tetap menjaga dan meningkatkan capaian UHH, direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif berbasis keluarga dan komunitas.
2. Meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular melalui skrining rutin usia produktif dan lansia.
3. Penguatan intervensi penurunan angka kematian ibu dan bayi.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan gizi masyarakat.
7. Pemanfaatan data kesehatan berbasis wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) untuk intervensi yang lebih spesifik dan terarah.

Untuk mengatasi faktor penghambat dalam **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** dengan **indikator umur harapan hidup**, beberapa solusi dapat diterapkan, baik dari aspek kebijakan, pelayanan kesehatan, maupun kesadaran masyarakat. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

- Memperluas jangkauan layanan kesehatan ke daerah terpencil melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan klinik.
- Menambah tenaga medis dan meningkatkan kompetensinya, terutama di daerah kurang terjangkau.
- Mempermudah akses BPJS atau asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

2. Perbaikan Gizi dan Pola Makan Masyarakat

- Kampanye edukasi gizi seimbang untuk meningkatkan kesadaran pola makan sehat.
- Program bantuan pangan bergizi bagi kelompok rentan (ibu hamil, anak-anak, lansia).
- Regulasi terhadap makanan cepat saji dan produk tinggi gula, garam, serta lemak.

3. Perbaikan Lingkungan dan Sanitasi

- Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di wilayah yang masih kurang.
- Pengendalian polusi udara dan lingkungan melalui kebijakan terhadap industri dan kendaraan.
- Penyuluhan mengenai pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih

4. Peningkatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

- Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan upah minimum agar masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan.
- Penguatan regulasi pemerintah dalam mendukung program kesehatan masyarakat.

5. Mendorong Perilaku Hidup Sehat

- Kampanye anti-rokok, alkohol, dan narkoba.
- Memanfaatkan media sosial dan digital untuk edukasi kesehatan

Dalam *framework* peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** seperti pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.6
Peta Proses Bisnis Sasaran 9



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022

10. SASARAN STRATEGIS 10 MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator **Angka Kemiskinan** dan **tingkat pengangguran terbuka** pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar **94,57%**, dengan Predikat **sangat tinggi**. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
1. Angka kemiskinan	$P_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{x - y_i}{x} \right)^2$ Dimana : $n = 0, 1, 2$ $x =$ Garis kemiskinan $y =$ Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < x$ $q =$ Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $n =$ Jumlah penduduk	8,38	8,13	103	Sangat Tinggi

2. Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	4,4	4,62	95	Tinggi
Rata-rata				99	Sangat Tinggi

a. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah indikator bersifat inversi atau progresif negatif, dalam artian jika capaiannya rendah maka kinerja baik atau meningkat, dan sebaliknya jika capaiannya tinggi, maka kinerja buruk atau menurun.

Secara makro, Kabupaten Paser berhasil menjaga resiliensi ekonomi masyarakat di tengah dinamika global dan regional. Hal ini dibuktikan dengan tren penurunan angka kemiskinan makro (P0) yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari angka 9,73% pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Paser melalui serangkaian intervensi terukur berhasil menekan angka tersebut secara bertahap hingga mencapai realisasi sebesar 8,13% pada akhir Semester II tahun 2025. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan menempatkan Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2025 meningkat dari 0,86 tahun 2024 menjadi 1,47, begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,17 menjadi 0,41. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kerentanan dan ketimpangan antar penduduk miskin. Pencapaian penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Paser tergambarkan melalui angka yang mendekati nol persen yakni 0,37 berada dibawah rata-rata Propinsi dan rata-rata nasional.

Faktor Pendorong:

- Pemerintah Pusat: Merancang kebijakan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang mendukung pengurangan kemiskinan.
- Pemerintah Daerah: Melaksanakan program berbasis kebutuhan lokal, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

- BUMN dan BUMD: Berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan program CSR untuk masyarakat kurang mampu.
- Perusahaan dan Industri: Menciptakan lapangan kerja dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi.
- UMKM dan Wirausahawan: Memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang usaha.
- Lembaga Keuangan: Menyediakan akses permodalan bagi masyarakat miskin untuk usaha produktif.
- Individu: Meningkatkan kapasitas diri dengan pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan

Faktor Penghambat :

- 1) Belum optimalnya efektifitas, efisiensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belum optimalnya implementasi verifikasi dan validasi pemutakhiran data, dilakukan secara berkala;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan data sasaran program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah dan Desa;
- 4) Belum optimalnya sinergitas penanggulangan kemiskinan dengan unsur non pemerintah (DPRD, NGO, perguruan tinggi, TOGA/TOMA, TP-PKK) dan dunia usaha untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan;
- 5) Cakupan perlindungan sosial, terkhusus kebutuhan sembako bagi penduduk miskin ekstrem dan miskin belum memadai;
- 6) Belum efektifnya inovasi pengembangan program-program baru yang efektif untuk menurunkan kemiskinan seperti bantuan lanjut usia, disabilitas dan perempuan kepala keluarga, keluarga berisiko stunting, perluasan kredit usaha rakyat (KUR).

Solusi/Langkah-Langkah Perbaikan :

- 1) Melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data kemiskinan secara mikro di tingkat desa untuk memetakan penduduk yang pengeluarannya berada di sekitar ambang batas Garis Kemiskinan sebesar Rp663.239.;

- 2) Menggunakan data yang sama untuk pensasaran penanggulangan kemiskinan dan percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu DTSEN dalam penjangkauan dan penajaman sasaran intervensi oleh seluruh perangkat daerah sampai level desa;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan anggaran oleh seluruh perangkat daerah dalam intervensi program (tepat focus, tepat locus, tepat modus intervensi dan tepat *beneficeries*);
- 4) Meningkatkan sinergitas, komplementaritas, keterpaduan pelaksanaan program lintas lapis pemerintah termasuk kecamatan, kelurahan/desa serta pelibatan unsur non pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan;
- 5) Memastikan program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat diterima secara tepat oleh masyarakat;
- 6) Mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin agar murah, tersedia dan terjangkau;
- 7) Memperluas cakupan perlindungan sosial, terkhusus kebutuhan sembako bagi penduduk miskin ekstrem dan miskin, secara khusus yang belum sama sekali terintervensi oleh Bantuan Pangan, PKH, PIP maupun KUBE;
- 8) Melakukan inovasi pengembangan program-program baru yang efektif untuk menurunkan kemiskinan seperti bantuan lanjut usia, disabilitas dan perempuan kepala keluarga, keluarga berisiko stunting, perluasan KUR, UMKM, usaha mikro, usaha super mikro dan pemberdayaan ekonomi, penduduk miskin ekstrem dan miskin serta kelompok marginal lainnya.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa

tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja).

Sebagai mana indikator angka kemiskinan, Indikator Tingkat pengangguran terbuka juga merupakan indikator inversi atau progresif negatif dalam artian jika capaiannya rendah maka kinerja baik atau meningkat, dan sebaliknya jika capaiannya tinggi maka, kinerjanya buruk atau menurun.

Target TPT ini merupakan pernyataan anomali dimana semakin besar realisasi menunjukkan rendahnya kinerja. Realisasi TPT tahun 2025 sebesar 4,62% adalah dibawah rentang rentang target Kabupaten pada RPJMD tahun 2025-2029 yang berkisar antara 4,16% – 4,31%, kinerja ini mengalami penurunan sebesar 0,09 poin persen dari realisasi tahun 2024 yang mencapai 4,53%. Tren kenaikan ini perlu diwaspadai agar tidak berlanjut di tahun berikutnya.

Meskipun demikian Realisasi TPT Kabupaten Paser di atas rata-rata realisasi TPT Provinsi Kalimantan Timur yaitu 5,18%, artinya Kabupaten Paser memiliki kinerja pasar tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi.

Faktor Pendorong:

- Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Paser tahun 2025 telah mengalami peningkatan selaras dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang semakin membaik.
- Meningkatnya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan pemagangan dengan mengirim peserta pelatihan ke Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Timur, melakukan pelatihan dengan MOU Bersama Lembaga Pelatihan kerja Swasta, dan melakukan pelatihan melalui pola kontribusi serta mengirim peserta pemagangan ke beberapa perusahaan di Kabupaten Paser.
- Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pekerjaan pada beberapa perusahaan, serta adanya penempatan tenaga kerja hasil pelaksanaan Pendidikan pelatihan vokasi

bagi pencaker berdasarkan Klaster kompetensi terutama tenaga security garda pratama di IKN.

Faktor Penghambat:

- Masih terdapat kesenjangan atau mismatch antara kompetensi teknis yang diperoleh dari lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang sehingga banyaknya para pencari kerja lokal yang tidak terserap dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- Belum maksimalnya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan softskill pencari kerja, sehingga kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan.
- Kurangnya informasi job fair, Pencari kerja tidak memiliki kemudahan untuk mengakses informasi tentang perusahaan yang memerlukan tenaga kerja.
- Angka pengangguran di Kabupaten Paser juga disebabkan angkatan kerja baru yang tidak tertampung oleh pasar kerja, dimana banyaknya tamatan SMK/Akademi/Perguruan Tinggi yang menamatkan studinya pada tahun berjalan yang tidak tertampung di pasar kerja, serta pendatang baru dengan adanya IKN dimana Kabupaten Paser yang juga merupakan Kabupaten penyangga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten ini sementara mereka tidak memiliki keahliannya yang disyaratkan.

Solusi / Langkah Perbaikan :

- Meningkatkan koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang serta lintas sektor baik pemerintah dan dunia usaha, Karena untuk menekan Angka Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Paser perlu, perhatian dan penyelesaian bersama dari beberapa unsur yang terlibat seperti dunia Pendidikan, instansi yang terlibat dengan pengembangan usaha kreatif serta sektor pekerja informal , pertanian, perikanan, para pelaku usaha dan stakeholder terkait.
- Memfasilitasi masyarakat agar dapat berwirausaha karena selain mendapatkan pekerjaan yang tidak bergantung pada kesepakatan upah minimum sehingga dapat menekan risiko untuk menganggur, wirausahawan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, sarana/prasarana penunjang juga perlu dibangun, karena hal tersebut dapat

meningkatkan peluang investor untuk berinvestasi. Memberikan akses permodalan dan pendampingan manajemen usaha bagi wirausahawan pemula untuk menciptakan lapangan kerja mandiri serta digitalisasi UMKM lokal agar jangkauan pasar lebih luas

- Menyelenggarakan pelatihan kerja intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dominan di Kabupaten Paser, fokus pada sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing lebih tinggi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong investasi menyediakan lapangan pekerjaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman dan teknologi serta mengikuti era revolusi industri 4.0.
- Mengintensifkan penyelenggaraan Job Fair secara berkala, baik online maupun offline.
- Memperkuat kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Paser untuk memprioritaskan penyelenggaraan pemagangan dan penyerapan tenaga kerja local.

Solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki regulasi.

Dalam *framework* peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** seperti pada gambar berikut:



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022

3.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya untuk mengetahui peningkatan kinerja yang ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan capaian kinerja tujuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
					Target	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi	Angka	1,10	1,38	1,38	3,5	3,77	107,71
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,59	62,56	78,67	75	80,91	107,88
Indeks Gini	Indeks	0,282	0,292	0,271	0,275	0,273	100,73
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,85	74,56	75,13	74,5	75,85	101,81

Tabel 3.18

Perbandingan capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data awal	TARGET			REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)		
		2021	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Efek Berganda (<i>Multiplier Effect</i>) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,87	4,73	5,41	3,80	3,52	3,52	10,76	74,42	65,6	283,16
Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	-2,28	5,35	21,75	15,85	14,77	27,03	17,07	276,07	124,27	107,70
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	58,41	60,01	64,50	63,4	60,16	61,38	61,96	100,25	95,16	97,73
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	81	81	83	82,649	78,556	80,996	102	96,98	97,59
Rata-rata capaian									101,13	96,07	97,66
Meningkatnya	Nilai IKM	78,61	83,50	86	85	83,6	86,27	89,52	100,1	100,31	105,32

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data awal	TARGET			REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)		
		2021	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Kualitas Pelayanan Publik	Daerah										
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	53	75	49	10	14	8,72	17	181,33	22,02	30
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA	7	7	7	7	7	7	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,68	59,18	65,82	72,47	64,02	41,05	47,875	108,18	62,37	66,06
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	74,56	72,40	79,72	72,57	72,38	80,15	97,33	99,97	100,54
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	196	195	194,5	185	191,78	187,98	187,98	101,65	103,35	98,39
Rata-rata capaian									102,39	88,56	97,63
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	13,30	13,35	13,59	13,37	13,38	13,39	100,53	100,22	98,53
	Rata-rata Lama Sekolah	8,55	8,90	8,90	9,09	8,91	8,92	9,04	100,11	100,22	99,45
Rata-rata capaian									100,32	100,22	98,99
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,62	72,90	73,10	74,30	73,89	73,17	74,39	101,36	100,10	100,12
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,23	9	9,00	8,38	9,11	8,63	8,13	98,78	104,11	103
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	4,5	3,94	4,4	4,72	4,53	4,62	95,11	85,03	95
Rata-rata capaian									99,95	94,57	111,96

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, dari 4 Indikator kinerja tujuan tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya semuanya meningkat, adapun peningkatan tertinggi yaitu indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi.

Adapun untuk Indikator kinerja sasaran, dari 10 Sasaran Strategis dan 15 indikator kinerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Paser jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 14 indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun terdapat 1 Sasaran dan indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu pada sasaran meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif dengan indikator kinerja angka kriminalitas.

3.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD 2021-2026

Selain pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi tahun 2025 dengan target juga membandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal dimaksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan capaian tahun 2025 dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sebagai bahan evaluasi agar pencapaian kinerja ditahun periode akhir RPJMD sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir RPJMD Sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya EfekBerganda (Multiplier EffectSektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi lokal/Non Tambang	3,80	10,76	283,16	5,95	180,84
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisataa	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi danmakan minum)	15,85	17,07	107,70	2,83	603,18
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	63,4	61,96	97,73	81 (A)	76,49
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83	80,996	97,59	78	103,84

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	85	89,52	105,32	84	106,57
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	10	17	30	48	164,58
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	7	100	8	87,50
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,47	47,875	66,06	78,91	60,67
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,72	80,15	100,54	71,63	111,89
		Indeks Resiko Bencana	185	187,98	98,39	193,5	102,85
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	13,59	13,39	98,53	13,50	99,19
		Rata-rata lama sekolah	9,09	9,04	99,45	9,00	100,44
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	74,30	74,39	100,12	73,30	101,49
10	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,38	8,13	103	5,80	59,83
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,4	4,62	95	3,10	50,97
Rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator kinerja							95,09

3.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Sebagai profil kinerja Pemerintah Kabupaten Paser, maka perlu dibandingkan/*benchmark* kinerja dengan Provinsi Kalimantan Timur, nasional maupun internasional. Adapun capaian kinerja indikator kinerja utama tidak semua bisa dibandingkan dengan target nasional, provinsi maupun internasional, 4 Indikator Kinerja utama Tujuan jika dibandingkan dengan capaian Internasional hanya sebanyak 1 indikator, capaian Nasional sebanyak 3 indikator dan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 4 Indikator kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Sasaran yang terdiri dari 15 Indikator kinerja jika dibandingkan dengan capaian Internasional hanya sebanyak 0 indikator, nasional sebanyak 5 indikator, sedangkan provinsi sebanyak 7 indikator kinerja utama, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Perbandingan Relisasi Kinerja Tujuan Kab. Paser Tahun 2025
dengan capaian Provinsi, Nasional dan Internasional

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KABUPATEN PASER	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,77	4,69	5,11	3,3
2	Indeks Reformasi Birokrasi	80,91	88,07	71,55	n/a
3	Indeks Gini	0,273	0,312	0,363	n/a
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,85	79,39	75,90	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Paser

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kab. Paser Tahun 2025
dengan realisasi Provinsi, Nasional dan Internasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	REALISASI KINERJA 2025			
		Kabupaten Paser	Provinsi	Nasional	Inter Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Sektor	10,76	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja Sasaran	REALISASI KINERJA 2025			
		Kabupaten Paser	Provinsi	Nasional	Inter Nasional
1	2	3	4	5	6
	Ekonomi Lokal/Non Tambang				
2	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	17,07	n/a	n/a	n/a
3	Nilai SAKIP	61,96	77,82	66,42	n/a
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,996	n/a	n/a	n/a
5	Nilai IKM Daerah	89,52	87,79	n/a	n/a
6	Angka Kriminalitas	17	n/a	n/a	n/a
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	8,78	n/a	n/a
8	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	68,10	n/a	n/a	n/a
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,15	n/a	n/a	n/a
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	187,98	n/a	n/a	n/a
11	Angka Harapan Lama Sekolah	13,39	14,04	9,07	n/a
12	Rata-rata Lama Sekolah	9,04	10,10	n/a	n/a
13	Umur Harapan Hidup	74,39	75,28	74,47	n/a
14	Angka Kemiskinan	8,13	5,19	8,25	n/a
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,62	5,18	4,74	n/a

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau sebuah

proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah mulai membaik dan tumbuh. Dimana, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai 4,53 persen dan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,60 persen pada Triwulan III tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Gambar 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Kalimantan Timur



Gambar 3.9
Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Mitra Dagang Indonesia



2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Paser Pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan nilai indeks 80,91 dengan predikat A, meningkat dari tahun sebelumnya dengan indeks 78,67 dengan predikat B.

3. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Ini adalah angka antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu orang memiliki semua pendapatan). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat.

Indeks Gini memiliki hubungan yang erat dengan ketimpangan ekonomi. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketika sebagian kecil populasi memiliki sebagian besar pendapatan, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan di antara mereka yang kurang beruntung. Hal ini dapat mengarah pada konflik sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Indeks Gini merupakan alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi dan merupakan indikator kinerja negatif artinya apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Paser pada Tahun 2025 dengan indeks 75,85 ,meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,12, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur dengan dengan indeks 79,39.

3.6 ANALISIS CAPAIAN PROGRAM YANG MENDUKUNG TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Rendah, Sedang, Tinggi atau Sangat Tinggi** adalah pencapaian pada sasaran:

1. **Sasaran 1 Meningkatnya Efek berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian** dengan indikator Pertumbuhan **sektor ekonomi lokal /non tambang**, dengan realisasi sebesar 10,76 dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 3,80, yaitu dengan capaian sebesar 101,32%. Pencapaian tersebut didukung melalui 22 program dengan rata –rata capaian program sebesar 90,13%, program-program tersebut yaitu:
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perekonomian dan Pembangunan
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)
7. Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
11. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan
13. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
14. Program Penanganan Kerawanan Pangan
15. Program Pengawasan Keamanan Pangan
16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota
18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pelayanan Penanaman Modal
21. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
22. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota** dengan capaian sebesar 99,95%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota diantaranya adalah:

- Terpetakannya potensi hilirisasi komoditas lokal dengan Program Pengendalian Izin Usaha Industri yang mampu menyederhanakan prosedur birokrasi.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha serta tingginya inisiatif pelaku usaha dalam melegalkan entitas bisnis mereka melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

- tingginya fluktuasi harga bahan baku musiman, keterbatasan infrastruktur logistik yang mengakibatkan biaya distribusi mahal.
- masih rendahnya standar teknologi pengolahan di tingkat petani yang membatasi kapasitas produksi untuk mencapai skala industri yang lebih masif secara konsisten.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Langkah upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Penguatan hilirisasi produk pertanian melalui modernisasi teknologi pengolahan pascapanen dan pembangunan infrastruktur logistik terpadu guna menjamin stabilitas rantai pasok serta meningkatkan nilai tambah komoditas lokal di pasar global.
- ❖ Adapun program dengan capaian terendah yaitu Program **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** dengan capaian 40,44%, analisis capaian sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Upaya pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan penanganan bencana pertanian lainnya, keterlibatan masyarakat dan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan lapangan, sinergitas antar lembaga, serta penggunaan teknologi untuk deteksi dini dampak perubahan iklim.

Faktor Penghambat:

Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu disebabkan karena intensitas perubahan cuaca yang memicu bencana banjir dan kekeringan, serta diperparah oleh serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di beberapa wilayah sentra produksi.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Langkah upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan optimalisasi bantuan pompa air di lahan terdampak kekeringan. Langkah ini dibarengi dengan peningkatan intensitas pendampingan lapangan untuk memastikan penerapan teknologi budidaya yang lebih tangguh terhadap bencana.

Sasaran strategis Meningkatkan Efek berganda (*Multiplier Effect*) Sektor Pertanian yang didukung 20 program bersifat *crosscutting* dengan 4 Urusan, yaitu urusan pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan perindustrian yang dibagi habis kedalam 6 Perangkat Daerah pengampu sebagaimana tabel *Crosscutting* 1

2. **Sasaran 2 Berkembangnya Sektor Kepariwisata** dengan indikator *Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)*, dengan realisasi sebesar 15,76% dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 17,07%, yaitu dengan capaian sebesar **107,70% (Sangat Tinggi)** Pencapaian tersebut didukung melalui 14

program dengan rata –rata capaian program sebesar **84,05 %**. Program-program tersebut yaitu :

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Program pemasaran pariwisata
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
6. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
7. Program pengembangan ekspor
8. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
9. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
10. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
11. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
12. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian
13. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
14. Program Pengembangan UMKM



- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting** dengan capaian 98%, analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator kinerja Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil, ditunjang dengan kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) terlaksana 100% dengan target 57 pelaku usaha serta kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah, sehingga terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat terlaksana 100% dengan target 16 Kios.

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantaranya adalah:

- Jarak yang cukup jauh meningkatkan biaya logistik dan menghambat kelancaran pasokan.

- Adanya spekulasi atau pihak yang sengaja menimbun barang menyebabkan kelangkaan buatan dan lonjakan harga di tingkat konsumen.
- Implementasi kebijakan sering terkendala oleh komunikasi yang belum merata antar instansi terkait dalam memantau pergerakan harga secara *real-time*.
- Lonjakan permintaan yang drastis, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri, seringkali melampaui kecepatan distribusi stok.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program pemberdayaan dan perlindungan koperasi diantaranya adalah :

- Membangun sistem informasi stok barang pokok dan barang penting secara *real-time* untuk memprediksi kelangkaan lebih awal.
 - Melaksanakan pasar murah secara terencana, konsisten, dan terjangkau bagi masyarakat, tidak hanya saat harga melonjak tinggi.
- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **program pemberdayaan dan perlindungan koperasi** sebesar 56 %, dengan analisis capaian sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja program pemberdayaan dan perlindungan koperasi diantaranya adalah:

- Penataan kelembagaan kepatuhan dan modernisasi sistem manajemen koperasi agar lebih efisien.
- Adanya pelatihan manajemen profesional, peningkatan kualitas layanan, dan inovasi produk.
- Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar dan efisiensi.

Faktor Penghambat:

Adapun yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja program pemberdayaan dan perlindungan koperasi diantaranya adalah:

- Koperasi mengalami kendala dalam memperkuat permodalan, yang menghambat kemampuan untuk tumbuh.
- Kesadaran dan partisipasi anggota yang minim dalam kegiatan koperasi menghambat keberhasilan program.
- Komunikasi yang tidak efektif antar pengurus atau dengan pihak luar (seperti Dinas Perindagkop UKM) sering menghambat pelaksanaan program.
- Masih minimnya koperasi dalam penggunaan teknologi.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program pemberdayaan dan perlindungan koperasi diantaranya adalah :

- Mengadakan pelatihan teknis, manajemen keuangan, dan tata kelola koperasi yang baik agar pengurus lebih kompeten.
- Mendorong koperasi menggunakan teknologi digital dalam operasional dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi.
- melakukan audit rutin dan pemeringkatan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mencegah penyalahgunaan.
- Memberikan konsultasi hukum dan bimbingan bagi koperasi yang menghadapi masalah administratif atau sengketa.

Sasaran strategis **Berkembangnya Sektor Kepariwisata** yang didukung 14 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Pariwisata, Urusan Perdagangan dan urusan Koperasi dan UMKM yang dibagi habis kedalam 2 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana pada table *Crosscutting 2*.

3. **Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** dengan indikator *Nilai SAKIP* dan *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)*, dengan rata-rata capaian sebesar **97,66 % (Sangat Tinggi)** Pencapaian tersebut didukung melalui 21 program dengan rata –rata capaian program sebesar sebesar 90,87%. Program-program tersebut yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
5. Program kepegawaian daerah
6. Program pengembangan sumber daya manusia
7. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd
8. Program administrasi pemerintahan desa
9. Program pengelolaan keuangan daerah
10. Program penyelenggaraan pengawasan
11. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
12. Program pengelo laan arsip
13. Programperlindungan & penyelamatan arsip
14. Program penyelenggaraan statistik sektoral
15. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
16. Program penataan desa



17. Program peningkatan kerjasama desa
18. Program administrasi pemerintahan desa
19. Program penelitian & pengembangan daerah
20. Program pengelolaan barang milik daerah
21. Program pengelolaan pendapatan daerah

- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **Program Pengelolaan Arsip** dengan capaian 98,84%, dengan analisis capaian sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Program Pengelolaan Arsip yaitu:

- Dukungan penuh dari pihak-pihak terkait termasuk kebijakan dan pengawasan, sangat krusial agar program pengarsipan berjalan
- Adanya tenaga pengelola arsip yang kompeten dan berlatar belakang pendidikan kearsipan/diklat kearsipan
- Kepatuhan hukum dan regulasi, dorongan untuk memenuhi standar pengelolaan arsip sesuai aturan pemerintah untuk akuntabilitas
- Arsip yang terkelola dengan baik mempercepat proses operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
- Ketersediaan ruang penyimpanan (depo), rak, map, dan teknologi pendukung (digitalisasi)

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja Program Pengelolaan Arsip diantaranya adalah:

- Kurangnya jumlah arsiparis atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan kearsipan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya manajemen arsip.
- Kurangnya kebijakan atau aturan internal yang tegas mengenai tata kelola arsip, menyebabkan arsip kacau atau tidak terurus
- Risiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan arsip fisik (faktor intrinsik seperti tinta/kertas) maupun arsip elektronik akibat virus/server rusak

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Pengelolaan Arsip diantaranya adalah :

- **Digitalisasi dan Teknologi:** Mengoptimalkan pengimplementasian Document Management System (DMS) dan teknologi cloud untuk mempercepat akses dan keamanan.
 - **Penguatan SDM :** Meningkatkan pelaksanaan *Workshop* atau Bimtek SDM Pengelola Arsip
- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** dengan capaian 64,48%, dengan analisis capaian sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu:

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diantaranya adalah:

- Tersedianya aparatur atau auditor yang memiliki keahlian dalam melakukan pembinaan, konsultasi, dan pengawasan.
- Dukungan penuh dari pimpinan instansi atau Perangkat Daerah dalam menetapkan target dan mengawasi implementasi.
- **Adanya kerjasama Perangkat Daerah**, responsivitas dan proaktifnya perangkat daerah yang didampingi, sehingga proses verifikasi dan penilaian berjalan efektif.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diantaranya adalah

- Penguatan kapasitas APIP
- Digitalisasi pengawasan, dan tindak lanjut hasil evaluasi yang disiplin
- Peningkatan kualitas SDM, serta perumusan kebijakan berbasis data yang akuntabel.

4. **Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator *Nilai IKM Daerah*, dengan realisasi sebesar 89,52 dari target yang ditetapkan tahun 2025 dengan indeks sebesar 84, (Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 8 program dengan rata –rata capaian program sebesar 92,58 %.

Program-program tersebut yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk
 2. Program Pencatatan Sipil
 3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** dengan capaian 100%, dengan analisis capapain sebagai berikut:



Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yaitu:

- Optimalisasi penggunaan sistem elektronik terintegrasi mempermudah proses perizinan berusaha sesuai regulasi
- Transparansi dalam pelayanan mengurangi pungli dan calo, serta adanya payung hukum yang jelas memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha
- **Peningkatan Investasi dan Legalitas:** Legalitas usaha mempermudah akses modal, memperluas jaringan pasar, dan memberikan perlindungan hukum.
- Peningkatan sarana, prasarana, dan koordinasi antarinstansi mempercepat penerbitan izin

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diantaranya adalah:

- **Faktor Sumber Daya Manusia dan Pemahaman (Internal Pelaku Usaha)** Masih rendahnya pemahaman mengenai prosedur perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA)
- Masih minimnya informasi yang tersebar ke masyarakat mengenai prosedur Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di MPP.
- Masih minimnya Edukasi kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai mekanisme perizinan terbaru

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diantaranya adalah :

- Mengurangi persyaratan administratif yang berbelit dan tidak relevan
- Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) proaktif, seperti menjemput bola atau pendampingan ke kecamatan-kecamatan.
- Mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti kendala teknis atau pungli.

- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **program pengelolaan aplikasi informatika** dengan capaian 82%, analisis capaian sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yaitu:

- Adanya Perda/Perkada yang mewajibkan penerapan e-government.
- Kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan sederhana melalui sistem online.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam teknologi informasi.
- Kebutuhan untuk mengamankan data dan informasi publik melalui sistem persandian yang handal

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja program Pengelolaan Aplikasi Informatika diantaranya adalah:

- **Sumber Daya Manusia (SDM):** Kurangnya tenaga IT yang ahli
- Rendahnya kesadaran digital dan lambatnya adopsi perubahan teknologi

Solusi / Langkah Perbaikan :

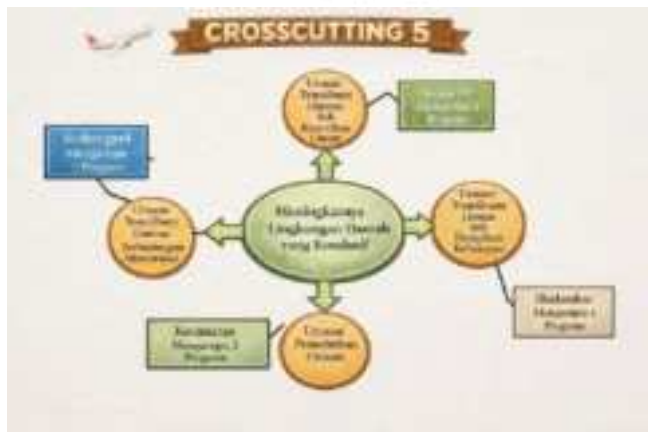
Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Pengelolaan Aplikasi Informatika diantaranya adalah :

- **Penerapan Tata Kelola SPBE Terintegrasi:** Menyusun panduan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pengembangan aplikasi.
- **Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keamanan:** Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur untuk meningkatkan keahlian di bidang teknologi informasi, Memperkuat tata kelola persandian dan keamanan informasi untuk mendukung SPBE.

Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** yang didukung 5 program bersifat crosscutting dengan 4 Urusan, yaitu urusan Kependudukan dan pencatatan sipil, perdagangan, kominfo dan urusan pemerintahan umum. Dengan 4 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana pada table crosscutting 4:

5. **Sasaran 5 Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif** dengan indikator *Angka Kriminalitas*, dengan realisasi sebesar 17* dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 10, sehingga memperoleh capaian sebesar 30 % (Sangat Rendah) Pencapaian tersebut didukung melalui 8 program dengan rata – rata capaian program sebesar 88,40 %. Program-program tersebut yaitu:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
3. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
4. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik & pengembangan etika serta budaya politik
5. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan



6. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
 7. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
 8. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah Program **Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** dengan capaian sebesar 99,95%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yaitu:

- Adanya kebutuhan untuk mengedukasi pemilih pemula/pemuda akan hak, kewajiban, dan nilai-nilai demokrasi
- Pengembangan Budaya Politik: Adanya tujuan meningkatkan kualitas etika dan budaya politik agar lebih positif.

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diantaranya adalah:

- **Rendahnya Kualitas Pendidikan Politik:** Kurangnya pemahaman terhadap isu politik dan kejenuhan masyarakat terhadap proses demokrasi menyebabkan sikap apatis.
- Rendahnya literasi media memudahkan penyebaran hoaks, yang memicu polarisasi dan perpecahan di masyarakat.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diantaranya adalah :

- Menyisipkan materi pendidikan politik, etika demokrasi, dan budaya politik ke dalam kurikulum pendidikan formal
- Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang menyediakan modul pendidikan politik interaktif.
- Menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif tentang etika politik, menyasar Gen Z dan milenial untuk meningkatkan literasi politik.

- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** dengan capaian 65,36%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu:

- Koordinasi yang aktif dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga profesi, LSM, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi.
- Fokus pada Pendidikan dan Nilai: Peningkatan demokrasi, etika budaya politik, dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat ketahanan sosial

Faktor Penghambat:

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah:

- kurangnya keterampilan usaha, tingkat inflasi, tingginya angka pengangguran, serta kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam.
- Rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya ketahanan budaya, dan potensi konflik sosial.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya diantaranya adalah :

- Mengintensifkan perumusan bahan kebijakan teknis yang disesuaikan dengan tantangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
- Melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial dan ekonomi secara berkala agar kebijakan lebih tepat sasaran
- Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja secara berkala untuk memastikan efektivitas program

Sasaran strategis **Lingkungan Daerah yang Kondusif** yang didukung 8 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Trantibumlinmas dan Urusan Pemerintahan Umum dengan 4 Perangkat Daerah pegampu yaitu , Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan dan Disdamkar, sebagaimana table berikut:

6. **Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infra struktur** dengan indikator *Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)*, dengan realisasi sebesar 7 dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 7, sehingga memperoleh capaian sebesar 100 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui **17 program** dengan rata – rata capaian program sebesar 94,31 %. Program-program tersebut yaitu:
 1. Program Penyelenggaraan Jalan
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

3. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
13. Program Pengelolaan Pelayaran
14. Program Pengelolaan Perkeretaapian
15. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
16. Program Pembangunan Kawasan transmigrasi
17. Program Pengembangan Kawasan transmigrasi



- ❖ Program dengan capaian tertinggi yaitu **Program perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** dengan capaian sebesar 99,26%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu:

- Adanya regulasi terkait penataan, penegakan hukum tata ruang, dan program untuk mendorong pengentasan kawasan kumuh.
- Keterlibatan aktif masyarakat dalam peremajaan kawasan mempermudah implementasi program, terutama yang melibatkan penataan ulang lahan atau relokasi.

Faktor Penghambat:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diantaranya adalah :

- kurangnya koordinasi antarinstansi, dan terbatasnya sarana prasarana dasar di lokasi kumuh memperlambat penanganan
- **Kerusakan Lingkungan:** Sanitasi buruk dan pembuangan limbah yang tidak terkelola.

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut :

Penguatan Perencanaan dan Data Terintegrasi:

- Menggunakan data yang akurat untuk menetapkan prioritas kawasan.]
- Menyamakan persepsi dan kolaborasi antar pihak (pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat).

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat:

- Melibatkan warga sejak tahap perencanaan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan.

Optimalisasi Pendanaan dan Kebijakan:

- Memanfaatkan dana DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
- ❖ Sedangkan Program dengan capaian terendah adalah **program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** dengan capaian sebesar 26,53% dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yaitu:

- Kebutuhan untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kelancaran aliran air ke badan air penerima, dan mengatasi genangan di area vital.
- Drainase yang baik krusial untuk mencegah kerusakan jalan raya, mengurangi biaya perbaikan, dan menghambat pergerakan lalu lintas.
- Adanya alokasi anggaran untuk mengeksekusi program perbaikan drainase secara berkelanjutan

Faktor Penghambat:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diantaranya adalah :

- **Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Kurangnya partisipasi dalam menjaga kebersihan saluran menyebabkan drainase tersumbat limbah rumah tangga dan material bangunan
- **Lemahnya Koordinasi Antarinstansi:** Kurangnya sinkronisasi antara Dinas PUPR, BPBD, dan pemerintah kelurahan dalam eksekusi program, sering kali menyebabkan keterlambatan proyek.
- **Perencanaan yang Tidak Terpadu:** Sistem drainase seringkali tidak terintegrasi antarwilayah (lintas kecamatan/wilayah), menyebabkan limpahan air ke area yang lebih rendah

Solusi / Langkah Perbaikan :

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebagai berikut :

- **Penerapan Teknologi:** Menggunakan sistem berbasis IoT (Internet of Things) untuk simulasi, uji coba lapangan, dan evaluasi kinerja sistem guna mempercepat penanganan genangan.
- **Pemetaan Titik Rawan:** Meninjau langsung dan memetakan lokasi rawan genangan/banjir untuk menentukan prioritas perbaikan.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Melibatkan warga dalam menjaga kebersihan dan merawat infrastruktur drainase untuk meningkatkan rasa memiliki.
- **Penegakan Aturan:** Mengatasi penyumbatan akibat sampah dan perilaku masyarakat melalui penegakan aturan lingkungan yang lebih ketat.

Sasaran strategis **Lingkungan Daerah yang Kondusif** yang didukung 16 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Pekerjaan umum penataan ruang, urusan perumahan dan permukiman, urusan perhubungan dan urusan perhubungan dengan 4 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana table Crosscutting 6.

7. **Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana** didukung dengan 3 indikator yaitu **Indeks penyelenggaraan penataan ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dan **Indeks Resiko Bencana**, dengan rata-rata capaian sebesar **88,33 % (Tinggi)**

Pencapaian tersebut didukung melalui **8 program** dengan rata – rata capaian program sebesar 91,98%. Program-program tersebut yaitu :

1. Program penyelenggaraan penataan ruang
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)



6. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
 7. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
 8. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 11. Program Pengelolaan Persampahan
 12. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 15. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 16. Program Penetapan Tanah Ulayat
 17. Program Penatagunaan Tanah
 18. Program Penanggulangan Bencana
- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)** sebesar 99,95%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu:

- **Infrastruktur dan Fasilitas:** Adanya tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai standar (izin/fasilitas aman), teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, dan sarana pengangkutan yang layak.
- **Edukasi dan Pelatihan SDM:** Peningkatan kompetensi petugas mengenai penanganan limbah B3 dan pemahaman risiko, termasuk adanya tenaga teknis yang bersertifikat.
- **Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial:** Pemahaman produsen/industri akan bahaya pencemaran dan tanggung jawab untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Faktor Penghambat:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diantaranya adalah :

- Masih kurangnya SDM yang kompeten dan ahli dalam manajemen teknis limbah B3.
- Minimnya pengetahuan teknis dan kesadaran mengenai pengelolaan limbah B3, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat
- Kurangnya inisiatif industri dalam mentaati regulasi yang berlaku.

Solusi / Langkah Perbaikan:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut :

- penguatan regulasi, pelatihan staf, serta infrastruktur penyimpanan yang aman.
- Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap jenis, sifat, dan jumlah B3/Limbah B3 yang dihasilkan untuk menentukan metode penanganan yang tepat
- menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penanganan darurat yang jelas.

- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **Program Penetapan Tanah Ulayat** dengan capaian 58,04 %, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Penetapan Tanah Ulayat yaitu:

- Perlindungan Hukum & Kepastian: Sertipikat tanah ulayat memberikan kepastian batas dan kepemilikan, serta mencegah klaim pihak lain.
- Pemanfaatan Ekonomi & Sosial: Memungkinkan tanah adat digunakan secara legal untuk kesejahteraan masyarakat.
- Pelestarian Nilai Budaya: Menjaga tanah sebagai lebensraum (ruang hidup) dan menjaga kesakralan tanah nenek moyang.
- Regulasi Terkait: Adanya kebijakan operasional untuk memfasilitasi sertifikasi tanah adat.

Faktor Penghambat:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Penetapan Tanah Ulayat diantaranya adalah :

- Konflik Batas Tanah Ulayat: Perubahan tapal batas yang sering terjadi, serta tumpang tindih lahan antar desa, antar suku, atau dengan kawasan hutan/perusahaan.
- Lokasi Geografis: Kesulitan akses ke lokasi tanah ulayat yang terpencil dan terbatasnya sarana/prasarana pemetaan.

Solusi / Langkah Perbaikan:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Penetapan Tanah Ulayat adalah sebagai berikut :

- Menggunakan metode pemetaan yang lebih fleksibel, cepat, dan partisipatif untuk mengidentifikasi batas tanah ulayat/adat.
- Melakukan inventarisasi dan identifikasi subjek/pemilik tanah ulayat untuk mengurangi sengketa.

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang manfaat sertifikasi tanah ulayat untuk kepastian hukum, bukan untuk menghilangkan hak adat.

Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana** yang didukung 18 program bersifat *crosscutting* dengan 3 urusan, yaitu urusan lingkungan hidup, urusan penanggulangan bencana dan urusan pertanahan 3 perangkat daerah pegampu yaitu DLH, BPBD dan DPKPP.

8. **Sasaran 8 Meningkatkan Kualitas Pendidikan** didukung dengan 2 indikator yaitu *Angka Harapan Lama Sekolah* dan *Rata-rata Lama Sekolah*, dengan rata-rata capaian sebesar 98,99 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 7 program dengan rata – rata capaian program sebesar 74,95%. Program-program tersebut yaitu:



1. Program Pengelolaan Pendidikan
 2. Program Pengembangan Kurikulum
 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
 6. Program Pembinaan Perpustakaan
 7. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah kuno
- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra** dengan capaian sebesar 99%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Pengembangan Bahasa dan Sastra yaitu:

- Pelaksanaan sosialisasi program perlindungan bahasa dan sastra daerah yang intensif kepada pemangku kepentingan
- Program khusus yang memasyarakatkan bahasa daerah dan sastra kepada penutur muda untuk mencegah kepunahan.
- **Dukungan Pendidikan: Integrasi** pengembangan bahasa dalam bahan ajar, kurikulum, dan pelatihan guru (in-house training).

- **Kesadaran Sosial Budaya:** Adanya kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama dan menjaga bahasa daerah sebagai kekayaan budaya.

Faktor Penghambat:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Pengembangan Bahasa dan Sastra diantaranya adalah :

- Rendahnya apresiasi masyarakat dan minat siswa terhadap sastra, serta penggunaan bahasa Indonesia yang belum maksimal dalam interaksi sehari-hari
- **Faktor Sarana dan Sarana:** Kurangnya bahan ajar, buku sastra, dan sarana penunjang literasi lainnya

Solusi / Langkah Perbaikan:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Pengembangan Bahasa dan Sastra adalah sebagai berikut :

- Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pengajar Bahasa Indonesia dan sastra.
- Menggunakan webinar sastra dan media digital untuk pembelajaran yang lebih interaktif
- Mengidentifikasi dan melestarikan bahasa serta sastra daerah melalui pedoman khusus.

- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan** dengan capaian 41 %, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yaitu:

- Penerapan sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan pengangkatan PPPK secara signifikan meningkatkan kualitas dan kinerja tenaga pendidik
- **Sarana dan Prasarana:** Fasilitas yang menunjang penerapan pembelajaran, seperti teknologi informasi dan komunikasi.
- Tenaga kependidikan yang memahami tanggung jawab dan mampu mengembangkan sekolah.

Faktor Penghambat:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan diantaranya adalah :

- Masih rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional, serta kurangnya motivasi tenaga pendidik untuk mengembangkan diri.
- Kurangnya tenaga pendidik berkualitas di wilayah tertentu (ketidakmerataan sebaran)

- Kurang optimalnya komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan stakeholder.

Solusi / Langkah Perbaikan:

Adapun upaya langkah perbaikan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan, workshop, dan mentoring secara rutin untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.
- Mempercepat dan memperluas jangkauan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memastikan standar kualifikasi.
- **Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi):** Melatih PTK dalam penggunaan teknologi informasi untuk metode pengajaran inovatif
- Mengatur sebaran tenaga pendidik agar tidak terjadi penumpukan di kota dan kekurangan di daerah terpencil (Kecamatan/Desa).

Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana** yang didukung 7 program bersifat crosscutting dengan 2 Urusan, yaitu urusan Pendidikan, urusan kearsipan dan urusan perpustakaan, dengan 2 Perangkat Daerah pegampu.

9. **Sasaran 9 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** didukung dengan indikator *Umur Harapan Hidup* dengan realisasi sebesar 74,39 dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 74,30, sehingga memperoleh capaian sebesar 100,12% (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 4 program dengan rata - rata capaian program sebesar 91 %. Program-program tersebut adalah:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

- ❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan** capaian sebesar 98 %, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Faktor pendorong pencapaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah dengan dilaksanaannya kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan.

Faktor Penghambat:

- Perbedaan signifikan akses pendidikan dan kesempatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan
- Kurangnya pelatihan teknis SDM Kesehatan
- Konsentrasi tenaga kesehatan yang belum merata antar wilayah

Solusi / Langkah Perbaikan:

Upaya langkah perbaikan pencapaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah:

- **Analisis Kebutuhan Pelatihan Berbasis Data**
 - Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas SDM kesehatan
 - Memetakan ketidakseimbangan antara jumlah/kompetensi tenaga kesehatan dengan kebutuhan layanan di lapangan, terutama daerah terpencil.
 - Menerapkan sistem informasi untuk memproyeksikan kebutuhan jangka panjang
 - **Perancangan Program Pelatihan Terintegrasi**
 - Mengembangkan kurikulum pelatihan yang relevan dan berbasis kompetensi.
 - Menyelenggarakan workshop dan pelatihan khusus, seperti peningkatan kapasitas melalui workshop aplikasi.
 - Mendorong pendidikan formal dan berkelanjutan.
 - Penugasan tenaga medis ke daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
 - Penerapan teknologi digital dalam layanan dan pelatihan.
 - **Pengembangan Lingkungan Kerja**
 - Pemberian insentif dan penghargaan yang sesuai (*reward*).
 - Perbaikan infrastruktur fasilitas kesehatan (puskesmas/rumah sakit) untuk mendukung kerja.
 - Fokus pada pengembangan karier dan manajemen talenta
- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan capaian 83%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

- Penguatan paradigma sehat yang fokus pada upaya preventif dan promotif, serta perluasan cakupan Jaminan Kesehatan untuk memastikan aksesibilitas layanan
- Ketersediaan dan pemenuhan sarana-prasarana Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya sesuai standar akreditasi
- Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai serta terdistribusi dengan baik, termasuk pelatihan berkelanjutan
- Kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat
- Penggunaan strategi komunikasi kesehatan yang efektif dan pendekatan keluarga (seperti PIS-PK) untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

Faktor Penghambat:

- Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan kompetensi yang belum merata
- Pengelolaan dana operasional (seperti APBN) yang tidak optimal di faskes/puskesmas
- Lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya penerapan teknologi
- Sarana dan prasarana di faskes belum memenuhi standar akreditasi
- Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat.

Solusi / Langkah Perbaikan:

Peningkatan Akses dan Sarana

- Memperluas jaringan Puskesmas dan meningkatkan standar sarana-prasarana (alkes/obat) agar sesuai standar akreditasi.
- Mengaktifkan pelayanan luar gedung (posyandu, posbindu) untuk deteksi dini penyakit.

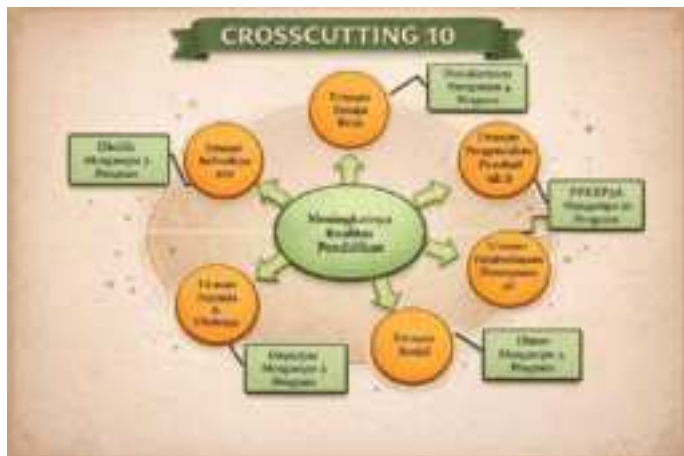
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengatasi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) dengan pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi (pelatihan).

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kab. Paser Tahun 2021-2026 tidak bersifat crosscutting, seluruh program pendukung yang berkaitan dengan sasaran tersebut seluruhnya terkait langsung dengan urusan Kesehatan.

10. **Sasaran 10 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** didukung dengan 2 indikator yaitu *Angka Kemiskinan* dan *Tingkat Pengangguran Terbuka* dengan rata-rata capaian sebesar **100,33 % (Sangat Tinggi)** Pencapaian tersebut didukung melalui 27 program dengan rata – rata capaian program sebesar **91,29%**. Program-program tersebut yaitu:

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program perlindungan dan jaminan sosial
4. Program penanganan bencana
5. Program pengelolaan taman makam pahlawan
6. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja rogram perencanaan tenaga kerja
7. Program penempatan tenaga kerja



8. Program hubungan industrial
9. Program pengendalian penduduk
10. Program pembinaan keluarga berencana (kb)
11. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)
12. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
13. Program perlindungan perempuan
14. Program peningkatan kualitas keluarga
15. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
16. Program pemenuhan hak anak (pha)
17. Program perlindungan khusus anak
18. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
19. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
20. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
21. Program pengembangan kebudayaan
22. Program pengembangan kesenian tradisional.
23. Program pembinaan sejarah
24. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
25. Program pengelolaan permuseuman
26. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
27. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

❖ Program dengan capaian tertinggi adalah **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** sebesar 100 %, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

- Tingginya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, kebutuhan ekonomi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok.
- Kesadaran akan pentingnya meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan.

Faktor Penghambat:

- Rendahnya kesadaran dan partisipasi warga untuk aktif dalam kegiatan pemberdayaan
- Masyarakat kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan.
- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan pemberdayaan, terutama bagi perempuan
- Masih adanya keraguan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Solusi / Langkah Perbaikan:

- Memetakan kebutuhan spesifik keluarga dan memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya yang ada agar program lebih mudah diterima dan tepat sasaran.
 - Memberikan pelatihan vokasional, literasi keuangan, dan keterampilan wirausaha secara konsisten untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
 - Mempermudah akses informasi mengenai kesehatan, gizi, dan teknologi produksi yang mendukung usaha keluarga
 - Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi kekurangan, memastikan program berjalan sesuai tujuan pemberdayaan.
- ❖ Sedangkan program dengan capaian terendah yaitu **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** dengan capaian 74,37%, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

Faktor pendorong pencapaian kinerja program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan adalah:

- Fokus pada pembinaan intensif untuk menghasilkan atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
- Penguatan organisasi olahraga, pengelola sarana, dan pelatihan tenaga keolahragaan agar sistem manajemen olahraga lebih efektif.
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang olahraga serta promosi gaya hidup sehat (SDGs)

Faktor Penghambat:

Adapun yang menjadi penghambat pencapaian kinerja yaitu:

- Kurangnya tenaga ahli yang peduli, kompeten, dan memiliki komitmen dalam pembinaan serta pengelolaan olahraga
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat fasilitas dan mengikuti program yang tersedia.
- Perlunya dukungan peningkatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Solusi / Langkah Perbaikan:

Langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain yaitu:

- Fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) untuk mengukur keberhasilan budaya olahraga dan prestasi.
- Melakukan pembinaan intensif untuk meningkatkan prestasi atlet
- Melaksanakan Workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dan insan olahraga.

Sasaran strategis **Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat** yang didukung 27 program bersifat *crosscutting* dengan 7 Urusan, yaitu urusan Tenaga Kerja, Pengendalian penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan dengan 5 Perangkat Daerah pegampu, seperti pada *Tabel Crosscutting 10*.

3.7 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL KINERJA

Pengukuran Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya hanya dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja ($\geq 100\%$)

Tabel 3.22
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025						Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Eko nomi Lokal/Non Tambang	3,80	10,76	283,16	159.306.325.902	151.519.582.108	95,11	188,05
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi danmakan minum)	15,85	17,07	107,70	37.550.912.303	32.934.682.024	87,71	19,99
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	63,4	61,96	97,73	2.001.494.758.537	1.923.884.809.382	96,12	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83	80,996	97,59	16.459.57 0.666	15.563.066.217	94,55	-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	85	89,52	105,32	27.079.725.938	23.831.167.238	88,00	17,32
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	10	17	30	22.580.862.487	20.118.748.354	89,10	-
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	7	100	1.445.361.602.133	1.351.713.995.309	93,52	6,48

**Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025						Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %	
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,47	47,875	66,06	2.095.643.200	2.077.301.757	99,12	-
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,72	80,15	100,54	131.521.031.640	110.751.658.066	84,21	16,33
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	185	187,98	98,39	2.951.659.113	2.861.146.359	96,93	-
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,59	13,39	98,53	243.542.857.695	216.916.677.634,40	89,07	-
		Rata-rata Lama Sekolah	9,09	9,04	99,45	7.019.813.808	4.441.378.145	97,70	-
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,30	74,39	100,12	204.983.963.713	177.135.277.283	86,41	13,71
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,38	8,13	103	3.932.169.689	3.395.659.131	86,36	16,64
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,4	4,62	95	257.207.525.789	198.234.875.057	77,07	-

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025

Realisasi anggaran per program Tahun 2025 yang menunjang sasaran strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Realisasi anggaran per program yang menunjang sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian					
		Pertumbuhan Sektor ekonomi lokal /non tambang		7.358.722.934	6.451.505.589	87,67
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	164.381.556.802	160.637.011.697	97,72
			Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian	2.509.123.886	1.852.629.083	73,84
			Program Perekonomian dan Pembangunan	6.418.242.622	997.801.582	91,85
			Program Penyuluhan Pertanian	5.295.052.880	4.443.651.969	83,92
			Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	389.329.426	389.136.245	99,95
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.065.340.440	10.554.849.300	95,39
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.674.230.362	5.355.950.846	94,39
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	246.267.940	242.336.005	98,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Perikanan			
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.138.712.686	2.067.059.218	96,65
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.495.459.664	4.224.409.349	94
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.438.736.317	2.160.650.135	88,60
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	588.250.000	552.225.800	93,88
			Program Perencanaan & Pembangunan Industri	2.665.312.546	2.438.543.988	91
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	167.351.000	165.151.226	99
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	985.552.192	894.934.332	90,8
			Program Promosi Penanaman modal	559.162.511	540.074.678	96,6
			Program Pelayanan Penanaman Modal	1.597.072.035	1.368.155.498	85,7
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	485.455.584	461.137.409	95

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Modal			
			Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	134.492.154	117.349.130	87
Jumlah				159.306.325.902	151.519.582.108	95,11
Rata-rata bobot capaian						
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisata					
		Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.600.513.386	6.932.235.291,23	91,21
			Program Pemasaran Pariwisata	3.294.852.742	3.205.158.534	97,28
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	2.871.432.566	2.315.153.898	80,63
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.080.014.521	881.284.127	81,60
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10.355.261.995	9.254.056.456	89
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	401.420.006	394.085.595	98
			Program Pengembangan	178.490.000	126.350.140	71

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Eksport			
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	939.302.749	866.198.424	92
			Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	548.022.740	504.338.389	92
			Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	251.061.000	157.012.315	63
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.149.205.459	1.195.618.422	56
			Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	1.591.543.487	1.274.449.093	80
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	638.148.000	585.488.726	92
			Program Pengembangan UMKM	5.651.643.652	5.243.252.614	93
Jumlah				37.550.912.303	32.934.682.024	87,71
Rata-ratabobot capaian						84,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					
		Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.427.911.289.122	1.391.296.792.111	97,44

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	45.064.244.654	42.450.460.974,40	94,20
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.115.038.674	2.680.932.937	86,06
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.331.578.740	4.198.780.000	96,93
			Program Kepegawaian Daerah	5.836.319.736	4.953.192.108	84,87
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.094.837.985	2.741.981.650	88,60
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.644.998.769	26.570.632.848	92,76
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.095.170.528	6.381.985.007	89,95
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	466.331.335.848	434.472.957.707	93,17
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.878.014.521	4.006.361.098	92,13
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	2.553.099.838	1.646.207.805	64,48

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			dan Asistensi			
			Program Pengelolaan Arsip	541.088.009	534.825.990	98,84
			Program Perlindungan & Penyelamatan Arsip	678.908.580	668.022.091	98,40
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	260.722.647	256.031.680	98,20
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	509.852.221	492.212.949	97
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	225.204.500	220.790.358	98
			Program Penataan Desa	227.836.482	164.063.620	72
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	195.217.683	148.578.449	76,11
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.095.170.528	6.381.985.007	89,95
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Program Penelitian & Pengembangan Daerah	6.502.713.872	6.076.795.669	93,45
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.604.579.614	6.194.026.965	93,78
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.352.277.180	3.292.243.583	98,21
Jumlah				2.017.954.329.203	1.939.447.875.599	96,11
Rata-rata bobot capaian						90,20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
		Nilai IKM Daerah	Program Pendaftaran Penduduk	319.891.975	295.186.784	92
			Program Pencatatan Sipil	238.620.075	227.831.864	95
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	164.916.400	149.925.786	90,91
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.831.555.667	5.176.013.234	89
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.668.837.193	10.434.145.139	82
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.306.310.762	6.076.429.211	96,35
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	80.616.000	80.462.250	100
Jumlah				27.079.725.938	23.831.167.238	88,00
Rata-rata bobot capaian						92,58
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif					
		Angka Kriminalitas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.733.817.946	5.554.219.860	96,87
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.173.627.788	4.066.425.299	79

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.434.660.433	3.250.069.260	94,63
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.341.078.759	2.339.934.195	99,95
			Program Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	356.455.379	353.550.702	99,19
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.185.419.812	774.748.767	65,36
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.088.608.728	1.553.835.495	74,40
Jumlah				22.580.862.487	20.118.748.354	89,10
Rata-rata bobot capaian						88,40
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur					
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Penyelenggaraan Jalan	580.363.193.936	529.406.673.834	91,22

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	41.620.893.490	37.548.307.237	90,22
			Program Penataan Bangunan Gedung	260.201.612.744	243.920.785.931	93,74
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.746.087.289	2.708.987.903	98,65
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	129.087.706.289	123.742.118.957	95,86
			Program Pengembangan perumahan	2.479.664.131	2.178.821.419	87,87
			Program Kawasan Permukiman	7.975.576.590	7.811.840.886	97,95
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	9.829.163.202	9.755.728.197	99,25
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (PSU)	289.856.224.588	281.675.033.589	97,18
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	91.928.814.816	86.011.938.833	93,56
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.627.451.896	8.249.327.594	95,62

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.873.269.745	17.977.526.370	90,46
			Program Pengelolaan Pelayaran	2.399.964.566	2.347.051.565	97,80
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	321.193.212	294.211.354	91,60
			Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	152.648.770	143.489.500	94,00
			Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	264.330.791	252.251.752	95,43
Jumlah				1.445.361.602.133	1.351.713.995.309	93,52
Rata-rata bobot capaian						94,31
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana					
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.095.643.200	2.077.301.757	99,12
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	783.810.400	782.516.100	99,38
			Program Pengendalian Pencemaran &/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.276.874.741	3.218.825.725	98,23
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) &	130.810.368	130.749.800	99,95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	236.172.900,00	234.174.800	99,15
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	273.712.018	264.832.700	96,76
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.315.426.166,	4.918.695.032	92,54
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	16.894.000	16.442.400	97,33
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	22.062.000	21.414.705	97,07
			Program	108.394.250	105.992.200	97,78

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
			Program Pengelolaan Persampahan	37.200.827.568	36.360.496.865	97,74
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya	3.278.882.217	2.715.611.406	82,82
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	30.471.566.806	28.078.815.846	92,15
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	377.217.912	328.079.266	86,97
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49.497.782.794	33.101.484.720	66,87
			Program Penetapan Tanah Ulayat	47.100.000	27.337.000	58,04
			Program Penatagunaan Tanah	483.497.500	446.189.500	92,28
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	2.951.659.113	2.861.146.359	97
Jumlah				136.568.333.953	115.690.106.181	84,71
Rata-rata bobot capaian						91,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan					
		Angka Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	243.542.857.695	216.916.677.634	89
		Rata-rata lama Sekolah	Program Pengembangan Kurikulum	1.427.658.176	849.802.989	60
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.602.112.152	1.064.153.400	41
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	43.632.000	23.348.000	54
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	341.425.412	337.253.948	99
			Program Pembinaan Perpustakaan	2.522.759.834	2.086.482.966	82,71
			Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno	82.226.234	80.336.842	97,70
Jumlah				250.562.671.503	221.358.055.779	88,34
Rata-rata bobot capaian						74,60
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
		Umur Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	182.362.853.140	155.125.845.925	85,06
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	22.032.657.453	21.498.232.328	97,57

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Kesehatan			
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	25.030.000	24.350.038	97
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	563.423.120	486.848.992,00	86,41
Jumlah				204.983.963.713	177.135.277.283	86,41
Rata-rata bobot capaian						91,58
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat					
		Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	337.801.020	287.898.073	89,96
			Program Rehabilitasi Sosial	2.347.836.927	2.154.998.480	91,79
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	941.749.573	716.862.941	76,12
			Program Penanganan Bencana	761.327.071	631.704.268	82,97
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	291.481.529	276.201.047	94,76
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	157.430.150	155.966.299	99,07
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.168.695.212	10.514.569.699	94,14
			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.259.540.156	1.210.310.623	96,09
			Program Hubungan Industrial	11.291.822.427	9.102.748.104	80,61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengendalian Penduduk	920.838.057	899.921.501	98
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.663.211.970	2.233.823.379	83,88
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.630.297.259	1.625.393.576	100
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	261.601.246	259.343.191	99,14
			Program Perlindungan Perempuan	60.714.362	59.307.648	98
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	183.065.098	181.232.400	99
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	52.169.250	51.261.890	98,26
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	262.489.967	259.323.350	99
			Program Perlindungan Khusus Anak	452.653.750	439.832.766	97,17
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.441.686.510	1.823.959.539	74,70
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	210.199.494.188	156.322.343.198	74,37

Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Keolahragaan			
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000	1.043.642.700	99,39
			Program Pengembangan Kebudayaan	458.813.221	365.192.295	80
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.489.149.905	1.273.634.705	86
			Program Pembinaan Sejarah	3.246.164.041	3.181.694.711	98
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	66.224.000	62.177.150	94
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.102.073.510	992.417.112	90
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.866.999.048	8.689.072.117	97,99
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.829.853.199	3.310.938.642	86,45
Jumlah :				261.139.695.478	201.630.534.188	77,21
Rata-rata bobot capaian						91,14

Total APBD Perubahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 4.937.617.900.000,00,-** (Empat triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar **Rp.**

4.567.332.218.226,00,-. (*Empat triliun lima ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*).

Anggaran tersebut merupakan anggaran program/kegiatan yang fokus pada pencapaian kinerja sasaran strategis beserta indikatornya atau program/kegiatan yang bersifat teknis.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan / atau sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Paser. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan periode terakhir dari RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Paser.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Paser :

A. Komponen Perencanaan Kinerja

Yaitu perbaikan perencanaan tahunan berikutnya dengan memperhatikan informasi kinerja pada laporan kinerja dengan melakukan perbaikan target pada perjanjian kinerja. Rekomendasi Kementerian PANRB pada aspek perencanaan kinerja menjadi acuan/bahan masukan pada penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJMD/Renstra) periode yang baru dilengkapi dengan pohon kinerja.

B. Komponen Pengukuran Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan informasi tambahan berkaitan dengan definisi operasional dan penjelasan atas kondisi kerja level sasaran dan relevansi indikator kinerja terhadap kinerja sasaran yang diwujudkan. Mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi pada Perangkat Daerah agar menyampaikan capaian kinerjanya secara berkala.

C. Komponen Pelaporan Kinerja

Melakukan asistensi dalam rangka penguatan pada BAB III , yang meliputi 7 data/informasi yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative efisiensi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .

Selain itu Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penguatan SAKIP melalui peningkatan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis/*Workshop*.

D. Komponen Evaluasi Kinerja

Anantara lain peningkatan kapasitas APIP melalui Bimbingan Teknis dan *Workshop* SAKIP, penyusunan pedoman evaluasi SAKIP dan perbaikan Aplikasi SAKIP pada komponen penilaian .

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2025



(0543) 21150



www.paserkab.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tana Paser, Januari 2025


BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	1.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal / Non Tambang	Angka	7,68
2.	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	2.	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Angka	2,51
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3.	Nilai SAKIP	Nilai	65
		4.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	85
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.	Nilai IKM Daerah	Nilai	86
5.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusi	6.	Angka Krmininalitas	Angka	10
6.	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	7.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	8.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	72,47
		9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,72
		10.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	190
8.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11.	Angka Harapan Sekolah	Angka	13,59
		12.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata	9,15
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Umur Harapan Hidup	Angka	74
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	14.	Angka Kemiskinan	Angka	8,5
		15.	Tingkat Pengangguran terbuka	Angka	4,50

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	265.784.135.574,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.271.355.428,00
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7.812.829.800,00
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	356.425.800,00
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	250.000.000,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	197.425.042.049,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.185.842.853,00
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	50.000.000,00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.812.495.000,00
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	139.738.266.600,00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	298.044.800.000,00
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.000.000.000,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	31.842.773.332,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	35.141.502.000,00
15	Program Penataan Bangunan Gedung	239.787.454.899,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	551.964.286.185,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.043.224.000,00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.687.680.000,00
19	Program Pengembangan Perumahan	9.716.585.200,00
20	Program Kawasan Permukiman	13.783.200.000,00
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	15.636.000.000,00
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	453.873.866.000,00
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.610.349.000,00
24	Program Penanggulangan Bencana	6.939.137.620,00
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.318.824.060,00
26	Program Pemberdayaan Sosial	384.562.270,00
27	Program Rehabilitasi Sosial	7.729.659.288,00
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	949.515.700,00
29	Program Penanganan Bencana	1.433.102.500,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	157.910.700,00
31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	212.660.300,00
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.098.172.610,00
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.652.887.834,00
34	Program Hubungan Industrial	12.042.057.290,00
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	630.461.751,00
36	Program Perlindungan Perempuan	113.026.207,00
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	108.319.800,00
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	11.162.000,00
39	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	353.318.900,00
40	Program Perlindungan Khusus Anak	448.405.000,00
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.996.676.400,00
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.600.153.250,00
43	Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.284.035.282,00
44	Program Pengawasan Keamanan Pangan	573.600.000,00
45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	349.600.000,00
46	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	48.218.262.000,00
47	Program Penetapan Tanah Ulayat	82.850.000,00
48	Program Penatagunaan Tanah	426.070.000,00
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	588.696.400,00
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.043.382.958,00
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.984.678.359,00
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	138.953.136,00
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	183.795.800,00
54	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.164.000,00
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	225.170.400,00
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.898.250,00
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	178.252.000,00
58	Program Pengelolaan Persampahan	29.897.681.551,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
59	Program Pendaftaran Penduduk	271.815.975,00
60	Program Pencatatan Sipil	188.710.000,00
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.170.471.251,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	164.916.400,00
63	Program Penataan Desa	316.601.500,00
64	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	147.060.500,00
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.745.707.624,00
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.612.377.140,00
67	Program Pengendalian Penduduk	811.748.596,00
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.798.584.000,00
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.643.944.700,00
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	12.308.956.152,00
71	Program Pengelolaan Pelayaran	4.438.642.180,00
72	Program Pengelolaan Perkeretaapian	75.000.000,00
73	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.339.084.135,00
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.044.959.127,00
75	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	134.996.686,00
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	664.996.686,00
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.622.196.686,00
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	623.128.554,00
79	Program Pengembangan Umkm	3.411.282.837,00
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.335.551.731,00
81	Program Promosi Penanaman Modal	732.000.000,00
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.887.108.633,00
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	619.150.632,00
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	205.259.154,00
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.310.212.900,00
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	172.422.000.396,00
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000,00
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	497.232.085,00
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	198.011.400,00
90	Program Pengembangan Kebudayaan	525.000.000,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.209.660.000,00
92	Program Pembinaan Sejarah	595.000.000,00
93	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	66.224.000,00
94	Program Pengelolaan Permuseuman	886.065.000,00
95	Program Pembinaan Perpustakaan	2.422.730.039,00
96	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	150.927.268,00
97	Program Pengelolaan Arsip	696.625.621,00
98	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	999.203.024,00
99	Program Perizinan Penggunaan Arsip	577.381.678,00
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.323.561.392,00
101	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.565.910.702,00
102	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	35.000.000,00
103	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.135.481.596,00
104	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.996.149.546,00
105	Program Pemasaran Pariwisata	1.702.396.566,00
106	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.619.978.200,00
107	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.225.000.000,00
108	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.342.006.855,00
109	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	251.706.613.260,00
110	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.491.963.715,00
111	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.056.072.678,00
112	Program Perizinan Usaha Pertanian	577.381.678,00
113	Program Penyuluhan Pertanian	5.702.618.800,00
114	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	3.832.842.217,00
115	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	198.884.690,00
116	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.292.527.180,00
117	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	975.988.680,00
118	Program Pengembangan Ekspor	278.884.690,00
119	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.287.358.794,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
120	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	584.737.660,00
121	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.927.005.096,00
122	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	411.863.280,00
123	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	182.836.220,00
124	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	257.007.540,00
125	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	420.999.700,00
126	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	35.365.436.783,00
127	Program Perekonomian Dan Pembangunan	5.826.151.386,00
128	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	32.485.644.232,00
129	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.922.322.050,00
130	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.098.976.709,00
131	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	466.152.432.820,00
132	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.088.684.000,00
133	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.282.152.992,00
134	Program Kepegawaian Daerah	5.676.143.360,00
135	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.102.466.500,00
136	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.365.676.200,00
137	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.245.972.323,00
138	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.587.421.586,00
139	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.761.215.314,00
140	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.158.395.086,00
141	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.679.268.309,00
142	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.312.270.305,00
143	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.206.123.696,00
144	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	2.284.753.229,00
145	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.655.851.490,00
146	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	356.961.800,00
147	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.489.817.770,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
148	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.396.097.769,00
149	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.691.619.386.680,00
TOTAL		5.395.414.434.750,00

Tana Paser, Januari 2025


BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

**PENJELASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja Sasaran 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian, dengan sasaran ini, diharapkan sektor pertanian dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan pangan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sektor ekonomi non-tambang, khususnya pertanian, tidak hanya tumbuh secara mandiri tetapi juga memberikan efek berganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal	1. sektor pertanian berpotensi besar sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Melalui peningkatan efek berganda sektor pertanian, ekonomi daerah dapat tumbuh lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap gejolak global. 2. Pertumbuhan sektor ekonomi non-tambang melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal, baik dalam skala kecil maupun menengah, serta fokus pada sektor lokal memungkinkan masyarakat untuk menikmati manfaat langsung dari pembangunan ekonomi 3. Sumber daya tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga pengembangan sektor ekonomi lokal seperti pertanian menjadi solusi jangka panjang	$\frac{\Sigma \text{Kontribusi PDRB Sektor pertanian perkebunan}}{\Sigma \text{PDRB}} \times 100$	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	7,68	Target Indikator kinerja Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 7,68, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 5,41 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 2

Uraian Sasaran

Berkembangnya Sektor Kepariwisata, dengan sasaran ini, diharapkan untuk Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD), dan tersedianya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta terciptanya destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Uraian ini mencakup langkah strategis dan tujuan yang selaras dengan visi pembangunan daerah, dengan menempatkan sektor kepariwisataan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (hospitality sector) merupakan elemen penting dalam mendukung perkembangan sektor kepariwisataan. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dengan memberikan layanan yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing.	1. Kenyamanan Wisatawan: Fasilitas akomodasi yang nyaman dan kuliner yang menarik meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta kepuasan wisatawan. 2. Peningkatan Citra Daerah: Pelayanan yang unggul pada sektor ini berkontribusi pada reputasi positif destinasi wisata, sehingga menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. 3. Dengan fokus pada pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum, daerah dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat nasional	Pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Restoran dan Rumah Makan dalam satu tahun	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	2,51	Target Indikator kinerja Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,51 sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 21,75, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas layanan, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, yang tercermin dari perbaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten.	1. Dengan fokus pada indikator nilai SAKIP, pemerintah kabupaten dapat memantau dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien	1. Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN-RB	1. Bappedalitbang, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

2.	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Sasaran ini diukur melalui peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) , yang mencerminkan kinerja pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan	2. Dengan fokus pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah , pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara sistematis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif.	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui dimensi meliputi : a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Penyerapan anggaran; e. Kondisi keuangan daerah; dan f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.	2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
----	---	---	--	-----------------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Nilai SAKIP	1. 65	1. Target Indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 65, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 64,50 (B) dengan realisasi 61,38 (B) dengan capaian 95,16%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	2. 85	2. Target Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 81 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan layanan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sasaran ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Dengan fokus pada peningkatan nilai IKM, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Nilai IKM daerah meningkat, mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah	Jumlah Nilai Rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survei IKM	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Nilai IKM Daerah	86	Target Indikator kinerja Nilai IKM Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 86 melebihi target pada RKPD untuk tahun 2025 yaitu sebesar 85, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 86 dengan realisasi 86,27 dengan capaian 100,31%, melebihi target yang tentukan, sehingga diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya

Penjelasan Kinerja Sasaran 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang mendukung pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, dan investasi. Lingkungan yang kondusif juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan program pemerintah serta kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Dengan lingkungan yang kondusif, pemerintah daerah dapat memastikan kelancaran program pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menarik lebih banyak investasi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan lingkungan daerah yang kondusif bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui penurunan angka kriminalitas. Sasaran ini juga mendukung stabilitas sosial, keamanan, dan pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kepercayaan terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.	$\frac{\Sigma \text{ Tindak Kriminal dalam 1 Tahun}}{\Sigma \text{ Penduduk}} \times 100.000$	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Angka Kriminalitas	10	Target Indikator kinerja Angka kriminalitas pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 10, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 50, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 6

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menyediakan fasilitas dasar yang memadai, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pemerintah daerah dapat memantau efektivitas program peningkatan infrastruktur sekaligus memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi ekspektasi masyarakat secara optimal.	Memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) digunakan sebagai ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah	Survei Kepuasan Layanan Insfrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : 1. Ketersediaan fisik (availability) 2. Kualitas Fisik (quality) 3. Kesesuaian (appropriateness) 4. Efektifitas pemanfaatan (utility) 5. Penyerapan tenaga kerja (job creation) 6. Kontribusi pada perekonomian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	Target Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 7 sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 7 dengan realisasi 7 dengan capaian 100%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian dapat mencapai target seperti tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 7

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi masyarakat. Hal ini juga berfokus pada pengelolaan ruang yang terencana dan berkelanjutan serta kesiapsiagaan terhadap bencana alam atau non-alam yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang yang baik, dan penanggulangan bencana yang efektif, diharapkan dapat tercipta daerah yang nyaman dan aman untuk dihuni, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Upaya memperbaiki kualitas pengelolaan ruang dan lingkungan di wilayah daerah kabupaten paser serta mengukur sejauh mana perencanaan dan pengelolaan ruang dilakukan dengan baik, terintegrasi, dan memperhatikan potensi risiko bencana serta keberlanjutan ekosistem.	1. Dengan fokus pada Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) , pemerintah daerah dapat mengukur dan memastikan bahwa penataan ruang dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko bencana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, dan mitigasi perubahan iklim. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup berdasarkan aspek utama seperti kualitas air, udara, tutupan	2. Dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi keberhasilan program lingkungan hidup secara terukur. Hal ini mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ Dimana : IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

	lahan, dan kondisi ekosistem lainnya. Peningkatan IKLH mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	masyarakat		
3	Menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang yang adaptif, dan pengelolaan risiko bencana yang komprehensif. Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan kombinasi faktor seperti bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), kapasitas adaptasi (adaptive capacity), dan elemen resiko (exposure). Penurunan nilai IRB mencerminkan keberhasilan dalam mitigasi risiko bencana dan perlindungan terhadap dampak bencana bagi masyarakat dan lingkungan.	3. Dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai indikator, pemerintah daerah dapat secara terukur mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program mitigasi bencana. Indikator ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi wilayah sehingga langkah-langkah pengelolaan risiko bencana dapat disusun secara strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.	$IRB = R = H \times V E / C$ <i>R : Risiko. Pengertian risiko : Risiko adalah peluang untuk rugi</i> <i>Risiko adalah kemungkinan kehilangan Risiko adalah ketidakpastian Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan</i> <i>V : Vulnerability (kerentanan) H : Hazar (Bahaya) E : Elemen berisiko C : Capacity (Kapasitas)</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang;	1. 72,47	Target Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 72,47, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 65,82 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	2. 79,72	Target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 79,72, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 72,40, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Indeks Resiko Bencana (IRB).	3. 190	Target Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 190, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 194,5 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 8

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global, serta pemerintah daerah dapat menciptakan SDM unggul yang menjadi fondasi untuk pembangunan daerah yang lebih maju dan kompetitif.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	1. Meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan di suatu daerah, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang terdidik dan kompeten. Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Angka Harapan Lama Sekolah , yang mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak di usia tertentu.	1. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah adalah indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan strategi yang terintegrasi mulai dari peningkatan akses, mutu, hingga kesadaran masyarakat akan pendidikan, sasaran peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai, sehingga memberikan kontribusi nyata pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.	$HLS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ Dimana : HLS'_a = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t E'_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pd tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	2. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, baik dari sisi aksesibilitas maupun mutu pendidikan. Salah satu indikator utama untuk mengukur	2. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Strategi yang fokus pada peningkatan akses, mutu	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	2. Badan Pusat Statistik (BPS)

	keberhasilan sasaran ini adalah Rata-rata Lama Sekolah , yang menggambarkan jumlah tahun rata-rata pendidikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan masyarakat secara umum, sekaligus menjadi cerminan dari keberhasilan kebijakan dan program pendidikan daerah.	pendidikan, pengurangan putus sekolah, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong peningkatan RLS. Sasaran ini tidak hanya mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga berdampak pada kemajuan ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia di tingkat daerah		
--	---	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Angka Harapan Lama Sekolah	1. 13,59	1. Target Indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,59 , sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 13,35 dengan realisasi 13,38 dengan capaian 100,22%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Rata-rata Lama Sekolah	2. 9,15	2. Target Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 9,15, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 8,80 dengan realisasi 8,92 dengan capaian 100,22%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 9

Uraian Sasaran

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran ini, diharapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan gizi, dan pengendalian faktor risiko kesehatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia	Umur Harapan Hidup digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan status kesehatan mereka selama hidup. Umur Harapan Hidup menggambarkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi bahwa pola mortalitas tetap konstan sepanjang hidupnya.	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser $\text{Jumlah penduduk} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Umur Harapan Hidup	74	Target Indikator kinerja Umur Harapan Hidup pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 74, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 73,10 dengan realisasi 74,1 dengan capaian 101,37%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 10

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran ini, diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup, dan kemandirian masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak, produktif, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pengurangan angka kemiskinan.	1. Angka Kemiskinan adalah indikator utama yang mencerminkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan mengacu pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu parameter keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left \frac{z - y_i}{z} \right ^a$ Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), $y_i < z$ q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka	2. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja yang layak dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Angka Kemiskinan	1. 8,5	1. Target Indikator kinerja Angka Kemiskinan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,5, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 9,00 dengan realisasi 8,63 dengan capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 0,37 dari target yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2. 4,50	2. Target Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,50, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 3,94 dengan realisasi 4,53 dengan capaian kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,59 dari target yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.



DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

"Olo Manin Aso Buen Siolondo"

Hari esok lebih baik dari hari ini





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tana Paser, Oktober 2025

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	1.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal / Non Tambang	Angka	3,80
2.	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	2.	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Angka	15,85
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3.	Nilai SAKIP	Nilai	63,40
		4.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	83
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.	Nilai IKM Daerah	Nilai	85
5.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusi	6.	Angka Krmininalitas	Angka	10
6.	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	7.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	8.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	72,47
		9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,72
		10.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	185,00
8.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11.	Angka Harapan Sekolah	Angka	13,59
		12.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata	9,09
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Umur Harapan Hidup	Angka	74,30
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	14.	Angka Kemiskinan	Angka	8,38
		15.	Tingkat Pengangguran terbuka	Angka	4,40

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	243.542.857.695,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	1.427.658.176,00
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.602.112.152,00
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	43.632.000,00
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	341.425.412,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	183.140.024.449,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.032.657.453,00
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	25.030.000,00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	563.423.120,00
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	129.087.706.289,00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	91.928.814.816,00
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	30.471.566.806,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.627.451.896,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	41.620.893.490,00
15	Program Penataan Bangunan Gedung	260.201.612.744,00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	579.328.478.497,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.746.087.289,00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.095.643.200,00
19	Program Pengembangan Perumahan	2.479.664.131,00
20	Program Kawasan Permukiman	7.975.576.590,00
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	9.829.163.202,00
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	289.856.224.588,00
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.733.817.946,00'

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
24	Program Penanggulangan Bencana	2.951.659.113,00
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.173.627.788,00
26	Program Pemberdayaan Sosial	337.801.020,00
27	Program Rehabilitasi Sosial	1.599.810.496,00
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	941.749.573,00
29	Program Penanganan Bencana	761.327.071,00
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	291.481.529,00
31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	157.430.150,00
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.168.695.212,00
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.259.540.156,00
34	Program Hubungan Industrial	11.291.822.427,00
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	261.601.246,00
36	Program Perlindungan Perempuan	60.714.362,00
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	183.065.098,00
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	52.169.250,00
39	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	262.489.967,00
40	Program Perlindungan Khusus Anak	200.000.000,00
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.393.226.414,00
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.495.459.664,00
43	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.438.736.317,00
44	Program Pengawasan Keamanan Pangan	588.250.000,00
45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	377.217.912,00
46	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49.497.782.794,00
47	Program Penetapan Tanah Ulayat	47.100.000,00
48	Program Penatagunaan Tanah	483.497.500,00
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	783.810.400,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.276.874.741,00
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.315.426.166,00
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	130.810.368,00
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	236.172.900,00
54	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	16.894.000,00
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	273.712.018,00
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	22.062.000,00
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	108.394.250,00
58	Program Pengelolaan Persampahan	37.200.827.568,00
59	Program Pendaftaran Penduduk	319.891.975,00
60	Program Pencatatan Sipil	238.620.075,00
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.468.977.866,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	164.916.400,00
63	Program Penataan Desa	227.836.482,00
64	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	195.217.683,00
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.095.170.528,00
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.829.853.199,00
67	Program Pengendalian Penduduk	920.838.057,00
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.663.211.970,00
69	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.630.297.259,00
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.846.485.123,00
71	Program Pengelolaan Pelayaran	2.042.770.705,00
72	Program Pengelolaan Perkeretaapian	52.500.000,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
73	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5.831.555.667,00
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.668.837.193,00
75	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	251.061.000,00
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.591.543.487,00
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2.149.205.459,00
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	638.148.000,00
79	Program Pengembangan Umkm	5.651.643.652,00
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	985.552.192,00
81	Program Promosi Penanaman Modal	559.162.511,00
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.597.072.035,00
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	485.455.584,00
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	134.492.154,00
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.441.686.510,00
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	210.199.494.188,00
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000,00
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	509.852.221,00
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	225.204.500,00
90	Program Pengembangan Kebudayaan	458.813.221,00
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.489.149.905,00
92	Program Pembinaan Sejarah	3.246.164.041,00
93	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	66.224.000,00
94	Program Pengelolaan Permuseuman	1.102.073.510,00
95	Program Pembinaan Perpustakaan	2.522.759.834,00
96	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	82.226.234,00
97	Program Pengelolaan Arsip	541.088.009,00
98	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	678.908.580,00
99	Program Perizinan Penggunaan Arsip	260.722.647,00
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.065.340.440,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
101	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.674.230.362,00
102	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	246.267.940,00
103	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.138.712.686,00
104	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.600.513.386,00
105	Program Pemasaran Pariwisata	3.294.852.742,00
106	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.871.432.566,00
107	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.080.014.521,00
108	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.552.670.440,00
109	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	110.007.281.209,00
110	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.151.739.638,00
111	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.888.363.402,00
112	Program Perizinan Usaha Pertanian	389.329.426,00
113	Program Penyuluhan Pertanian	5.295.052.880,00
114	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	3.278.882.217,00
115	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	80.616.000,00
116	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10.355.261.995,00
117	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	401.420.006,00
118	Program Pengembangan Ekspor	178.490.000,00
119	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	939.302.749,00
120	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	548.022.740,00
121	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.665.312.546,00
122	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	167.351.000,00
123	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	321.193.212,00
124	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	152.648.770,00
125	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	264.330.791,00
126	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	45.064.244.654,00
127	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.387.267.062,00
128	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	28.644.998.769,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
129	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.115.038.674,00
130	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.331.578.740,00
131	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	466.331.335.848,00
132	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.604.579.614,00
133	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.352.277.180,00
134	Program Kepegawaian Daerah	5.836.319.736,00
135	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.094.837.985,00
136	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.502.713.872,00
137	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.878.014.521,00
138	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.553.099.838,00
139	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.306.310.762,00
140	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.212.192.061,00
141	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.733.817.946,00
142	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.434.660.433,00
143	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.341.078.759,00
144	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	356.455.379,00
145	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.185.419.812,00
146	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.088.608.728,00
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.427.911.289.122,00
TOTAL		4.567.332.218.226,00

Tana Paser, Oktober 2025



BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja Sasaran 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian, dengan sasaran ini, diharapkan sektor pertanian dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan pangan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sektor ekonomi non-tambang, khususnya pertanian, tidak hanya tumbuh secara mandiri tetapi juga memberikan efek berganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal	1. sektor pertanian berpotensi besar sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Melalui peningkatan efek berganda sektor pertanian, ekonomi daerah dapat tumbuh lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap gejolak global. 2. Pertumbuhan sektor ekonomi non-tambang melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal, baik dalam skala kecil maupun menengah, serta fokus pada sektor lokal memungkinkan masyarakat untuk menikmati manfaat langsung dari pembangunan ekonomi 3. Sumber daya tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga pengembangan sektor ekonomi lokal seperti pertanian menjadi solusi jangka panjang	$\frac{\Sigma \text{Kontribusi PDRB Sektor pertanian perkebunan}}{\Sigma \text{PDRB}} \times 100$	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	7,68	Target Indikator kinerja Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 7,68, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 5,41 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 2

Uraian Sasaran

Berkembangnya Sektor Kepariwisata, dengan sasaran ini, diharapkan untuk Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD), dan tersedianya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta terciptanya destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Uraian ini mencakup langkah strategis dan tujuan yang selaras dengan visi pembangunan daerah, dengan menempatkan sektor kepariwisataan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (hospitality sector) merupakan elemen penting dalam mendukung perkembangan sektor kepariwisataan. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dengan memberikan layanan yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing.	1. Kenyamanan Wisatawan: Fasilitas akomodasi yang nyaman dan kuliner yang menarik meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta kepuasan wisatawan. 2. Peningkatan Citra Daerah: Pelayanan yang unggul pada sektor ini berkontribusi pada reputasi positif destinasi wisata, sehingga menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. 3. Dengan fokus pada pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum, daerah dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat nasional	Pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Restoran dan Rumah Makan dalam satu tahun	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	2,51	Target Indikator kinerja Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,51 sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 21,75, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas layanan, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, yang tercermin dari perbaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten.	1. Dengan fokus pada indikator nilai SAKIP, pemerintah kabupaten dapat memantau dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien	1. Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN-RB	1. Bappedalitbang, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2.	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Sasaran ini diukur melalui peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) , yang mencerminkan kinerja pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan	2. Dengan fokus pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah , pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara sistematis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif.	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui dimensi meliputi : a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Penyerapan anggaran; e. Kondisi keuangan daerah; dan f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.	2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Nilai SAKIP	1. 65	1. Target Indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 65, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 64,50 (B) dengan realisasi 61,38 (B) dengan capaian 95,16%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	2. 85	2. Target Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 81 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan layanan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sasaran ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Dengan fokus pada peningkatan nilai IKM, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Nilai IKM daerah meningkat, mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah	Jumlah Nilai Rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survei IKM	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Nilai IKM Daerah	86	Target Indikator kinerja Nilai IKM Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 86 melebihi target pada RKPD untuk tahun 2025 yaitu sebesar 85, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 86 dengan realisasi 86,27 dengan capaian 100,31%, melebihi target yang tentukan, sehingga diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya

Penjelasan Kinerja Sasaran 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang mendukung pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, dan investasi. Lingkungan yang kondusif juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan program pemerintah serta kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Dengan lingkungan yang kondusif, pemerintah daerah dapat memastikan kelancaran program pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menarik lebih banyak investasi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan lingkungan daerah yang kondusif bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui penurunan angka kriminalitas. Sasaran ini juga mendukung stabilitas sosial, keamanan, dan pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kepercayaan terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.	$\frac{\Sigma \text{ Tindak Kriminal dalam 1 Tahun}}{\Sigma \text{ Penduduk}} \times 100.000$	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Angka Kriminalitas	10	Target Indikator kinerja Angka kriminalitas pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 10, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 50, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 6

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menyediakan fasilitas dasar yang memadai, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pemerintah daerah dapat memantau efektivitas program peningkatan infrastruktur sekaligus memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi ekspektasi masyarakat secara optimal.	Memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) digunakan sebagai ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah	Survei Kepuasan Layanan Insfrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : 1. Ketersediaan fisik (availability) 2. Kualitas Fisik (quality) 3. Kesesuaian (appropriateness) 4. Efektifitas pemanfaatan (utility) 5. Penyerapan tenaga kerja (job creation) 6. Kontribusi pada perekonomian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	Target Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 7 sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 7 dengan realisasi 7 dengan capaian 100%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian dapat mencapai target seperti tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 7

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi masyarakat. Hal ini juga berfokus pada pengelolaan ruang yang terencana dan berkelanjutan serta kesiapsiagaan terhadap bencana alam atau non-alam yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang yang baik, dan penanggulangan bencana yang efektif, diharapkan dapat tercipta daerah yang nyaman dan aman untuk dihuni, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Upaya memperbaiki kualitas pengelolaan ruang dan lingkungan di wilayah daerah kabupaten paser serta mengukur sejauh mana perencanaan dan pengelolaan ruang dilakukan dengan baik, terintegrasi, dan memperhatikan potensi risiko bencana serta keberlanjutan ekosistem.	1. Dengan fokus pada Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) , pemerintah daerah dapat mengukur dan memastikan bahwa penataan ruang dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko bencana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, dan mitigasi perubahan iklim. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup berdasarkan aspek utama seperti kualitas air, udara, tutupan	2. Dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi keberhasilan program lingkungan hidup secara terukur. Hal ini mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ Dimana : IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
3	lahan, dan kondisi ekosistem lainnya. Peningkatan IKLH mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang yang adaptif, dan pengelolaan risiko bencana yang komprehensif. Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan kombinasi faktor seperti bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), kapasitas adaptasi (adaptive capacity), dan elemen resiko (exposure). Penurunan nilai IRB mencerminkan keberhasilan dalam mitigasi risiko bencana dan perlindungan terhadap dampak bencana bagi masyarakat dan lingkungan.	masyarakat 3. Dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai indikator, pemerintah daerah dapat secara terukur mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program mitigasi bencana. Indikator ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi wilayah sehingga langkah-langkah pengelolaan risiko bencana dapat disusun secara strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.	IRB = R = H x V E / C <i>R : Risiko. Pengertian risiko : Risiko adalah peluang untuk rugi</i> <i>Risiko adalah kemungkinan kehilangan Risiko adalah ketidakpastian Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan</i> <i>V : Vulnerability (kerentanan) H : Hazar (Bahaya) E : Elemen berisiko C : Capacity (Kapasitas)</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang;	1. 72,47	Target Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 72,47, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 65,82 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	2. 79,72	Target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 79,72, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 72,40, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Indeks Resiko Bencana (IRB).	3. 190	Target Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 190, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 194,5 diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 8

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan sasaran ini, diharapkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global, serta pemerintah daerah dapat menciptakan SDM unggul yang menjadi fondasi untuk pembangunan daerah yang lebih maju dan kompetitif.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	1. Meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan di suatu daerah, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang terdidik dan kompeten. Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Angka Harapan Lama Sekolah , yang mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak di usia tertentu.	1. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah adalah indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan strategi yang terintegrasi mulai dari peningkatan akses, mutu, hingga kesadaran masyarakat akan pendidikan, sasaran peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai, sehingga memberikan kontribusi nyata pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.	$HLS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ Dimana : HLS'_a = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t E'_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pd tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	2. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, baik dari sisi aksesibilitas maupun mutu pendidikan. Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Rata-rata Lama Sekolah , yang menggambarkan jumlah tahun rata-	2. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Strategi yang fokus pada peningkatan akses, mutu pendidikan, pengurangan putus sekolah, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong peningkatan RLS.	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	2. Badan Pusat Statistik (BPS)

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	rata pendidikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan masyarakat secara umum, sekaligus menjadi cerminan dari keberhasilan kebijakan dan program pendidikan daerah.	Sasaran ini tidak hanya mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga berdampak pada kemajuan ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia di tingkat daerah		

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Angka Harapan Lama Sekolah	1. 13,59	1. Target Indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,59 , sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 13,35 dengan realisasi 13,38 dengan capaian 100,22%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Rata-rata Lama Sekolah	2. 9,15	2. Target Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 9,15, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 8,80 dengan realisasi 8,92 dengan capaian 100,22%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 9

Uraian Sasaran

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran ini, diharapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan gizi, dan pengendalian faktor risiko kesehatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia	Umur Harapan Hidup digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan status kesehatan mereka selama hidup. Umur Harapan Hidup menggambarkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi bahwa pola mortalitas tetap konstan sepanjang hidupnya.	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser $\text{Jumlah penduduk} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Umur Harapan Hidup	74	Target Indikator kinerja Umur Harapan Hidup pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 74, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 73,10 dengan realisasi 74,1 dengan capaian 101,37%, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja Sasaran 10

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran ini, diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup, dan kemandirian masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak, produktif, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten paser Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pengurangan angka kemiskinan.	1. Angka Kemiskinan adalah indikator utama yang mencerminkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan mengacu pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu parameter keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left \frac{x - y_i}{z} \right ^a$ Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), $y_i < z$ q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka	2. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja yang layak dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

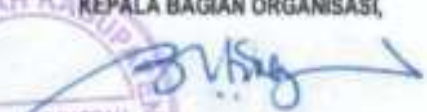
Dalam perjanjian ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan berikut:

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
1. Angka Kemiskinan	1. 8,5	1. Target Indikator kinerja Angka Kemiskinan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,5, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 9,00 dengan realisasi 8,63 dengan capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 0,37 dari target yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2. 4,50	2. Target Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,50, sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 3,94 dengan realisasi 4,53 dengan capaian kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,59 dari target yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2025 ini realisasi dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

LAMPIRAN II
SOP PENGUMPULAN DATA & LAPORAN
KINERJA KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BIAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	068.2 / 17 /Org
Tanggal Pembuatan	13 Oktober 2019
Tanggal Revisi	25 Maret 2020
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan oleh	KEPALA BAGIAN ORGANISASI,  BAMBANG ABD. HALIO, S.Kom, M.AP NIP 197002041996031002
Nama SOP	Pengumpulan Data dan Laporan Kinerja Kabupaten

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perpres 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 2. Perpres 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 3. PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memahami Prosedur Pengumpulan Data Kinerja 2. Menguasai Pengoperasian Komputer 3. Memahami tentang penyusunan Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan LKjP Kabupaten	1. Komputer/Laptop 4. LCD Projector 5. Lembar Kerja Evaluasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Data Kinerja yang disampaikan merupakan dokumen/data resmi yang bertanda tangan dan Stempel untuk kevalidan data	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Pengumpulan Data dan Laporan Kinerja Kabupaten

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Sekretaris Daerah	Kabag Organisasi	Tim Penyusun LKJP	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Asisten Administrasi Umum	Wakil Bupati	Bupati	Inspektorat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3				4			5	6	7	8	9
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan data									Surat Perintah Pembentukan Tim	120 Menit	Draft Tim	
2.	Membentuk Tim									Draft Tim	300 Menit	Tim	
3.	Menyusun Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data									Tim	600 Menit	Rencana Kegiatan Pengumpulan Data Kinerja	
4.	Menghimpun Data Kinerja dan Menyusun Konsep Laporan									Data Kinerja	900 Menit	Konsep Pelaporan Hasil	
5.	Menganalisa Data									Draft Lapoen Kinerja	900 Menit	Draft 1	
6.	Mengoreksi (Editing Data Kinerja)									Draft 1	300 Menit	Draft 2	
7.	Melaporkan Hasil Pengumpulan Data									Draft 2	120 Menit	Draft 3	
8.	Melaksanakan Rapat Intern Tim dipimpin oleh Kabag Organisasi									Draft 3	360 Menit	Draft 4	
9.	Menyusun Data dan Laporan Kinerja Hasil Rapat Intern Tim									Draft 4	360 Menit	Final Draft	

N	Uraian	Pelaksa								Mutu			Ket
		Sekretaris Darah	Kabag ganisasi	Tim Penyusun LKjIP	Kasubbag Kinerja RB	Ass Adm Umum	Wakil Bupati	Bupati	Inspek torat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3				4			5	6	7	8	9
1	Memberi Paraf Koordinasi Laporan									Final	24 Men	Final	
1	Menandatangani Laporan									Final	48 Men	Laporan yang ditandatangani	
1	Menyerahkan Laporan ke Inspektorat untu									Laporan yang ditandatangani	6 Men	Tanda	
1	Mengarsipkan									Laporan yang ditandatangani	1 Men	Arsi	

LAMPIRAN III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



SALINAN

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-171/2024**

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 terdapat penyempurnaan atas Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser, maka perlu melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

2. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/498/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2021-2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INDIKATOR TUJUAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN dan DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$ Keterangan: R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%) PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun t PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun sebelumnya Defenisi Operasional : Pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan pertumbuhan PDRB. Untuk mengukur pertumbuhan output riil, maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menyesuaikan efek perubahan harga (inflasi).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN dan DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi RB dari KemenPanRB Defenisi Operasional : Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi penilaian atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik	Kementerian PAN	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi/ Semua PD
3.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$ Keterangan: Xi dan Xj : Nilai pendapatan seorang individu N : Jumlah observasi X bar : Rata-rata pendapatan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN dan DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Defenisi Operasional : Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ukuran Rasio Gini antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sedangkan rasio Gini bernilai 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna.		
4.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indikator IPM	$IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))$ Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak Defenisi Operasional : IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II. INDIKATOR SASARAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	$\frac{\Sigma \text{kontribusi PDRB dari sektor Pertanian Perkebunan}}{\Sigma \text{PDRB}} \times 100\%$ Defenisi Operasional : Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di wilayah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu dan dipengaruhi oleh faktor –faktor selain pertambangan dalam hal ini adalah sektor pertanian. Salah satu sub sektor penopang PDRB Kabupaten Paser adalah sektor pertanian yaitu dari perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Paser merupakan penghasil terbesar ke 2 setelah Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur. Namun CPO diolah di luar Kabupaten Paser, dikarenakan tidak adanya industri	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah,

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			hilirisasi atau turunan dari CPO misalnya minyak goreng. Sehingga nilai tambah (value added) yang lebih besar sektor pertanian (kelapa sawit) yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil dan perlu ditingkatkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal/non tambang		
2.	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Restoran dan rumah makan dalam satu tahun Defenisi Operasional : usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dan sub sektor makanan dan minuman adalah kelompok perusahaan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk makanan dan minuman.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB Defenisi Operasional :	Kementerian PAN	Bappeda Litbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</i> Defenisi Operasional : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui dimensi meliputi: - Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Penyerapan anggaran; e. Kondisi keuangan daerah; dan f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.		
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	Jumlah nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survey IKM Defenisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
5.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	$\frac{\sum \text{Tindak Kriminal dalam 1 Tahun}}{\sum \text{Penduduk}} \times 10.000$ Defenisi Operasional :	Badan Pusat Statistik (BPS)	Satpol PP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan pada masyarakat di suatu daerah semakin tidak aman		
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : 1. <i>Ketersediaan Fisik (availability)</i> 2. <i>Kualitas Fisik (quality)</i> 3. <i>Kesesuaian (Appropriateness)</i> 4. <i>Efektifitas Pemanfaatan (Utility)</i> 5. <i>Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)</i> 6. <i>Kontribusi pada Perekonomian</i> Defenisi Operasional : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Paser. IKLI yang menjadi suatu alat yang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.		
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100 Defenisi Operasional : <i>Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan menjawab permasalahan yang sejauh ini bermunculan dalam penerapannya.</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ Dimana : IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Defenisi Operasional : Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan hidup menjadi ukuran yang penting. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	$IRB = R = H \times V E / C$ R : Risiko. Pengertian risiko : Risiko adalah peluang untuk rugi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Risiko adalah kemungkinan kehilangan</i> <i>Risiko adalah ketidakpastian</i> <i>Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan</i> <i>V : Vulnerability (kerentanan)</i> <i>H : Hazar (Bahaya)</i> <i>E : Elemen berisiko</i> <i>C : Capacity (Kapasitas)</i> Defenisi Operasional : <i>risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (hazards) yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan roman muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu daerah.</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
S.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana : HLS_a^t = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pd tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren Defenisi Operasional : Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas Defenisi Operasional : Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak sampai usia 12 tahun keatas.		
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser Jumlah penduduk x 100% Defenisi Operasional : Umum Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Kesehatan
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left \frac{z - y_i}{z} \right ^a$ Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan		Dinas Sosial

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk Defenisi Operasional : Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat.	Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Defenisi Operasional : Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.		

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN IV
PENGHARGAAN-PENGHARGAAN
YANG DIRAIH PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025



Ajang Apresiasi GTK Hebat 2025 Kaltim

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) asal Kabupaten Paser berhasil merebut dua medali emas, tiga medali perak dan tiga medali perunggu dalam ajang Apresiasi GTK Hebat 2025 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ajang itu diinisiasi oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kaltim yang diikuti 168 peserta dari berbagai unsur GTK, meliputi pengawas/penilik, kepala sekolah, guru, tutor dan tenaga kependidikan (tendik) se-Kaltim.

Tahun ini, lomba Apresiasi GTK Hebat mengusung tiga kategori utama, yaitu GTK Transformatif, GTK Dedikatif, dan GTK Pelopor Komunitas Belajar. Kabupaten Paser turut berpartisipasi dengan mengirimkan 13 orang terbaik yang mewakili berbagai jenjang pendidikan untuk bersaing dengan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.



Juara 1

Lomba Desa/Kampung Se Kalimantan Timur 2025

Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser meraih juara pertama pada Lomba Desa/Kampung Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025. Capaian ini memberikan kesempatan bagi Desa Padang Jaya untuk mewakili Kaltim pada ajang serupa di tingkat nasional.

Desa Padang Jaya unggul dari dua finalis lainnya yang diduduki Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada posisi kedua dan posisi ketiga diraih Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)



Terbaik I Penghargaan Arindama Tingkat Provinsi Kaltim 2025

Kabupaten Paser meraih Penghargaan Arindama terbaik I bidang Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta bidang Peternakan dan Perkebunan.

Selain penghargaan pada bidang itu, Paser juga meraih penghargaan pada bidang lain seperti terbaik II pada bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, terbaik III bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kehutanan.



Penghargaan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) 2025

Pemerintah Kabupaten Paser sepanjang tahun 2025 menuai pengakuan luas. Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menorehkan sejumlah prestasi membanggakan dengan meraih berbagai penghargaan tingkat nasional hingga Provinsi Kalimantan Timur, yang mencerminkan tata kelola pemerintahan daerah yang progresif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Fahmi Fadli dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Hari Jadi ke-66 Kabupaten Paser, Senin (29/12/2025). Ia menegaskan, seluruh penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah bersama masyarakat.

Salah satu penghargaan paling bergengsi datang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Dalam ajang Setara Cita Convention and Job Fair 2025 yang diselenggarakan sawitsetara.co pada September 2025 lalu, APKASINDO menganugerahkan penghargaan kepada Bupati Paser dengan kategori "Bupati Perkebunan Sawit Rakyat".



Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2025 Kategori Madya

Kabupaten Paser kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Tahun ini, Paser berhasil naik peringkat ke kategori Madya, setelah sebelumnya selama tujuh kali berturut-turut hanya berada di kategori Pratama. Dilansir dari RRI Kaltim, penghargaan tersebut disampaikan pada Senin (8/9/2025). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Paser, Amir Faisol, menyebut capaian ini sebagai bukti meningkatnya komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.



**Penghargaan
Kualifikasi Unggul Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
dari LAN RI**

Bupati Paser, dr Fahmi Fadli mendapatkan penghargaan Kualifikasi Unggul dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025.

Pengambilan kebijakan yang tepat, cermat, dan cemerlang oleh Fahmi Fadli membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mendapatkan nilai IKK tahun 2025 yang fantastis.

Yakni sebesar 95,42 dari hasil penilaian komprehensif oleh tim independen, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Penghargaan itu diserahkan langsung Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Muhammad Taufiq, di Novotel Samator, Surabaya, Selasa (25/11/25) lalu.

Kabupaten Paser menjadi satu-satunya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapatkan penghargaan Kualifikasi Unggul IKK dari LAN RI.

Penghargaan ini diberikan LAN RI sebagai pengakuan atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Paser.

Dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang berbasis data dan inovatif yang berdampak langsung serta nyata bagi kesejahteraan masyarakat.



Penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Kemendikdasmen 2025

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paser, M. Yunus Syam, yang mewakili Bupati Paser.

Kemendikdasmen menyerahkan penghargaan tersebut kepada 20 kepala daerah karena berdedikasi dan komitmen terhadap kemajuan pendidikan. Pencapaian ini menjadi sorotan bagi Kalimantan Timur karena hanya Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Keberhasilan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Paser memprioritaskan sektor pendidikan.